

STRATEGI PENANGANAN SANITASI KAWASAN

PERMUKIMAN KUMUH

DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Menyusun Laporan Tugas Akhir
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



Disusun oleh:

**MUHAMMAD HELMI SETIAWAN
153410010**

PROGRAM STUDI PRENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2020

**“STRATEGI PENANGANAN SANITASI KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH”**

MUHAMMAD HELMI SETIAWAN

NPM: 153410010

ABSTRAK

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni. Lokasi permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah terdapat dua desa yang termasuk kategori kumuh sedang yaitu Desa Koto Taluk dan Desa Sawah dengan masalah utama yaitu terhadap sanitasi permukiman yang terdiri atas drainase lingkungan, air limbah permukiman dan persampahan permukiman, dengan kondisi sarana prasarana dari sanitasi tersebut belum memadai sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.

Metode dan analisis yang digunakan ialah teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan skala likert, serta menggunakan metode *Probability Sampling* dengan jenis *Simple Random Sampling*.

Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik sanitasi permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah masih belum sesuai standar teknis, dimana hasil tingkat permasalahannya di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah dengan indikator fisik, pelaksana, dan perilaku yaitu dengan tingkat sedang, tetapi rata-rata tingkat permasalahan dominan lebih tinggi di Desa Koto Taluk. Kemudian dari hasil strateginya menggunakan analisis SWOT yaitu terdiri atas Strategi S-O, Strategi W-O, Strategi S-T, Strategi W-T, dengan keterkaitan antara drainase lingkungan, air limbah, dan persampahan dalam upaya penanganan sanitasi di Kecamatan Kuantan Tengah

Kata Kunci : Sanitasi, Permukiman Kumuh, Strategi Penanganan.

“STRATEGY FOR HANDLING SANITATION SLUM AREAS IN KUANTAN TENGAH OF SUBDISTRICT ”

MUHAMMAD HELMI SETIAWAN

NPM: 153410010

ABSTRACT

Slums are a condition of a residential environment with a very poor quality. Location of slum settlements in Kuantan Tengah Subdistrict there are two villages which are categorized as medium slum, namely Koto Taluk Village and Sawah Village, with the main problem being sanitation settlements including environmental drainage, residential wastewater and waste settlement, with the condition of infrastructure facilities from sanitation not yet adequate so that it causes various kinds of problems. The purpose of this study was to formulate the Sanitation Strategy of Slums in the Kuantan Tengah Subdistrict.

The methods and analysis used are qualitative and quantitative descriptive analysis techniques with a Likert scale, and use the Probability Sampling method with the type of Simple Random Sampling.

The results of this study are the characteristics of the sanitation of slums in Central Kuantan Sub-district are still not in accordance with technical standards, where are the results of the level of problems in the villages of Koto Taluk and Sawah Village with physical indicators, implementers , and behaviors are moderate, but the average level of dominant problems is higher in Koto Taluk Village. Then from the results of its strategy using SWOT analysis which consists of the S-O Strategy, W-O Strategy, S-T Strategy, W-T Strategy, with the relationship between environmental drainage, wastewater, and solid waste in efforts to handle sanitation in Kuantan Tengah subdistrict

Keywords: Sanitation, Slums, Handling Strategy.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah! Robil'alamin puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul pembahasan **“Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah”**. Sebagai memenuhi persyaratan akademis untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Islam Riau Pekanbaru Provinsi Riau.

Tugas akhir ini berisi tentang strategi penanganan kawasan permukiman kumuh, dimana untuk merumuskan strategi penanganan sanitasi maka perlu mengetahui kondisi karakteristik sanitasi kawasan permukiman kumuh dan tingkat permasalahan sanitasi kawasan permukiman kumuh. Dimana penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kuantan Tengah dengan ruang lingkup wilayah yaitu di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menyadari bahwasanya sepenuhnya begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi SH. M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Eng, Muslim, ST., MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Puji Astuti, ST. MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan juga selaku pembimbing yang telah membimbing, mendukung, serta memberi saran dan arahan yang bermanfaat kepada penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Muhammad Sofwan ST. MT selaku sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
5. Bapak Faizan Dalilla, ST. Msi selaku Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota serta penguji I yang telah memberi saran saat seminar proposal seminar hasil, dan seminar komprehensif.
6. Bapak Ir. H. Firdaus Agus, MP selaku Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota serta penguji II yang telah memberi saran saat seminar proposal, seminar hasil, dan seminar komprehensif.
7. Staf dan karyawan dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
8. Ibu Hazna, ST sebagai Kepala Kepala Bidang Perekonomian,SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan di Dinas BAPPEDALITBANG Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan dukungan dan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada penulis.
9. Bapak Khairul Amirullah, ST, M.Eng sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Dinas PKPP kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan dukungan dan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada penulis.
10. Bapak Camat Kecamatan Kuantan Tengah yang telah memberikan dukungan dan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada penulis.

11. Bapak Kepala Desa Koto Taluk dan Bapak Kepala Desa Sawah serta Staf di Desa yang telah memberikan dukungan dan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada penulis.
12. Bapak RT dan RW di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah yang telah memberikan dukungan dan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada penulis.
13. Kedua orangtua penulis, papa dan mama yang selalu memberikan dukungan, memberikan doa yang tiada hentinya, memberikan nasihat serta semangat dan kepercayaan kepada penulis hingga tugas akhir ini selesai. Tidak ada jasa yang terbaik selain mampu membanggakan kedua orangtua dengan memberikan segala yang terbaik dengan membawa nama baik kedua orang tua.
14. Adik-adik yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada seluruh tante dan oom, nenk, serta keluarga lainnya yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Partner kelahi Dhea Putri Asmita yang selalu mau direpotkan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu menerima keluh kesah penulis disaat penulis mengerjakan skripsi, dan yang selalu memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
17. Vatur yang membantu dalam proses pembuatan peta dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman Planologi 15 A yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan hadir mendukung serta mendoakan saat seminar proposal, seminar hasil maupun komprehensif.

Dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, menjadi ukuran bagi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Demikian dengan selesainya laporan tugas akhir ini, penulis mengharapkan semoga laporan tugas akhir ini berguna dan bermanfaat.

Pekanbaru, Agustus 2020

Muhammad Helmi Setiawan



DAFTAR ISI

Isi	Halaman
Halaman Judul	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Sasaran	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah	7
1.5.2 Ruang Lingkup Materi	11
1.6 Kerangka Berfikir.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Pengertian Permukiman dan Perumahan.....	14
2.2	Pengertian Permukiman Kumuh.....	15
2.2.1	Indikator Permukiman Kumuh.....	15
2.3	Pengertian Sanitasi	17
2.4	Indikator Sanitasi Permukiman	20
2.4.1	Sampah.....	20
2.4.2	Air Limbah	22
2.4.3	Drainase	24
2.5	Konsep-Konsep Penanganan Samitasi Permukiman	26
2.5.1	Konsep Penanganan Persampahan.....	26
2.5.2	Konsep Penanganan Air Limbah	30
2.5.2.1	Konsep Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) .	36
2.5.2.2	Konsep Community Led Total Sanitation (CLTS) atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).....	39
2.5.3	Konsep Penanganan Drainase Perkotaan	42
2.6	Tinjauan Kebijakan.....	48
2.7	Sintesa Teori	52
2.8	Penelitian Terdahulu.....	57

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Pendekatan Metode Penelitian	67
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	68
3.3	Jenis Data dan Sumber Data	68
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	70
3.5	Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling.....	73
3.5.1	Populasi Penelitian.....	73
3.5.2	Sample Penelitian.....	73
3.5.3	Teknik Sampling.....	74
3.6	Tahapan Penelitian	77
3.6.1	Pra Lapangan.....	77
3.6.2	Lapangan.....	79
3.6.3	Pasca Lapangan.....	79
3.7	Teknik Analisis	81
3.7.1	Mengidentifikasi Karakteristik Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah	82
3.7.2	Menganalisis Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah	83
3.7.3	Merumuskan Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah	85

3.8	Variabel Penelitian	87
3.9	Desain Survei	88

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	91
4.1.1	Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	91
4.1.2	Letak Geografis Kabupaten Kauntan Singingi	94
4.1.3	Klasifikasi Ruang Kabupaten Kuantan Singingi	95
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah.....	97
4.2.1	Letak Geografis Kecamatan Kuantan Tengah	98
4.2.2	Kependudukan Kecamatan Kuantan Tengah	100
4.2.3	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya di Kecamatan Kuantan Tengah	101
4.3	Gambaran Umum Desa Koto Taluk	103
4.3.1	Letak Geografis Desa Koto Taluk	103
4.3.2	Kependudukan Desa Koto Taluk	105
4.3.3	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya di Desa Koto Taluk	105
4.3.3.1	Kondisi Sosial Desa Koto Taluk.....	105
4.3.3.2	Kondisi Budaya Desa Koto Taluk	106
4.3.3.3	Kondisi Ekonomi Desa Koto Taluk	106
4.4	Gambaran Umum Desa Sawah	107
4.4.1	Letak Geografis Desa Sawah	107
4.4.2	Kependudukan Desa Sawah.....	109

4.4.3	Kondisi Sosial,Ekonomi dan Budaya di	
	Desa Sawah	109
4.4.3.1	Kondisi Sosial Desa Sawah.....	109
4.4.3.2	Kondisi Budaya Desa Sawah	110
4.4.3.3	Kondisi Ekonomi Desa Sawah.....	110
4.5	Gambaran Umum Kondisi Sanitasi di Kabupaten	
	Kuantan Singingi.....	111
4.5.1	Gambaran Umum Kondisi Sanitasi Kecamatan	
	Kuantan Tengah	114
4.5.1.1	Gambaran Umum Kondisi Sanitasi	
	Desa Koto Taluk.....	114
4.5.1.1	Gambaran Umum Kondisi Sanitasi	
	Desa Sawah	115

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	Karakteristik Sanitasi di Kawasan Perukiman Kumuh Kecamatan Kuantan Tengah	120
5.1.1	Karakteristik Sanitasi di Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Koto Taluk	120
5.1.2	Karakteristik Sanitasi di Kawasan Perukiman Kumuh di Desa Sawah	134
5.2	Menganalisis Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.....	148
5.2.1	Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Koto Taluk.....	148
5.2.2	Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Sawah	156
5.3	Merumuskan Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.....	165

BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan.....	180
6.2	Saran.....	190

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Konsep Penanganan Drainase	43
Tabel 2.2 Tinjauan Kebijakan	48
Tabel 2.3 Sintesa Teori.....	53
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	58
Tabel 3.1 Sumber dan Jenis Data Sekunder.....	70
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk di Lokasi Penelitian Tahun 2018.....	75
Tabel 3.3 Jumlah Responden di Lokasi Penelitian Tahun 2019	76
Tabel 3.4 Indeks Skala Likert	83
Tabel 3.5 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval.....	84
Tabel 3.6 Variabel Penelitian.....	88
Tabel 3.7 Desain Survei	89
Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.....	94
Tabel 4.2 Pola Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.....	95
Tabel 4.3 Data Kependudukan Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019	100
Tabel 4.4 Data Kependudukan Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019	101
Tabel 4.5 Data Kependudukan di Desa Koto Taluk Tahun 2019	105
Tabel 4.6 Data Kependudukan di Desa Sawah Tahun 2019.....	109

Tabel 5.1	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Koto Taluk	119
Tabel 5.2	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Sawah	119
Tabel 5.3	Indikator Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi)	149
Tabel 5.4	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	150
Tabel 5.5	Indikator Pelaksana (Sistem Pengelolaan Sanitasi)	151
Tabel 5.6	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	152
Tabel 5.7	Indikator Pelaksana (Peran Pemerintah)	152
Tabel 5.8	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	153
Tabel 5.9	Indikator Pelaksana (Peran Pemerintah)	153
Tabel 5.10	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	154
Tabel 5.11	Indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi)	155
Tabel 5.12	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	156
Tabel 5.13	Indikator Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi)	157
Tabel 5.14	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	158
Tabel 5.15	Indikator Pelaksana (Peran Pemerintah)	159
Tabel 5.16	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	160
Tabel 5.17	Indikator Pelaksana (Peran Pemerintah)	160
Tabel 5.18	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	161
Tabel 5.19	Indikator Pelaksana (Peran Pemerintah)	162
Tabel 5.20	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	162
Tabel 5.21	Indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi).....	163
Tabel 5.22	Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval	164

Tabel 5.23 Rekapitulasi Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan	
Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.....	164
Tabel 5.24 Tabel SWOT Desa Koto Taluk.....	165
Tabel 5.25 Tabel SWOT Desa Sawah.....	167
Tabel 5.26 Analisis SWOT Desa Koto Taluk.....	169
Tabel 5.27 Analisis SWOT Desa Sawah.....	172



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Kuantan Tengah	9
Gambar 1.2 Peta Orientasi Desa Koto Taluk dan Desa Sawah.....	10
Gambar 1.3 Kerangka berfikir	13
Gambar 2.1 Konsep Pengelolaan Persampahan.....	27
Gambar 2.2 Konsep Pengelolaan Air Limbah	30
Gambar 2.3 Skema Sistem Drainase Perkotaan.....	44
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi	96
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Kuantan Tengah.....	99
Gambar 4.3 Peta Admnistrasi Desa Koto Taluk	104
Gambar 4.4 Peta Admnistrasi Desa Sawah.....	108
Gambar 5.1 Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air di Desa Koto Taluk.....	120
Gambar 5.2 Ketidakterediaan Drainase di Desa Koto Taluk	121
Gambar 5.3 Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan di Desa Koto Taluk.....	122
Gambar 5.4 Tidak Terpeliharanya Drainase di Desa Koto Taluk.....	123
Gambar 5.5 Kualitas Kontruksi Drainase di Desa Koto Taluk	124
Gambar 5.6 Peta Persebaran Drainase Desa Koto Taluk.....	125
Gambar 5.7 Peta Persebaran Air Limbah Desa Koto Taluk	128
Gambar 5.8 Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah di Desa Koto Taluk.....	130

Gambar 5.9	Kondisi Pengelolaan Sampah Yang Tidak Sesuai di Desa Koto Taluk.....	131
Gambar 5.10	Kondisi Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan di desa Koto Taluk.....	132
Gambar 5.11	Peta Persebaran Persampahan Desa Koto Taluk.....	133
Gambar 5.12	Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air di Desa Sawah	134
Gambar 5.13	Ketidakterediaan Drainase di Desa Sawah.....	135
Gambar 5.14	Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan di Desa Sawah	136
Gambar 5.15	Tidak Terpeliharanya Drainase di Desa Sawah	137
Gambar 5.16	Kualitas Kontruksi Drainase di Desa Sawah.....	138
Gambar 5.17	Peta Persebaran Drainase Desa Sawah.....	139
Gambar 5.18	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis di Desa Sawah.....	141
Gambar 5.19	Peta Persebaran Air Limbah Desa Sawah	142
Gambar 5.20	Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah di Desa Sawah	144
Gambar 5.21	Kondisi Pengelolaan Sampah Yang Tidak Sesuai di Desa Sawah	145
Gambar 5.22	Kondisi Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan di desa Sawah	146
Gambar 5.23	Peta Persebaran Persampahan Desa Sawah	147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki masalah permukiman terutama untuk wilayah perkotaan pada umumnya disebabkan karena adanya jumlah penduduk yang relatif meningkat dari tahun ketahun, sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang, masalah permukiman merupakan salah satu faktor penghambat bagi suatu daerah dalam usaha peningkatan mutu kualitas lingkungan fisik permukiman dimana pertumbuhan penduduk yang tinggi, baik yang disebabkan oleh pertumbuhan secara alami maupun oleh urbanisasi yang tidak terkendali akan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan fisik permukiman yang ada.

Perkembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum mengantisipasi fenomena perkembangan aktifitas perkotaan yang ada akan menimbulkan persoalan seperti : tidak meratanya infrastruktur, tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, perkembangan permukiman yang tidak terkendali, dan timbulnya permukiman kumuh (Bintang, 2014).

Menurut Heriyanto (2007) bahwasanya permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni. Permasalahan akan permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan kompleks yang ada di setiap kota besar di

Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya akibat yang akan ditimbulkan pada setiap permasalahan permukiman kumuh yang ada, salah satu contoh yang banyak terjadi adalah masalah kesehatan yang diakibatkan oleh buruknya kondisi lingkungan yang ada di kawasan permukiman kumuh.

Keberadaan kawasan permukiman kumuh di kota – kota besar dan berkembang telah menjadi masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah baik ditinjau dari aspek tata ruang, estetika, lingkungan, dan sosial. Kondisi ini disebabkan oleh adanya budaya masyarakat yang suka hidup mengelompok dan kurang memperhitungkan ruang – ruang untuk fasilitas penunjang kawasan permukiman dalam melakukan pembangunan rumah. Akibatnya kawasan yang terbangun tidak memperhatikan aspek keruangan, lingkungan dan sosial yang berimplikasi memberikan gambaran suatu kawasan permukiman yang kumuh.

Berdasarkan Buku Putih Sanitasi Kuantan Singingi (2014) sanitasi merupakan bagian penting dari pelayanan dasar permukiman yang kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dari berbagai kajian terungkap bahwa kondisi sanitasi di Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya. Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya

penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra kota, hingga menurunnya perekonomian ditingkat daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015 - 2019 Kabupaten Kuantan Singingi telah ditetapkan sasaran penyelenggaraan permukiman di kawasan perkotaan yaitu untuk mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas dan juga mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi, melalui gerakan 100-0-100 sebagai platform perwujudan dari Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu, 100% akses air minum, 0% Kawasan Kumuh dan 100% Akses sanitasi yang layak.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah terlaksana di Kabupaten Kuantan Singingi yang bertepatan di Kecamatan Kuantan Tengah dengan luas wilayah sebesar 291,74km² dengan jumlah penduduk 32.384 jiwa. Sektor sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Kondisi sanitasi yang tidak memadai akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan terutama di daerah permukiman padat, kumuh dan miskin di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam hal ini Kabupaten Kuantan Singingi memiliki visi sanitasi yaitu *“Terwujudnya sanitasi Kabupaten Kuantan Singingi yang berkualitas, sehat, ramah lingkungan dan berbasis masyarakat pada tahun 2019”* akan tetapi visi tersebut belum terwujud merata di Kabupaten Suantan

Singingi, terutama di Kecamatan Kuantan Tengah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencapai target *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.421/IX/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Kuantan Singingi, salah satunya terletak di Kecamatan Kuantan Tengah. Adapun lokasi penelitian berdasarkan SK tersebut di Kecamatan Kuantan Tengah dengan lima desa/kelurahan dengan tingkat kekumuhan sedang dan rendah. Saat ini kondisi tingkat kekumuhan sedang terletak di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah, sedangkan tingkat kekumuhan ringan terletak di Desa Beringin Taluk, Kelurahan Pasar Taluk dan Kelurahan Simpang Tiga.

Dalam lokasi permukiman kumuh terdapat dua desa yang termasuk kategori kumuh sedang yaitu Desa Koto Taluk dan Desa Sawah dengan masalah utama yaitu terhadap sanitasi permukiman yang terdiri atas drainase lingkungan, air limbah permukiman dan persampahan permukiman, dengan kondisi sarana prasarana dari sanitasi tersebut belum memadai sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan. Maka berdasarkan hal diatas perlu dilakukan kajian mengenai ***“Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah”***

1.2 Perumusan Masalah

Sanitasi permukiman terdiri atas drainase lingkungan, air limbah permukiman, dan persampahan permukiman, dimana kondisi sanitasi di kawasan permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah memiliki permasalahan yang kompleks, dimana drainase lingkungan belum terhubung dengan hirarki drainasenya, belum ada Master Plan air limbah permukiman, masih menggunakan sistem *on site system* dan belum ada pengolahan lainnya dan belum adanya sistem kelembagaan baik tingkat pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengolahan air limbah. Kemudian persampahan permukiman belum adanya Master Plan persampahan, lalu jumlah TPS tidak memadai dimana belum memiliki bangunan yang lengkap, kemudian berdasarkan memorandum program sanitasi (MPS) Kabupaten Kuantan Singingi tingkat pelayanan persampahan baru mencapai 12,82 %, dan tidak adanya pemanfaatan sistem teknologi daur ulang, serta rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka timbul pertanyaan yang dapat dijadikan bahan studi dalam penyusunan tugas akhir ini, yaitu

1. Bagaimana Karakteristik Sanitasi di Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Kuantan Tengah?
2. Bagaimana Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah?
3. Bagaimana Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah merumuskan Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.

1.3.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Teridentifikasi Karakteristik Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Menganalisis Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.
3. Terumuskan Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi instansi atau pemerintah

Penelitian mengenai Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah dapat memberikan masukan dan

pertimbangan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait di Kuantan Singingi.

2. Manfaat bagi peneliti atau akademis

Penelitian ini memperoleh manfaat secara teoritis dan praktikal terhadap Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.

3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan dan referensi untuk penelitian selanjutnya

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

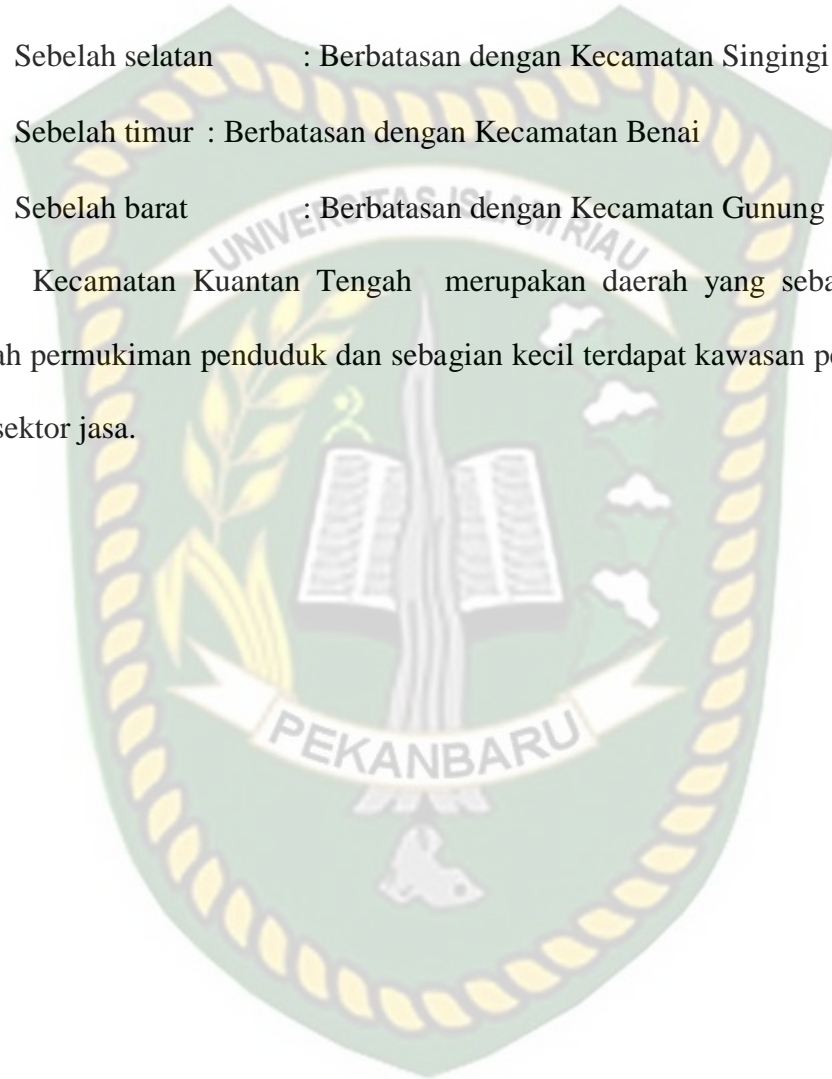
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

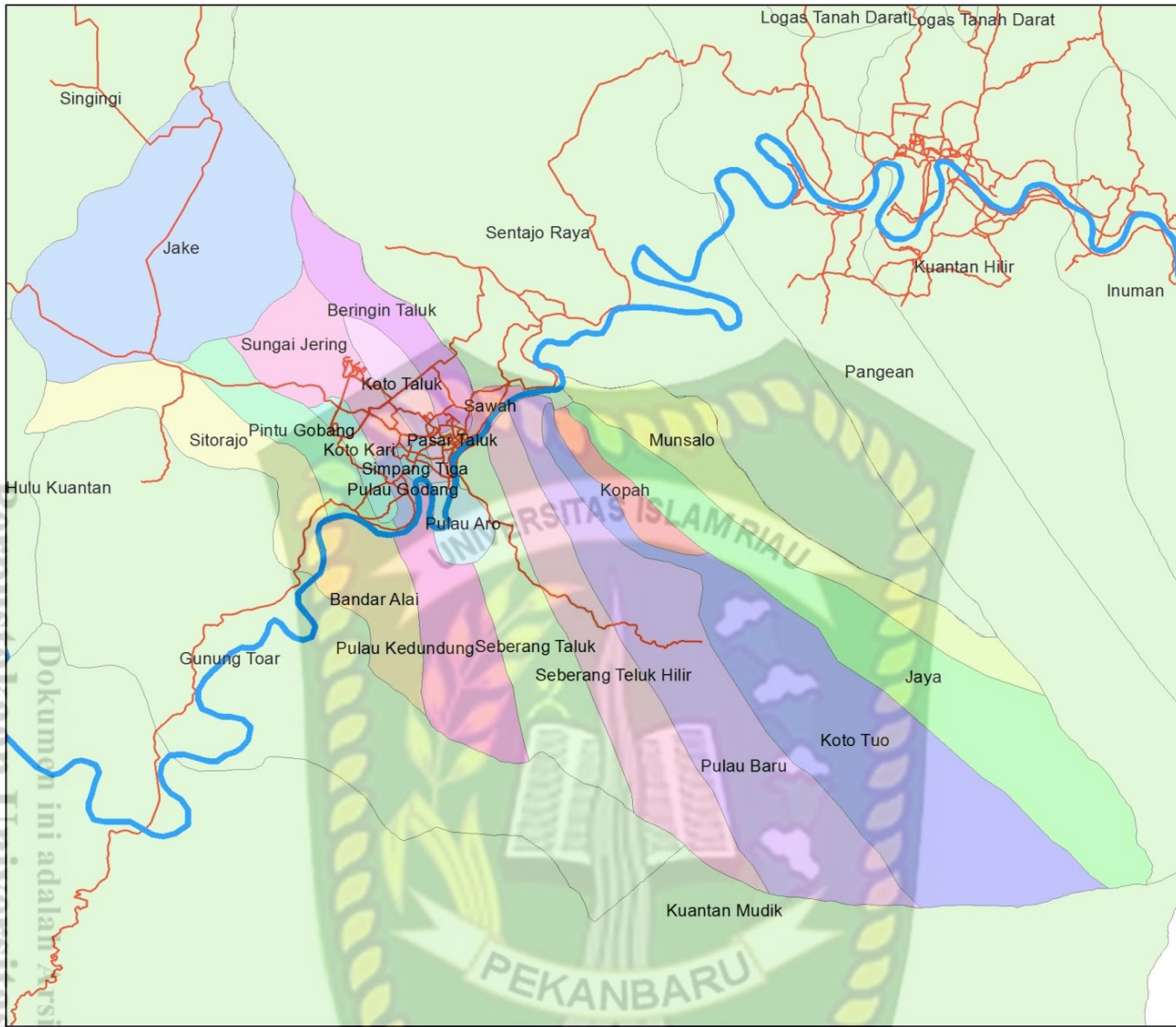
Kecamatan Kuantan Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 291,74km² dengan jumlah penduduk 32.384 jiwa. Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Kuantan Tengah rata – rata adalah 123,64 jiwa/km² (Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka Tahun 2018).

Secara geografis wilayah Kecamatan Kuantan Tengah terletak di pusat KotaTeluk Kuantan. Secara administrasi Kelurahan Kuantan Tengah bebatasan dengan:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan KecamatanSentajo Raja
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Singingi
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Benai
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Toar

Kecamatan Kuantan Tengah merupakan daerah yang sebagian besar adalah permukiman penduduk dan sebagian kecil terdapat kawasan perdagangan dan sektor jasa.

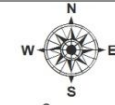




GAMBAR 1.1
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KUANTAN TENGAH



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PRODI PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan

- Sungai

Jaringan Transportasi

- Jaringan Jalan

Kelurahan

- | | |
|----------------|----------------------|
| Bandar Alai | Pasar Taluk |
| Beringin Taluk | Pintu Gobang |
| Jake | Pulau Aro |
| Jaya | Pulau Baru |
| Kopah | Pulau Godang |
| Koto Kari | Pulau Kedundung |
| Koto Taluk | Sawah |
| Koto Tuo | Seberang Taluk |
| Munsalo | Seberang Teluk Hilir |
| Simpang Tiga | Sungai Jering |
| Sitorajo | |

Sumber:

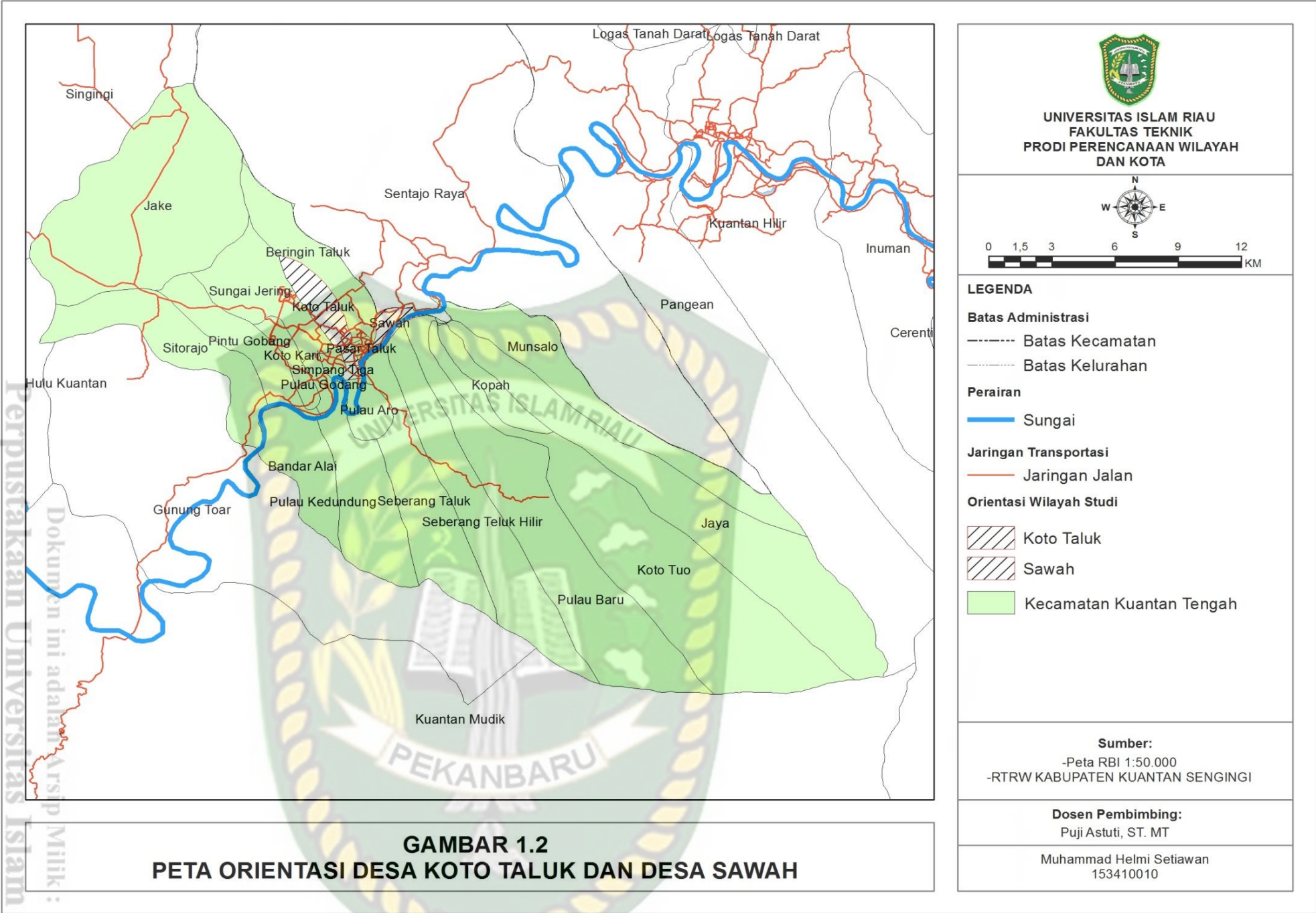
- Peta RBI 1:50.000
- RTRW KABUPATEN KUANTAN SENGINGI

Dosen Pembimbing:

Puji Astuti, ST. MT

Muhammad Helmi Setiawan
153410010

Dokumentasi ini adalah arsip Milik: Perpustakaan Universitas Islam Riau





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PRODI PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA





LEGENDA

Batas Administrasi
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kelurahan

Perairan
 — Sungai

Jaringan Transportasi
 — Jaringan Jalan

Orientasi Wilayah Studi

▨ Koto Taluk
 ▨ Sawah
 □ Kecamatan Kuantan Tengah

Sumber:
 -Peta RBI 1:50.000
 -RTRW KABUPATEN KUANTAN SENGINGI

Dosen Pembimbing:
 Puji Astuti, ST, MT
 Muhammad Helmi Setiawan
 153410010

GAMBAR 1.2
PETA ORIENTASI DESA KOTO TALUK DAN DESA SAWAH

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi merupakan batasan cakupan penelitian dengan tujuan agar penelitian ini lebih terarah, efektif juga efisien terhadap output penelitian yaitu Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah. Agar lebih jelas, secara rinci ruang lingkup materi pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi karakteristik sanitasi di kawasan permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah melalui indikator sanitasi permukiman kumuh yang terdiri dari :
 - a) Drainase lingkungan (ketersediaan drainase, pemeliharaan drainase dan kualitas drainase)
 - b) Pengelolaan air limbah (prasarana air limbah dan pengelolaan air limbah)
 - c) Pengelolaan persampahan (prasarana persampahan, pengelolaan persampahan, dan pemeliharaan persampahan)

Dalam mengidentifikasi karakteristik sanitasi tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui observasi atau pengamatan secara langsung kondisi eksisting sanitasi di kawasan permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah.

2. Menganalisis Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - a. Fisik (kondisi prasarana sanitasi)
 - b. Pelaksana (sistem pengelolaan, peran pemerintah, peran masyarakat)

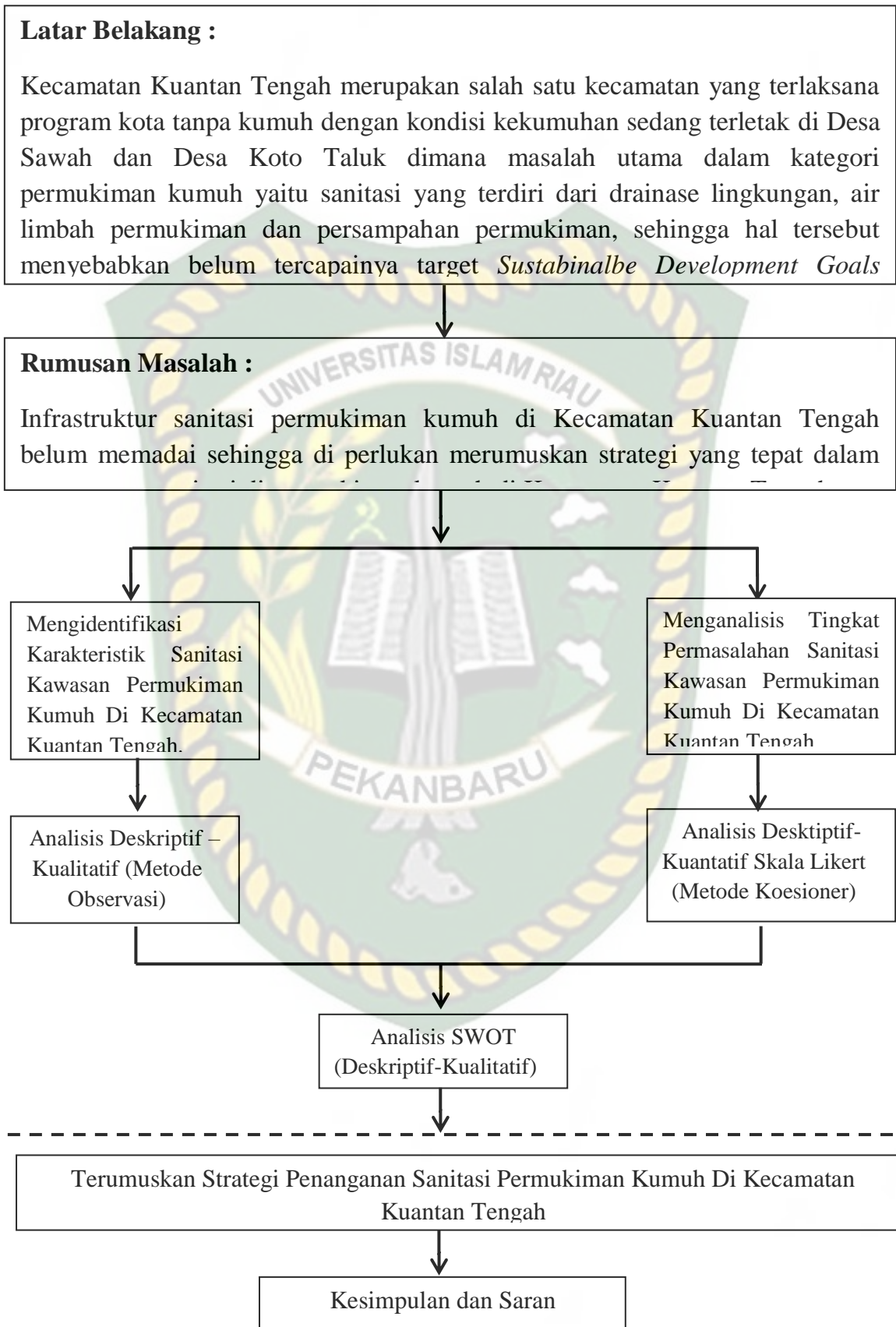
c. Perilaku (kebiasaan masyarakat)

Dalam menganalisis tingkat permasalahan sanitasi tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif (campuran) melalui koesioner di kawasan permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah.

3. Merumuskan Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu berdasarkan hasil kondisi karakteristik sanitasi dan hasil dari tingkat permasalahan sanitasi menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui metode analisis SWOT.

1.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan langkah kerja untuk mencapai output yang diharapkan. Berikut gambar 1.2 kerangka berpikir dalam penelitian ini :



Gambar 1.3 Kerangka berfikir

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Permukiman dan Perumahan

a) Perumahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Dalam SNI 03-6981-2004 perumahan didefinisikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

b) Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan. Permukiman merupakan bentuk tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur fisik dalam arti permukiman merupakan wadah aktifitas tempat bertemunya komunitas untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat (Niracanti 2001).

2.2 Pengertian Permukiman Kumuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Undang-Undang No. Tahun 2011 dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat dan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

2.2.1 Indikator Permukiman Kumuh

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 terdapat beberapa indikator permukiman kumuh yaitu;

1) Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung ini mencakup sebagai berikut:

- a. Ketidakteraturan bangunan
- b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang
- c. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung

2) Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup sebagai berikut:

- a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman
- b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

3) Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup sebagai berikut :

- a. Ketidakterediaan akses aman air minum
- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku

4) Drainase Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup sebagai berikut :

- a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
- b. Ketidakterediaan drainase

Ketidakterediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

- c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
- d. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya

- e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

5) Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup sebagai berikut :

- a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
- b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

6) Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup sebagai berikut:

- a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
- b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
- c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

7) Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan sebagai berikut:

- a. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran
- b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

2.3 Pengertian Sanitasi

Menurut Brikke dan Bredero (2003) dalam Hasan (2018) bahwasannya sanitasi merupakan suatu usaha pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik,

kimia, dan biologi dalam lingkungan hidup manusia, yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia. Dalam pengertian lain, menurut Owoyeye (2013) dalam Hasan (2018) Sanitasi lingkungan dinyatakan sebagai kontrol dari semua faktor dalam lingkungan fisik manusia yang dapat merusak pada perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup. Masalah sanitasi lingkungan disebabkan oleh kondisi drainase, penyaluran limbah dan persampahan yang buruk. Menurut UN Water (2008) dalam Jovanni (2016) elemen sanitasi terdiri atas sanitasi dasar rumah tangga, manajemen limbah padat rumah tangga, drainase alir limbah rumah tangga dan air hujan serta pengelolaan limbah industri.

Dalam pandangan islam selain untuk beribadah kepada allah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta dan tidak merusaknya. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Dimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 11 yaitu :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

“Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab:
"Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (Q.S Albaqarah
Ayat 11)

Pada Surat Al-Baqarah ayat 11. Allah memberitahukan tentang perilaku orang-orang munafiq, yakni bahwa bila salah seorang dari orang-orang beriman berkata kepada mereka : ‘janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, dengan berbuat kemunafikan, loyal terhadap orang-orang kafir serta upaya memisahkan manusia dari beriman kepada Al-Qur’an dan dari mengikuti teladan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang munafiq itu akan menjawab seraya beralih, ”Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan”, menurut pengakuan mereka.

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di berkata, “berbuat kerusakan” karena perbuatan tersebut menyebabkan rusaknya apa yang ada di muka bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan, pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga karena melakukan perbaikan di muka bumi adalah dengan memakmurkan bumi dengan ketaatan dan keimanan kepada Allah, yang untuk tujuan inilah Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di bumi, serta melimpahkan rezeki kepada mereka, agar mereka menjadikan (nikmat tersebut) sebagai penolong mereka untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka jika mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah (maksiat) berarti mereka telah mengusahakan (sesuatu yang menyebabkan) kerusakan dan kehancuran di muka bumi”

2.4 Indikator Sanitasi Permukiman

Menurut UN Water (2008) dalam Jovanni (2016) elemen sanitasi terdiri atas sanitasi dasar rumah tangga, manajemen limbah padat rumah tangga, drainase alir limbah rumah tangga dan air hujan serta pengelolaan limbah industri. Dimana masalah sanitasi lingkungan permukiman disebabkan oleh kondisi drainase, penyaluran limbah dan persampahan yang buruk.

2.4.1 Sampah

Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwasanya sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, sedangkan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013).

Sampah merupakan sesuatu benda yang dihasilkan dari berbagai benda yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi oleh manusia (Mohammad 2011). Dalam pengertian lain, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat (Suyoto 2008 dalam Riswan 2011). Agar tercipta sistem persampahan yang bagus diperlukan prasarana persampahan dan sistem pengelolaan yang memadai.

Prasarana persampahan meliputi tempat sampah, gerobak sampah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sistem pengelolaan persampahan meliputi pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan (Permen PU No. 2 Tahun 2016). Adapun kriteria kekumuhan berdasarkan (Permen PU No. 2 Tahun 2016) ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup sebagai berikut:

- a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 1. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 2. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala lingkungan;
 3. Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 4. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Pewadahan dan pemilahan domestik;
 2. Pengumpulan lingkungan;
 3. Pengangkutan lingkungan; dan
 4. Pengolahan lingkungan.

c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:

1. Pemeliharaan rutin; dan/atau
2. Pemeliharaan berkala

2.4.2 Air Limbah

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16 Tahun 2008 Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. Air limbah merupakan cairan buangan dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lain yang mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain serta mengganggu kelestarian lingkungan (Lorensius, dkk 2014 dalam Hasan 2018)

Selanjutnya limbah domestik adalah air bekas yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan semula baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktivitas dapur, kamar mandi, dan cuci, sedangkan limbah domestik digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu grey water dan black water. Grey water merupakan air bekas cucian dapur, mesin cuci, dan kamar mandi, dan Black water, merupakan tinja (faeces) yang berpotensi mengandung mikroba patogen

dan air seni, umumnya mengandung Nitrogen (N) dan Fosfor, serta mikroorganisme.

Menurut (Joy 2011 dalam Hasan 2018) terdapat 2 (dua) macam sistem pengelolaan limbah domestik/permukiman yaitu sistem pengelolaan air limbah setempat (*on-site system*) dan terpusat (*off site system*). Sistem pengelolaan air limbah setempat (*on-site system*), yaitu sistem dimana fasilitas pengelolaan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas sanitasi individual seperti septic tank. Sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off-site system*) atau sistem sewerage, yaitu sistem dimana fasilitas pengelolaan air limbah berada di luar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.

Adapun kriteria kekumuhan berdasarkan Permen PU No. 2 Tahun 2016 ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup sebagai berikut :

- a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:

1. Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; dan
2. Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

2.4.3 Drainase

Pada dasarnya drainase berasal dari bahasa Inggris yaitu *drainage* yang mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Drainase juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu (Nurhapni, 2015).

Adapun kriteria kekumuhan berdasarkan Permen PU No. 2 Tahun 2016 ditinjau dari drainase lingkungan mencakup sebagai berikut :

- a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan.

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

b. Ketidaktersediaan drainase

Ketidaktersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan

Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

d. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya

Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

1. Pemeliharaan rutin; dan/atau
2. Pemeliharaan berkala.

e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

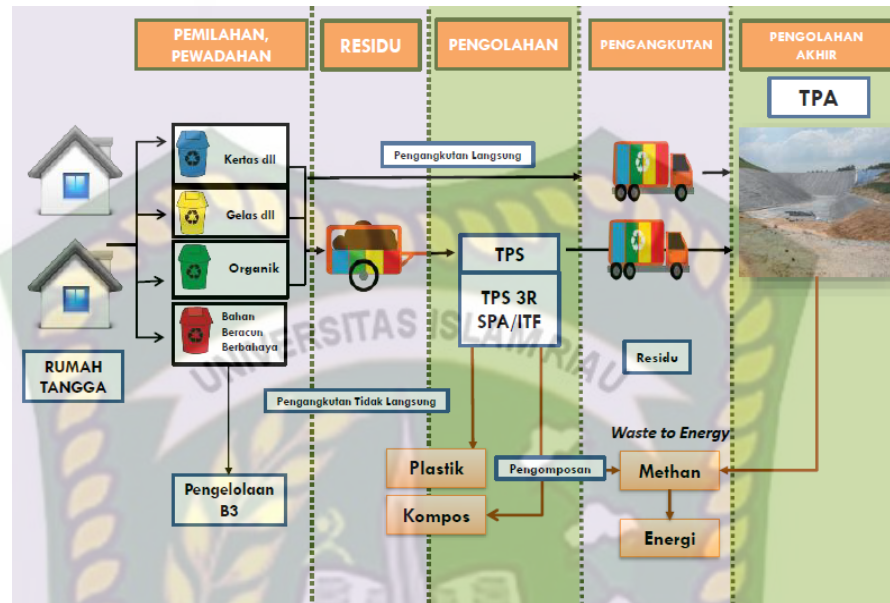
2.5 Konsep-Konsep Penanganan Sanitasi Permukiman

2.5.1 Konsep Penanganan Persampahan

Konsep Penanganan sampah yang meliputi pemisahan/sortasi, penyimpanan, dan pengolahan, merupakan tahap kedua dalam kegiatan pengelolaan karakteristik sampah. Karena tahap ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik sampah, kesehatan masyarakat, serta sikap masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah, maka sangat penting untuk memahami bagaimana sebaiknya kegiatan penanganan sampah dilakukan. Dalam hal ini konsep penanganan sampah tercantum dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
dan/atau

- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke medialingkungan secara aman.



Gambar 2.1 Konsep Pengelolaan Persampahan

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013

Adapun beberapa konsep penanganan sampah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21 Tahun 2006 yaitu:

1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya.

Strategi :

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan penanganan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga.
- b. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disentif dalam pelaksanaan 3R

- c. Mendorong koordinasi lintas sector terutama perindustrian dan perdagangan
2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha atau swasta sebagai mitra pengelolaan.

Strategi :

- a. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah.
 - b. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum.
 - c. Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah.
 - d. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - e. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha atau swasta.
3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas system pengelolaan

Strategi :

- a. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan.
- b. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan.
- c. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan.
- d. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan.
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill.
- f. Meningkatkan pengelolaan TPA Regional.
- g. Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.

4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan

Strategi :

- a. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola.
- b. Meningkatkan kinerja institusi pengelola sampah.
- c. Memisahkan fungsi atau unit regulator dan operator
- d. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.
- e. Meningkatkan kualitas SDM manusia.
- f. Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional.
- g. Meningkatkan kelengkapan produk hukum sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan.
- h. Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

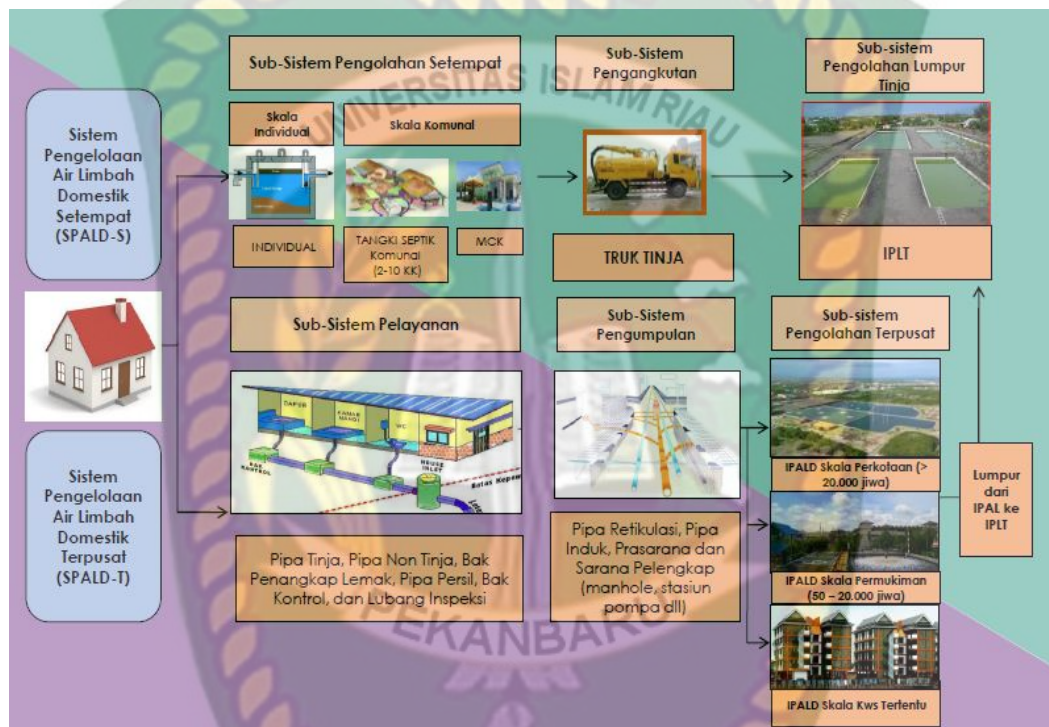
5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Strategi :

- a. Penyamaan persepsi para pengambil keputusan.
- b. Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan.

2.5.2 Konsep Penanganan Air Limbah

Konsep pengelolaan air limbah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 4 tahun 2017 yaitu terdapat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Berikut gambar 2.2 konsep pengelolaan air limbah.



Gambar 2.2 Konsep Pengelolaan Air Limbah

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 4 tahun 2017

Adapun konsep penanganan air limbah tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16 tahun 2008 yaitu :

1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun offsite di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat. Strategi dalam peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, antara lain :

- a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (onsite) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;
- b) Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (offsite) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat;
 - b. Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT);
 - c. Menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)/ CLTS (Community Lead Total Sanitation) di kawasan perdesaan;
 - d. Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional sewerage terpasang;
 - e. Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket;
 - f. Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di kota metro dan besar dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap
2. Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta, antara lain:

- a) Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
- b) Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
 - b. Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;
 - d. Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi dibidang pengelolaan air limbah permukiman;
 - e. Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan sistem air limbah permukiman;
 - f. Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak.
3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam Pengembangan Perangkat peraturan perundangan, antara lain :

- a) Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- b) Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- c) Menerapkan peraturan perundangan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a. Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;
- b. Mereview dan melengkapi NSPM dalam pengelolaan air limbah permukiman;
- c. Mereview Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan air limbah permukiman;
- d. Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- e. Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- f. Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- g. Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- h. Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman;

- i. Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan kawasan permukiman baru.
4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan kinerja institusi, antara lain:

- a) Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;
- b) Mendorong pembentukan dan penguatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;
- c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
- d) Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a. Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal;
- b. Memberikan pelatihan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;

- c. Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Dinas;
 - d. Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman;
 - e. Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola di bidang penyelenggaraan air limbah permukiman;
 - f. Memfasilitasi koordinasi antar lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah;
 - g. Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman;
 - h. Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses (best practices) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.
5. Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan kapasitas pembiayaan, antara lain :

- a) Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;
- b) Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- a. Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat;
- b. Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
- c. Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

2.5.2.1 Konsep Sanitasi Masyarakat (SANIMAS)

a. Pengertian SANIMAS

SANIMAS atau Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan. Dalam pembangunan fasilitas SANIMAS, digunakan konsep pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal, dengan tujuan agar fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Konsep tersebut menggunakan prinsip-prinsip pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis-masyarakat seperti: pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan, air merupakan benda social dan ekonomi, pembangunan berwawasan lingkungan, peran aktif masyarakat, serta penerapan prinsip pemulihan biaya.

b. Prinsip-prinsip Sanimas

A. Prinsip Dasar

1. Program Bersifat Tanggap Kebutuhan

Masyarakat yang layak mengikuti Sanimas akan bersaing mendapatkan program ini dengan cara menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai pilihan mereka.

2. Pengambilan Keputusan Sepenuhnya di Tangan Masyarakat

3. Peran LSM atau Swasta dan Pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator.

4. Masyarakat Menentukan

Masyarakat yang merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh LSM atau konsultan pendamping yang bergerak secara profesional dalam bidang teknologi pengolahan limbah maupun bidang sosial.

5. Pemerintah Daerah Memfasilitasi

Pemerintah Daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat.

B. Prinsip Penyelenggaraan

1. Dapat Diterima

Pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dan diterima masyarakat.

2. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparaturnya sehingga dapat diawasi dan dievaluasi semua pihak.

3. Dapat Dipertanggungjawabkan

Kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

4. Berkelanjutan

Pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat bagi pengguna secara berkelanjutan, yang ditandai dengan adanya manfaat bagi pengguna serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pengguna.

C. Pendekatan Sanimas

1. Keberpihakan pada warga berpenghasilan rendah

Orientasi kegiatan ditujukan kepada penduduk miskin yang bermukim di permukiman padat perkotaan berdasarkan kebutuhan.

2. Otonomi dan Desentralisasi

Masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pengelolaan hasil lainnya.

3. Mendorong prakarsa lokal dengan iklim keterbukaan

Masyarakat menyampaikan permasalahan dan merumuskan kebutuhan secara demokratis dan transparan.

4. Parisipatif

Masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pengelolaan hasil lainnya.

5. Keswadayaan

Kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses pengawasan maupun pemanfaatan hasil kegiatan.

2.5.2.2 Konsep Community Led Total Sanitation (CLTS) atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

a. Pengertian CLTS atau STBM

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan, strategi dan program untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Perilaku hygiene dan sanitasi yang dimaksud antara lain tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. Perilaku tersebut merupakan rangkaian kegiatan sanitasi total (Menkes, 2008 dan Ditjen PP dan PL, 2011).

b. Prinsip-prinsip CLTS atau STBM

Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dalam pelaksanaannya program ini mempunyai beberapa prinsip utama, yaitu :

1. Tidak adanya subsidi yang diberikan kepada masyarakat, tidak terkecuali untuk kelompok miskin untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar.
 2. Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengankemampuan dan kebutuhan masyarakat sasaran.
 3. Menciptakan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total.
 4. Masyarakat sebagai pemimpin dan seluruh masyarakat terlibat dalam analisa permasalahan, perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan dan pemeliharaan.
 5. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi(Permenkes RI No.03 tahun 2014).
- c. Pendekatan CLTS atau STBM
- Untuk memfasilitasi masyarakat dalam menganalisa kondisinya, ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam kegiatan STBM, seperti:
1. Pemetaan
Bertujuan untuk mengetahui / melihat peta wilayah BAB masyarakat serta sebagai alat monitoring (pasca triggering, setelah ada mobilisasi masyarakat).
 2. Transect Walk
Transect walk adalah kegiatan penelusuran wilayah yang bertujuan untuk melihat dan mengetahui lokasi yang paling sering dijadikan

tempat buang air besar. Transect walk bertujuan untuk melihat dan mengetahui tempat yang paling sering dijadikan tempat BAB. Dengan mengajak masyarakat berjalan dan berdiskusi di tempat tersebut, diharapkan masyarakat akan merasa jijik dan bagi orang yang biasa BAB di tempat tersebut diharapkan akan terpicu rasa malunya.

3. Alur Kontaminasi (Oral Fecal)

Bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk melihat bagaimana kotoran manusia dapat dimakan oleh manusia yang lainnya.

4. Simulasi air yang terkontaminasi

Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap air yang biasa mereka gunakan sehari-hari.

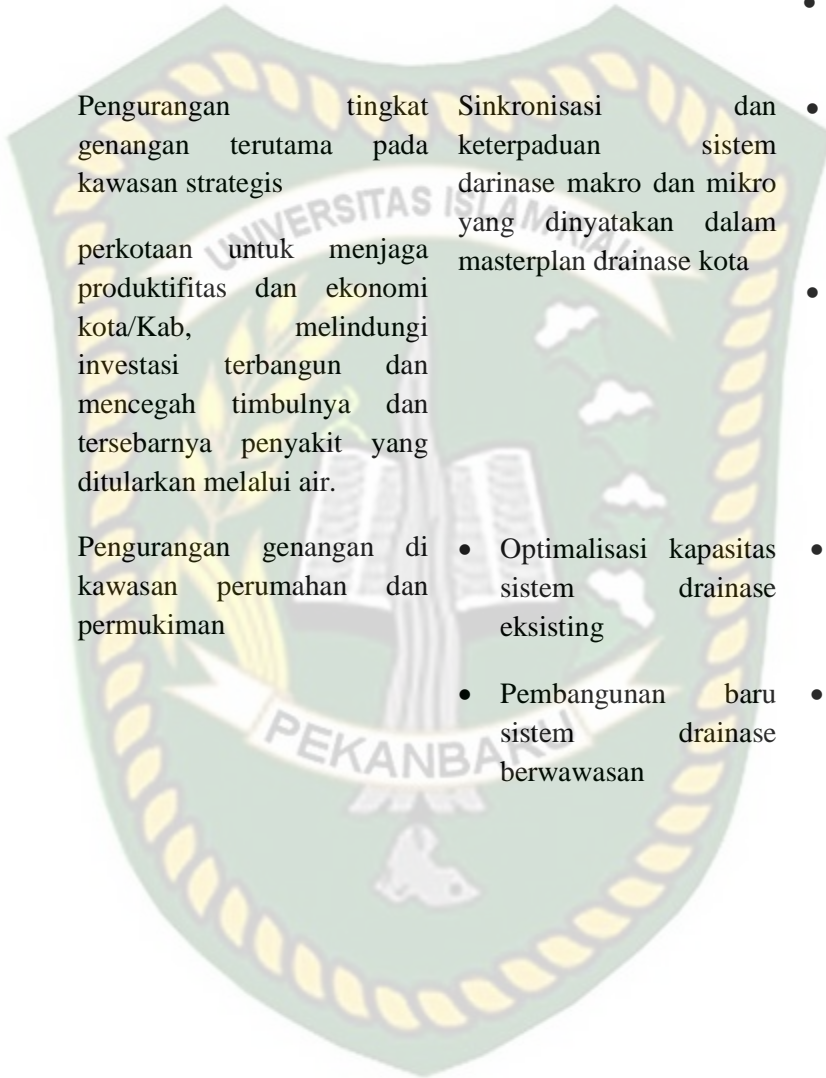
5. Diskusi Kelompok (FGD)

Bersama-sama dengan masyarakat melihat kondisi yang ada dan menganalisisnya sehingga diharapkan dengan sendirinya masyarakat dapat merumuskan apa yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan.

2.5.3 Konsep Penanganan Drainase Perkotaan

Konsep penanganan drainase perkotaan berwawasan lingkungan yaitu air limpasan ditampung, dan diresapkan terlebih dahulu kemudian kelebihan air dialirkan ke badan air penerima dengan memelihara kualitasnya. (Peraturan Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2014) berikut tabel 2.1 konsep penanganan drainase.

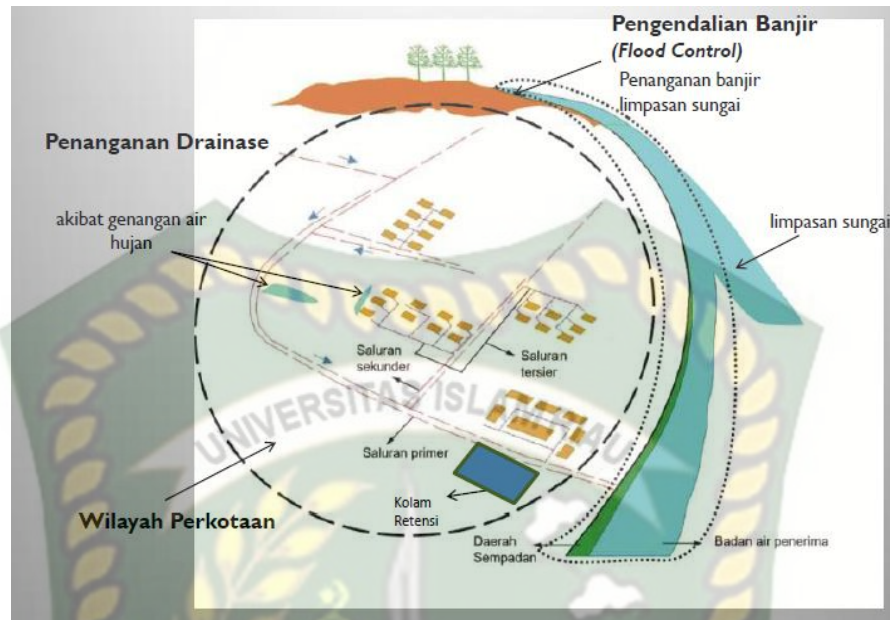
Area	Tujuan	Pendekatan	Ruang Lingkup Kegiatan	Keterpaduan Program
Regional	Keterpaduan dengan sistem pengendalian banjir	Penyesuaian Masterplan drainase kota dengan pola sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem polder dan pemompaan • Pintu-pintu air • Saluran interceptor/sodetan 	<ul style="list-style-type: none"> • Flood control • Konservasi air baku
Kota	Pengurangan tingkat genangan terutama pada kawasan strategis perkotaan untuk menjaga produktifitas dan ekonomi kota/Kab, melindungi investasi terbangun dan mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit yang ditularkan melalui air.	Sinkronisasi dan keterpaduan sistem drainase makro dan mikro yang dinyatakan dalam masterplan drainase kota	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulasi pembangunan/ peningkatan/rehabilitasi saluran primer, sekunder & tersier • Fasilitasi Pengembangan PS drainase perkotaan skala Kota/kab 	<ul style="list-style-type: none"> • PPSP (Program Percepatan Sanitasi Perkotaan) • SPPIP (Strategi Pembangunan Permukiman Infrastruktur Perkotaan)
Kawasan	Pengurangan genangan di kawasan perumahan dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kapasitas sistem drainase eksisting • Pembangunan baru sistem drainase berwawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulasi pembangunan/ peningkatan/rehabilitasi sistem drainase local • Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • RPKPP (Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas) • KAPET • GNPSR (Gerakan Nasional



Tabel 2.1 Konsep Penanganan Drainase

	lingkungan		Pembangunan Sejuta Rumah)
Lingkungan	<p>Pengurangan tingkat genangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pembangunan fisik saluran drainase berwawasan lingkungan • Pemeliharaan fungsi saluran drainase melalui peran aktif masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Stimulan pembangunan prasarana drainase lingkungan • Pelibatan peran aktif masyarakat dalam memelihara fungsi drainase 	<ul style="list-style-type: none"> • KIP • Revitalisasi Kawasan • Program Keciaptakaryaan berbasis masyarakat (Pamsimas, Sanimas, 3R, SLBM)
Tapak Bangunan	<p>Penyediaan PS bangunan yang layak huni dan sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drainase berwawasan lingkungan • Pemisahan saluran air hujan dan saluran air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi perencanaan tapak bangunan • Pembangunan drainase persil berwawasan lingkungan • Pembuatan sumur resapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan IMB • Konservasi Air Tanah • Sistem PAH (Panen Air Hujan)

Sumber : (Peraturan Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2014)



Gambar 2.3 Skema Sistem Drainase Perkotaan

Sumber : Peraturan Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2014

Adapun beberapa konsep penanganan sampah berdasarkan Peraturan Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2014 yaitu :

1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan Diarahkan Pada Pemantapan Keterpaduan Pengelolaan Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan

Strategi:

- a. Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem yang komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek

rencana tata ruang kota, rencana pengelolaan sumber daya air, perubahan iklim global, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi serta kearifan lokal.

- b. Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan drainase berwawasan lingkungan dengan memperhatikan konservasi sumber daya air.
- c. Mewujudkan keterpaduan pengelolaan drainase pengelolaan prasarana drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan lainnya.

2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan Diutamakan Pada Optimalisasi Fungsi Prasarana Dan Sarana Drainase Yang Sudah Terbangun
Strategi :

- a. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase dan memprioritaskan optimalisasi sistem terbangun.
- b. Mengurangi /membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem drainase.

3. Dilakukan Pengembangan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Drainase Perkotaan
Strategi :

- a. Penyusunan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan drainase.
- b. Sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan perundang-undangan pengelolaan drainase perkotaan.
- c. Penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan drainase.

4. Dilakukan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Drainase

Strategi :

- a. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah.
- b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase perkotaan di daerah.
- d. Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase perkotaan.

5. Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan Diikuti Dengan Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Drainase Perkotaan

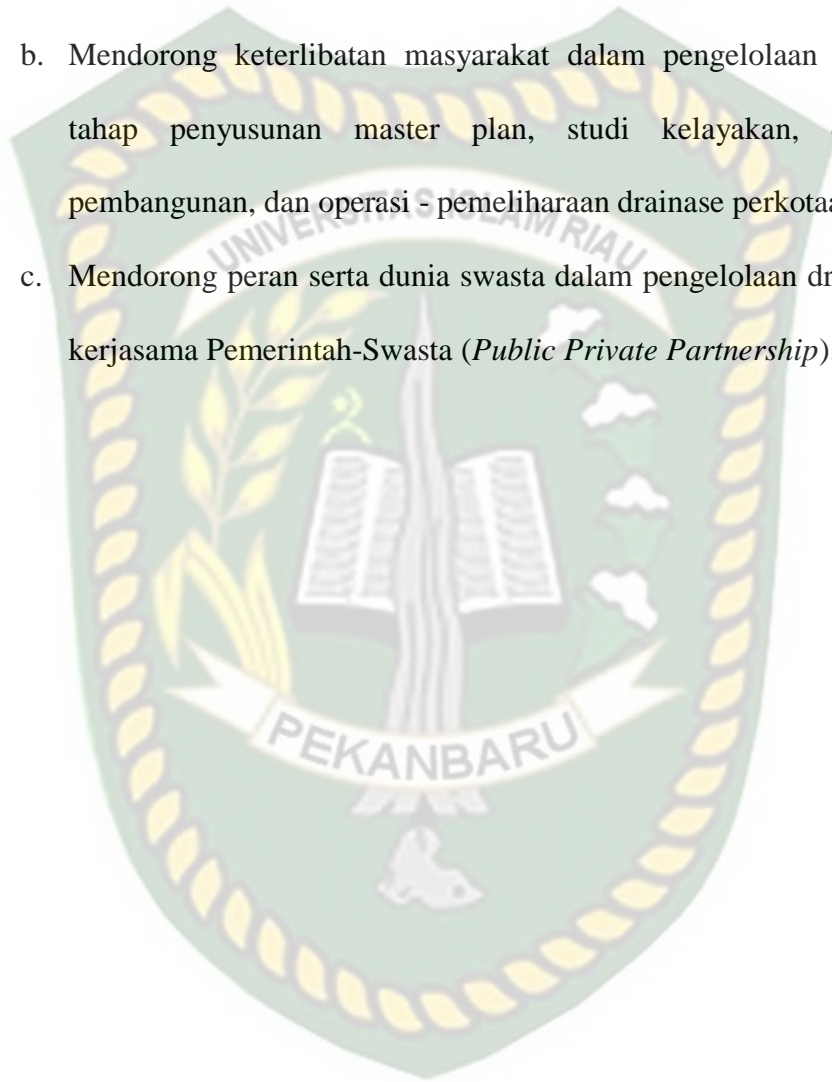
Strategi :

- a. Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam pengelolaan drainase perkotaan.
- b. Penetapan kebijakan satuan standar biaya pengelolaan teknis drainase perkotaan.

6. Perlu Dilakukan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha / Swasta Dalam Pengelolaan Drainase Perkotaan

Strategi :

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan drainase.
- b. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase pada tahap penyusunan master plan, studi kelayakan, detail disain, pembangunan, dan operasi - pemeliharaan drainase perkotaan.
- c. Mendorong peran serta dunia swasta dalam pengelolaan drainase melalui kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public Private Partnership*).



2.6 Tinjauan Kebijakan

Tabel 2.2 Tinjauan Kebijakan

No	Jenis Kebijakan	Keterangan
1	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan	Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan nonteknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
2	Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
3	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

No	Jenis Kebijakan	Keterangan
	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
4	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16 Tahun 2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, yang selanjutnya disingkat KSNP-SPALP adalah arah dan langkah-langkah dalam pengembangan sistem air limbah permukiman dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman melalui perencanaan, pemrograman, pembiayaan, dan pelaksanaan secara terpadu, efektif, dan efisien. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman. KSNP-SPALP ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan dalam

No	Jenis Kebijakan	Keterangan
		penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat. Ruang Lingkup KSNP-SPALP meliputi uraian tentang visi dan misi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman; isu strategis, permasalahan dan tantangan, pengembangan sistem air limbah permukiman, tujuan/sasaran; serta kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman dengan rencana tindak yang diperlukan.
5	Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempatdilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

No	Jenis Kebijakan	Keterangan
6	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan	Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

Sumber : Hasil Analisis 2019

2.7 Sintesa Teori

Dari teori-teori yang dijelaskan diatas akan dirangkum dalam satu tabel sebagai kemudahan pengambilan kesimpulan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 2.3 Sintesa Teori

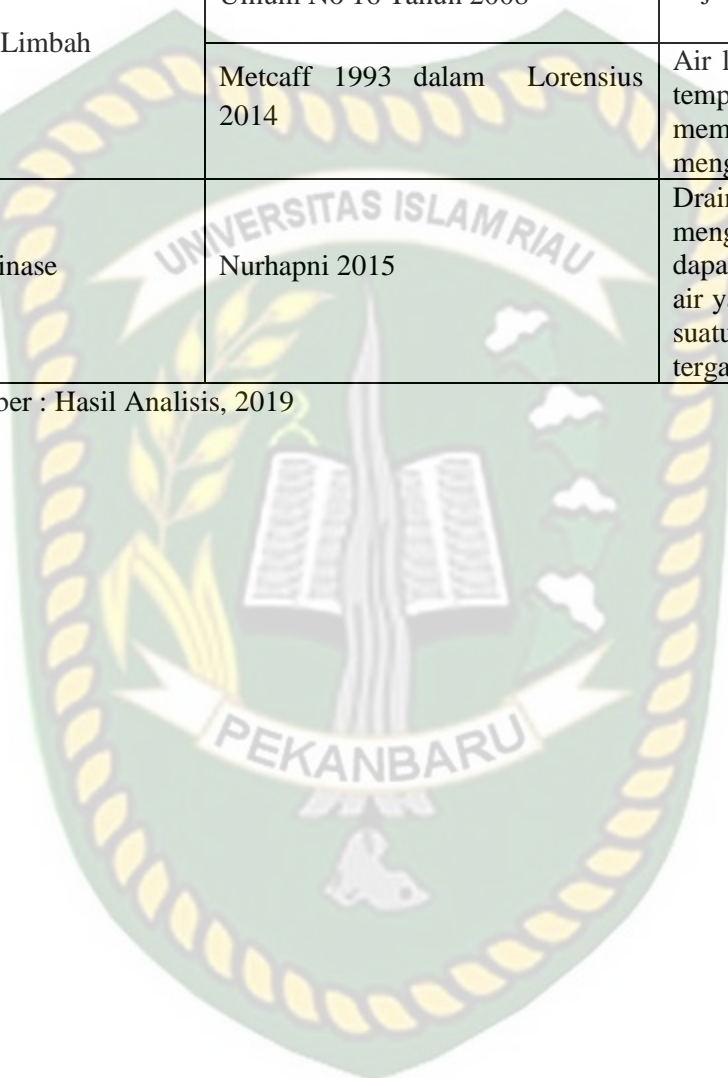
No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
1	Permukiman	Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman	- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan-kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.
		Niracanti2001	- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan.
2	Perumahan	Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman	- Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3	Permukiman Kumuh	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016	- Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
		Undang–Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat dan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
4	Indikator Permukiman Kumuh	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung ini mencakup kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Ketidakaturan bangunan b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang c) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung 2) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk 3) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Ketidaktersediaan akses aman air minum b) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku 4) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan b) Ketidaktersediaan drainase c) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan d) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya

No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
			<p>e) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk</p> <p>5) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup sebagai berikut:</p> <p>a) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku</p> <p>b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis</p> <p>6) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup sebagai berikut:</p> <p>a) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis</p> <p>b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis</p> <p>c) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan</p> <p>7) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan sebagai berikut:</p> <p>a) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran</p> <p>b) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran</p>
5	Sanitasi	Brikke dan Bredero 2003 dalam Hasan 2018	Sanitasi merupakan suatu usaha pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia, dan biologi dalam lingkungan hidup manusia, yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia.
6	Indikator Sanitasi Permukiman	Menurut UN Water (2008) dalam Jovanni (2016)	Elemen sanitasi terdiri atas sanitasi dasar rumah tangga, manajemen limbah padat rumah tangga, drainase alir limbah rumah tangga dan air hujan serta pengelolaan limbah industri. Dimana masalah sanitasi lingkungan permukiman disebabkan oleh kondisi drainase, penyaluran limbah dan persampahan yang buruk.

No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
7	Sampah	Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8	Air Limbah	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16 Tahun 2008	Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman
		Metcaff 1993 dalam Lorensius 2014	Air limbah merupakan cairan buangan darirumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lain yang mengandung bahan-bahan yangdapat membahayakan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain serta mengganggu kelestarian lingkungan
9	Drainase	Nurhapni 2015	Drainase berasal dari bahasa Inggris yaitu <i>drainage</i> yang mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Drainase juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan atau lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tidak terganggu

Sumber : Hasil Analisis, 2019



2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan penanganan sanitasi di kawasan permukiman kumuh telah dilakukan oleh beberapa peneliti di masing-masing daerah yang berbeda. Adapun judul penelitian, sasaran, metode, hasil pembahasan serta nama peneliti terkait penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.4 penelitian terdahulu.





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1	Naris Dyah Prasetyawati , Evi Gravitiani, Sunarto, Sigid Sudaryanto. 2015. Jurnal Ekosains	Analisis Kondisi Sanitasi Permukiman Di Kota Yogyakarta Tahun 2015	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sanitasi permukiman di Kota Yogyakarta	Variabel kondisi sanitasi rumah yang terdiri dari komponen rumah, sarana sanitasi, perilaku dan keberadaan vektor, Sementara, data	Jenis penelitian ini adalah observasional. Sampel diambil dengan menggunakan tehnik <i>multi-stage random sampling</i> dengan jumlah sampel sebanyak 597 kepala keluarga di kota yogyakarta	Hasil penelitian pada penilaian sanitasi rumah, prosentase rumah sehat sebesar 30,49% dan rumah kurang sehat 69,51%.
2	Hasan ST. Tugas Akhir.2018 Institut Teknologi Nasional Malang	Konsep Penanganan Sanitasi Permukiman Kumuh Di Kecamatan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep penanganan sanitasi di	Variabel penelitian sanitasi permukiman meliputi tingkat permasalahan persampahan, air limbah, dan drainase,	Metode analisa data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif,	Hasil analisa, ketersediaan prasarana sanitasi di lokasi penelitian masih kurang untuk prasarana persampahan yakni tempat sampah, sedangkan untuk prasarana

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
		Lowokwaru, Kota Malang	Lokasi tersebut	dan konsep penanganan sanitasi.	metode skoring, dan metode kluster.	limbah dan drainase sudah Mencukupi. Untuk konsep penanganan, terdapat 3 macam konsep yang diterapkan di lokasi Penelitian yaitu percontohan, partisipatori, dan bantuan.
3	Hermin Poedjiastoeti, Mila Karmilah. 2008. Jurnal Pondasi	Karakteristik Kondisi Sanitasi Lingkungan Di Kawasan Pemukiman Nelayan Bandengan Kabupaten Kendal	Tujuan dari penelitian ini adalah menemu kenali kondisi eksisting terkait dengan kondisi dan pelayanan sanitasi dan bentuk peranserta masyarakat dalam peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.	1. Kondisi sanitasi lingkungan 2. Peran masyarakat	Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis triangulasi, analisis deskriptif terutama untuk analisis data dari hasil wawancara mendalam (indepth interview) dan hasil kelompok diskusi terfokus	Kondisi sanitasi lingkungan di permukiman nelayan (rw iv) kelurahan bandengan dilihat dari pemenuhan terhadap sarana sanitasi dasar tergolong masih buruk. Dan peran masyarakat dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan masih sangat minim sekali dan tidak dapat berkembang secara optimal.

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
					(FGD), analisis kelembagaan dan stakeholder.	
4	Johanis K. Silangen ¹ , Fela Warouw ² , & Faizah Mastutie. 2017 Jurnal Pwk	Pengembangan Sanitasi Berkelanjutan Di Kawasan Permukiman Kumuh Studi Kasus (Kecamatan Tumpaan)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah pengembangan yang tepat untuk membantu memperbaiki kualitas permukiman yang ada	Variabel penelitian 1. Kondisi existing sanitasi di kawasan permukiman kumuh 2. Pengembangan sanitasi berkelanjutan pada kawasan permukiman kumuh.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan analisis overlay eliminasi	Hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa kondisi eksisting sanitasi pada daerah penelitian belum memadai. Dan konsep yang bisa dikembangkan dan diterapkan di kawasan permukiman kumuh yang ada ialah konsep sanimas (sanitasi masyarakat) yaitu pembuatan tangki septik bersekat dan bangunan TPS3R di tiap-tiap kelurahan di kawasan permukiman kumuh dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan sampai dalam pengelolaannya.
5	Meine Pieter Van Dijk A, S. Etajak	(Pembiayaan sanitasi dan penelitian	(Tujuan dari penelitian ini	1. Sumber daya yang	- Kualitatif (wawancara	(Hasil penelitian bahwa Toilet pribadi masih

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
	B, B. Mwalwega C, John Sempebwa. 2014. Journal Habitat International	pemulihan biaya di permukiman kumuh di Dar Es Salaam dan Kampala)	adalah untuk menyelidiki keuangan mekanisme yang digunakan untuk menyediakan dan mengoperasikan fasilitas pembuangan kotoran di daerah kumuh di Kampala dan Dar Es Salaam untuk datang pendekatan pembiayaan berkelanjutan).	memadai untuk sanitasi 2. Tarif rendah atau tidak ada untuk menggunakan fasilitas sanitasi 3. Kurangnya keberlanjutan finansial dari solusi sanitasi yang ada.	pemangku kepentingan) dan kuantitatif (rumah tangga) - Survei (metode pengumpulan data digunakan)	menyediakan 85% solusi sanitasi untuk rumah tangga di daerah kumuh di Dar es salaam dan kampala. Perbedaan dibuat antara rumah tangga dan toilet bersama. Skala kecil pengusaha, organisasi berbasis masyarakat (cbos) dan organisasi non pemerintah (ngos). Membangun pemeliharaan dan kadang-kadang kosong biasanya berbagi fasilitas sanitasi dalam situasi di mana pemerintah. Tidak mampu menyediakan layanan sanitasi. Solusi tingkat rumah tangga dan sektor swasta. Umum dalam sanitasi dan dapat didorong. Adapun mekanisme pembayaran di daerah kumuh di ibukota Jakarta.

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
						Tanzania dan uganda, mekanisme saat ini untuk membiayai fasilitas sanitasi dan memulihkan biaya. Dengan menggunakan struktur tata kelola yang berbeda dianalisis).
6	Sheela S. Sinharoy, Rachel Pittluck, Thomas Clasen. 2019. Utilities Journal Policy	(Riview perangkat dan hambatan kebijakan air dan sanitasi untuk perkotaan Pemukiman informal di negara berpenghasilan rendah dan menengah)	- Mengatasi marginalisasi dan disparitas dalam akses ke layanan akan menjadi pertimbangan penting untuk memenuhi SDGs. - Mengatasi kebutuhan air dan sanitasi masyarakat yang tinggal di perkotaan informal	(Studi ini menguji driver dan hambatan air, sanitasi, dan kebijakan kebersihan (pencucian) di perkotaan informal permukiman di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah).	Data kuantitatif , sumber literatur, analisis, kebijakan.	(Hasil riview perangkat dan hambatan: Ekonomi, spasial, sosial, kelembagaan, politik, dan informasi. Penggerak utama termasuk prioritas donor dan tindakan kolektif, sementara hambatan utama termasuk pengucilan sosial, kurangnya tanah atau kepemilikan rumah. Status, ekonomi politik dari pengambilan keputusan, dan data yang tidak mencukupi. Memastikan air dan sanitasi responsif. Kebijakan untuk permukiman informal akan membutuhkan kolaborasi antar-disiplin dan pendekatan

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
						top-down dan bottom-up.
7	Puji Astuti, Febby Asteriani, Fero Al Rasyid, Mailendra. 2014 Jurnal Poverty Eradication	Kajian Wilayah Kumuh di Desa Babussalam, Kota Duri, Provinsi Riau	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi permukiman kumuh di Kota Duri (studi kasus Desa Babussalam) dan memberikan bentuk solusi alternatif untuk meningkatkan fungsi dan kualitas permukiman.	- Karakteristik masyarakat dan hunian permukiman kumuh - Faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh - Strategi penanganan daerah kumuh di Desa Babussalam	Metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan kumuh berada di sekitar pusat Kota Duri dalam kondisi rumah cukup baik dan sebagian kecil berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha, kondisi pengelolaan limbah padat yang tidak memadai, dan interaksi sosial yang terjadi di komunitasnya juga sangat beragam. Permukiman di Desa Babussalam memiliki 2 jenis permukiman kumuh: permukiman di dekat pusat kegiatan sosial ekonomi dan permukiman kumuh di pusat kota. Strategi yang disarankan adalah, peningkatan infrastruktur dasar, konsolidasi lahan, dan penyediaan perumahan sederhana.
8	Irvan Mastin,	Identifikasi Permasalahan	Mengidentifikasi permasalahan	- k	Karakteristik permukiman	Metode analisis deskriptif, Hasil penelitian ini yaitu Karakteristik penghuni

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
	Tugas Akhir 2019. Universitas Islam Riau	Permukiman Kumuh Di Kawasan Dabo Lama Kabupaten Lingga	permukiman kumuh di kawasan Dabo Lama Kabupaten Lingga.	kumuh di kawasan Dabo Lama Kabupaten Lingga - Permasalahan permukiman kumuh di kawasan Dabo Lama Kabupaten Lingga	kuantitatif, dan kualitatif	kawasan Dabo Lama hanya penduduk asli yaitu suku melayu dan para pekerja timah setelah berkembang Dabo Lama memiliki beragam sehingga tidak hanya penduduk pribumi bahkan seperti suku batak, minang, tionghoa dan suku lainnya. Dilihat dari hunian sekitar 46,51% semi permanen, 32,55% tak permanen didominasi oleh bangunan yang masih kurang layak huni dan status kepemilikan tanah yang memiliki hak milik sekitar 77,90%. Dan sarana prasarana kondisinya hampir sama yakni sebagian besar masih belum memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang berkualitas baik. Permasalahan yang mempengaruhi dilihat dari, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di permukiman kumuh berada



No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
9	Novriadi. akhir. Universitas Riau	Tugas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Melalui Konsep Peremajaan (Studi Kasus : Kelurahan Merum	- Mengetahui tingkat kekumuhan dalam kelurahan meranti pandak - Mengetahui kondisi sosial ekonomi dalam kelurahan meranti pandak	a. Mengidentifikasi tingkat permukiman kumuh di kelurahan meranti pandak b. Menganalisis kondisi masyarakat dari kondisi sosial dan ekonomi pada permukiman kumuh di kelurahan meranti pandak	Metode deskriptif kuantitatif	di garis kemiskinan, kondisi fisik bangunan tempat tinggal pada suatu permukiman merupakan suatu cerminan dari kondisi permukiman dan lingkungan sekitarnya, dan sarana dan prasarana di kawasan Dabo Lama masih belum memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang berkualitas baik Hasil penelitian ini yaitu bahwa kondisi prasarana permukiman pada kelurahan meranti pandak masih belum memadai. Kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh di wilayah kelurahan meranti pandak mayoritas masyarakatnya berpenghasilan rendah yang mana memiliki pekerjaan yang tidak tetap.

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
		Meranti Pandak)	uskan penanganan kawasan permukiman kumuh di kelurahan meranti pandak melalui konsep peremajaan ditinjau dari komponen prasarana permukiman dan fisik bangunan tempat tinggal	c. Memberikan rumusan penanganan permukiman kumuh di kelurahan meranti pandak melalui konsep peremajaan		Sehingga rumusan konsep peremajaan permukiman kumuh pada kelurahan meranti pandak yakni, rehabilitasi, resettlement, konservasi, kegiatan yang dilaksanakan adalah : memasukan rumah sederhana hunian (rsh), perbaikan prasarana permukiman dalam wilayah kelurahan meranti pandak, penyediaan air bersih, penyediaan tempat pembuang sementara persampahan.
10	Cihe Aprilia Bintang, ST, MT. jurnal saintis 2014	Analisa Strategi Penataan Permukiman dan Infrastruktur di Kabupaten Pelalawan	Merumuskan permasalahan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan dan strategi penanganannya.	a. Identifikasi Permasalahan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan b. Melakukan Analisa kebutuhan	Metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil analisa dibutuhkan strategi pengembangan secara fisik melalui beberapa hal antara lain : Mendorong pengembangan kompleks perumahan

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
				penanganan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan		terencana
				c. Strategi penataan permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan		disetiap kawasan perkotaan di Kabupaten Pelalawan, Mengembangkan perumahan sederhana untuk MBR, Menata kembali lahan permukiman dalam rangka penyediaan lahan perumahan dan fasilitas umum dll. Kemudian strategi sosial ekonomi membutuhkan beberapa hal antara lain : pengembangan pola Pemberdayaan masyarakat sehingga mengembangkan kerjasama kelembagaan antar organisasi, instansi dan dinas dalam struktur pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam



No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
						<p>rangka membangun</p> <p>koordinasi dan konsolidasi khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan.</p>

Sumber : Hasil Analisis, 2019



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan suatu penelitian, dimana metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah, Sugiyono (2017). Metode penelitian menjadi suatu sistem penelitian yang terdiri dari beberapa aspek seperti teknik penelitian, tahapan penelitian, kebutuhan data penelitian, pendekatan penelitian, dan teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

3.1 Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deduktif. Penelitian ini digolongkan dalam pendekatan deduktif karena peneliti mengkaji permasalahan yang umum berdasarkan pengujian suatu teori yang terdiri dari variabel-variabel, untuk menentukan apakah pengaruh antar variabel-variabel dalam merumuskan strategi penanganan sanitasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (*mixedbresearch methods*) yaitu suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif (Cresswel, 2013).

Metode kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat permasalahan sanitasi di kawasan permukiman kumuh yang ada saat ini. Sementara metode kualitatif berguna untuk mendukung metode kuantitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sanitasi permukiman kumuh berdasarkan data-data hasil kegiatan observasi lapangan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi penelitian

Penelitian ini berada di Desa Sawah, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

b) Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2019 sampai dengan bulan Maret 2019. Untuk lebih jelas tercantum dalam tabel 3.1 jadwal waktu penelitian.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data yaitu :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Adapun sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan Sugiyono (2017). Jenis data yang dimaksud meliputi :

- Observasi (pengamatan langsung) dilakukan yaitu mengidentifikasi karakteristik sanitasi di kawasan permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah melalui indikator sanitasi permukiman kumuh yang terdiri dari : Drainase lingkungan, Pengelolaan air limbah, dan Pengelolaan persampahan.
- Kuesioner dilakukan untuk mengetahui karakteristik sanitasi permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah khususnya di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan (Sugiyono (2017). Berikut tabel 3.1 sumber dan jenis data sekunder.

Tabel 3.1 Sumber dan Jenis Data Sekunder

No	Instansi	Jenis Data
1	BAPPEDA Kabupaten Kuantan Singingi	- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuantan Singingi - RPJPD Kabupaten Kuantan Singingi - RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi
2	Dinas Lingkungan Hidup	- Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi - Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Kuantan Singingi
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi	- SK Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Kuantan Singingi - Profil Permukiman Kumuh Kabupaten Kuantan Singingi
4	Kantor Kecamatan Kuantan Tengah	Demografi Kecamatan Kuantan Tengah
5	Kantor Desa Koto Taluk	Demografi Desa Koto Taluk
6	Kantor Desa Sawah	Demografi Desa Sawah

Sumber : Hasil Analisis, 2019

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan suatu teknik pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Metode Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ditujukan untuk melengkapi data primer dan mendukung kebutuhan analisis. Bentuk pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mendatangi instansi-instansi terkait seperti BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Camat, Kantor Desa dan instansi lainnya yang memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2) Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam proses pengumpulan data primer yang dilakukan yaitu pengambilan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan cara mengamati objek-objek pengamatan. Bentuk pengumpulan data primer yang dilakukan yaitu:

a) Observasi lapangan

Observasi yaitu proses pada wilayah studi dilakukan untuk melihat kondisi atau fenomena yang terjadi di permukiman kumuh melalui melalui indikator sanitasi permukiman kumuh yang terdiri dari :

- d) Drainase lingkungan (ketersediaan drainase, pemeliharaan drainase dan kualitas drainase)
- e) Pengelolaan air limbah (prasarana air limbah dan pengelolaan air limbah)
- f) Pengelolaan persampahan (prasarana persampahan, pengelolaan persampahan, dan pemeliharaan persampahan)

Proses observasi dilengkapi dengan alat bantu berupa perekam visual seperti *camera digital*, *tape recorder*, dan buku catatan yang dapat mendokumentasikan seluruh data yang dibutuhkan. Adapun tahapan yang

dilakukan dalam proses observasi yaitu dalam mengetahui kondisi karakteristik sanitasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.

b) Kuesioner

Berdasarkan Sugiyono (2017) bahwasannya kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode kuesioner yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada responden yang berada pada kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah khususnya masyarakat di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah.

c) Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber dokumenter berupa literatur/referensi, laporan penelitian serupa, bahan seminar atau jurnal.

d) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat peristiwa-peristiwa seperti, berbentuk tulisan, foto-foto, atau karya-karya dari seseorang.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.5.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2017).

Populasi bukan hanya dari orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek tersebut berada satu wilayah berkaitan dengan masalah penelitian.

Maka populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga (KK) di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah.

3.5.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan sejumlah individu yang dipilih dari populasi dan dapat mewakili populasi. Sehingga sampel terdiri dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi yang diteliti sangat besar dan tidak memungkinkan semua individu/objek pada populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Dalam kata lain sampel merupakan bagian dari elemen populasi yang dapat menggambarkan keadaan atau karakteristik populasi atau sampel merupakan unsur-unsur yang dapat mewakili populasi tersebut.

3.5.3 Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik sampling merupakan teknik untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terutama mengenai tingkat permasalahan sanitasi di kawasan permukiman kumuh akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk disampaikan kepada responden yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah.

Dalam teknik sampling menurut (Sugiyono 2017) dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Non probability Sampling*. Dalam menentukan teknik sampling, diperlukan untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam studi ini. Dimana sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan teknik sampelnya adalah *Probability Sampling* yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam studi ini, teknik sampling yang dipilih adalah *Simple Random Sampling*, yaitu dengan mengambil dari semua anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi tersebut.

Penentuan jumlah sampel dari penelitian ini didasarkan atas pertimbangan:

1. Kecermatan/ ketelitian dari penelitian yang dikehendaki dari penelitian
2. Rencana analisis
3. Besarnya biaya, tenaga, dan waktu penelitian yang tersedia

Menentukan jumlah sampel, untuk pemilihan *Simple Random Sampling* dalam studi ini yang diambil adalah Kepala Keluarga (KK). Untuk menetapkan jumlah sampel populasi yang dipakai dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumusan sebagai berikut (Slovin, 1960) dalam (Sugiyono, 2017):

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2} \text{ Untuk Reliability Sebesar 95\%}$$

Sumber: Sugiyono, 2017

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran poulasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Nilai e diambil dari 5% dengan pertimbangan karena adanya keterbatasan waktu serta biaya dalam penelitian ini. Tingkat ketelitian/ kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia (Sugiyono, 2017). Berikut tabel 3.2 tentang jumlah penduduk di Kecamatan Kuantan Tengah tahun 2018.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk di Lokasi Penelitian Tahun 2018

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Rata-rata Jiwa/KK
1	Koto Taluk	6016	1472	4
2	Sawah	2563	615	4
Total		8579	2087	8

Sumber: Kecamatan Kuantan Tengah dalam angka tahun 2018

Ukuran populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepala keluarga (KK). Jumlah kepala keluarga yang tinggal di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah sebanyak **2087 KK**. Sehingga jumlah sampel yang akan diteliti sesuai rumus di atas adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Sumber: Sugiyono, 2017

$$n = \frac{2.087}{1 + 2.087 \cdot (0,05)^2} = 335,66 = 336 \text{ KK}$$

Adapun keterangan mengenai jumlah KK yang ada di setiap kecamatan yang ada di lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

a. Desa Koto Taluk

$$n = \frac{1.472}{2.087} \times 336 = 236,9 = 237 \text{ KK}$$

b. Desa Sawah

$$n = \frac{615}{2.087} \times 336 = 99,01 = 99 \text{ KK}$$

Tabel 3.3
Jumlah Responden di Lokasi Penelitian Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Responden (KK)
1	Koto Taluk	6016	1472	237
2	Sawah	2563	615	99
Total		8579	2087	336

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.6 Tahapan Penelitian

3.6.1 Pra Lapangan

Tahapan penelitian pra lapangan ini ialah tahapan yang dilakukan sebelum turun langsung kelapangan. Dalam tahapan pra lapangan ada beberapa yang harus di persiapkan yaitu:

a) Persiapan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam melakukan pengerjaan laporan penelitian maka ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan demi menyempurnakan pengerjaan dan menyempurnakan data yang akan diperoleh agar menjadi lebih akurat dan valid. Beberapa tahapan atau persiapan awal yang dilakukan diantaranya adalah :

1. Pencarian data awal

Data awal yang dibutuhkan merupakan data yang didapatkan dari dinas permukiman kumuh, sebagai data referensi pertama dalam pengerjaan tugas sehingga dengan data awal ini akan lebih mempermudah dan memperjelaskan lagi segala kekurangan yang ada pada data awal ini yang selanjutnya akan dilengkapi dengan pencarian data langsung atau survei ke lokasi studi kasus yang telah ditentukan.

2. Ceklis data

Mengkonsep rencana atau program yang akan dilaksanakan pada kegiatan survei penelitian terhadap penanganan sanitasi kawasan permukiman kumuh dengan membuat ceklis data. Adapun tujuan lokasi studinya adalah di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Pengurusan surat izin survei

Maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada tahapan pertama diatas, survey ke lokasi studi kasus menjadi bagian yang harus dilakukan untuk penyempurnaan data. Kemudian melakukan pengurusan surat izin survei untuk izin pencarian data di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, surat izin survei ini ditujukan kebeberapa instansi terkait yang digunakan untuk pengambilan beberapa data yang dibutuhkan dari instansi tersebut seperti BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Camat, Kantor Desa dan instansi lainnya.

b) Pembuatan Form Kuesioner

Pembuatan form keusioner ini merupakan pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan data yang ingin dicari yang diajukan pada rumah tangga yang berada di kawasan permukiman kumuh tepatnya di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah guna untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan akurat dan mempermudah dalam proses pengerjaan laporan tugas akhir ini.

c) Studi Pustaka Atau Literatur

Studi pustaka atau literatur merupakan bagian dalam penelitian yang menunjang kelancaran penelitian berupa dokumen penunjang berupa buku-buku, jurnal, publikasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian. Studi literatur yaitu merupakan pengambilan data-data pendukung pengerjaan awal sebelum melakukan survei atau observasi di lapangan secara langsung, data-data studi literatur merupakan data yang berisi tentang penanganan sanitasi permukiman kumuh, dengan tujuan pendalaman awal dan data tersebut didapat kan dari literatur-literatur yang telah ada, seperti buku-buku maupun pencarian

di web-web terkait. Tujuan dari pencarian data literatur ini adalah guna untuk pendalaman awal studi kasus dan dan meletakkan dasar yang kuat dalam melakukan kajian permasalahan.

3.6.2 Lapangan

Tahapan penelitian lapangan ini ialah, tahapan yang dilakukan turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap kondisi dilapangan, setelah pra lapangan selesai dibuat, dalam tahapan penelitian lapangan ini ada beberapa yang harus dilakukan dilapang yaitu:

- a. Pengajuan permohonan data yang di perlukan dalam penelitian.
- b. Cek kondisi karakteristik sanitasi permukiman kumuh.
- c. Observasi.
- d. Dokumentasi lapangan.
- e. Penyebaran Form Koesioner.

3.6.3 Pasca Lapangan

Tahapan penelitian pasca lapangan ini ialah, tahapan yang dilakukan untuk mengolah data yang di dapat setelah turun kelapangan langsung, dalam tahap penelitian pasca lapangan yang harus dilakukan yaitu:

1. Pengumpulan semua data yang didapat.

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengerjaan yang dapat membantu penyelesaian laporan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan maksud agar memperoleh input data yang selanjutnya akan digunakan dalam proses analisis. Proses pengumpulan data ini merupakan proses pengumpulan beberapa data yang didapatkan dengan beberapa cara diantaranya:

a) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara. Pencarian data primer ini dilakukan dengan beberapa teknik-teknik tertentu diantaranya sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi merupakan bagian dari kegiatan survei secara langsung di lapangan dan melihat secara langsung bagaimana kondisi karakteristik sanitasi permukiman kumuh..

b) Kuesioner merupakan proses penyebaran form kuesioner kepada masyarakat Desa Koto Taluk dan Desa Sawah khususnya tiap rumah tangga (KK).

b) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, merupakan kebalikan dari data primer yang didapatkan secara langsung, data sekunder didapatkan melalui media perantara atau melalui instansi-instansi terkait yang memungkinkan

memiliki data-data yang dicari seperti BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Camat, Kantor Desa dan instansi lainnya,

2. Analisis

Setelah data-data yang dibutuhkan diperoleh, tahapan selanjutnya adalah proses analisa data tersebut. Analisa tersebut dilakukan mengacu pada teori yang didapat dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Yaitu menentukan jawaban atas rumusan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasil dari proses analisis. Dalam proses penarikan kesimpulan ini, diharapkan dapat tercapai tujuan akhir penelitian.

3.7 Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan pada proses pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai pengungkapan karakteristik dan kecenderungan variabel yang akan diteliti. Adapun jenis analisa yang akan digunakan, meliputi analisis kualitatif dan kuantitatif berupa penelaahan secara deskriptif terhadap objek penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah :

3.7.1 Mengidentifikasi Karakteristik Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah

Dalam teknik analisis ini menggunakan analisis deskriptif yaitu:

A. Analisis Deskriptif-Kualitatif

Metode penelitian deskriptif-kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan menjelaskan keadaan yang ada di objek penelitian berdasarkan faktor dan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis (Sugiyono, 2017). Maka dalam analisis ini mendeskripsikan suatu fenomena karakteristik sanitasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah berdasarkan kriteria indikator sanitasi tersebut yaitu :

- a) Drainase lingkungan (ketersediaan drainase, pemeliharaan drainase dan kualitas drainase)
- b) Pengelolaan air limbah (prasarana air limbah dan pengelolaan air limbah)
- c) Pengelolaan persampahan (prasarana persampahan, pengelolaan persampahan, dan pemeliharaan persampahan)

Berdasarkan indikator diatas melalui observasi lapangan atau pengamatan secara langsung memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi karakteristik sanitasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.

3.7.2 Menganalisis Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah

Pada analisis ini dilakukan pembahasan mendalam terkait masalah yang akan dibahas. Menurut Sugiyono (2017), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Indeks yang digunakan dalam skala ini adalah:

Tabel. 3.4
Indeks Skala Likert

No	Jawaban	Skor
1	Baik	4
2	Cukup baik	3
3	Buruk	2
4	Sangat buruk	1

Sumber: Sugiyono,2017

Selanjutnya menghitung total skor dengan rumus:

$$\text{Total Skor} = T \times \text{PN}$$

Sumber: Darmadi, 2011

T = Total Jumlah Responden yang memilih

PN = Pilihan angka skor likert

Setelah mendapatkan total skor, selanjutnya menghitung penilaian interpretasi responden yaitu hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Index %. Agar mendapatkan hasil interpretasi responden, terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (X) dan skor terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \text{skor tertinggi likert} \times \text{jumlah responden}$$

$$X = \text{skor terendah likert} \times \text{jumlah responden}$$

$$\text{Rumus index \%} = \text{total skor} / Y \times 100$$

Sumber: Darmadi, 2011

Untuk mengetahui interval (rentang jarak) dan interpretasi persen agar mengetahui penilaian dengan metode mencari Interval skor persen (I).

$$I = 100 / \text{Jumlah Skor (Likert)}$$

Sumber: Darmadi, 2011

Maka $= 100 / 4 = 25$. Berikut tabel 3.5 tentang kriteria interpretasi skor berdasarkan interval.

Tabel 3.5

Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Kriteria Interpretasi Skor	Interval
Tinggi	75-100%
Sedang	51-74%
Rendah	26-50%
Sangat Rendah	<25%

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.7.3 Merumuskan Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah

Dalam analisis ini yaitu berdasarkan hasil kondisi karakteristik sanitasi permukiman kumuh dan hasil dari tingkat permasalahan sanitasi permukiman kumuh menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui metode analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah analisis yang berdasarkan pada anggapan bahwa suatu strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal (strength dan weakness) dan eksternal (opportunity dan threat). Keuntungan dari analisis SWOT adalah menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk merangsang strategi baru, oleh karena itu perencanaan yang berdasarkan pada sumber daya dan kompetensi dapat memperkaya analisis SWOT dengan mengembangkan perspektif internal (Dyson, 2002). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut pada kondisi yang ada saat ini. Pemaparan empat komponen SWOT secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. **Strength (S)** merupakan karakteristik dari suatu organisasi atau bisnis yang merupakan suatu keunggulan.

2. **Weakness (W)** merupakan karakteristik dari suatu organisasi atau bisnis yang merupakan kelemahan.
3. **Opportunity (O)** kesempatan yang datang dari luar organisasi atau bisnis.
4. **Threat (T)** elemen yang datang dari luar yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi atau bisnis.

Tujuan dari setiap analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi faktor kunci yang datang dari lingkungan internal dan eksternal. Analisis SWOT dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu:

1. **Faktor internal:** merupakan strength dan weakness yang datang dari lingkungan internal organisasi atau bisnis.
2. **Faktor eksternal:** merupakan opportunity dan threat yang datang dari lingkungan eksternal organisasi atau bisnis.

Pengolahan hasil dari kondisi karakteristik sanitasi permukiman kumuh dan hasil dari tingkat permasalahan sanitasi permukiman kumuh untuk analisis SWOT menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan matriks SWOT. Menurut Lutfi Muta'ali dalam buku teknik analisis regional (2015) terdapat 8 tahapan dalam pembentukan matriks SWOT yaitu :

1. Membuat daftar kekuatan kunci internal wilayah
2. Membuat daftar kelemahan kunci internal wilayah
3. Membuat daftar peluang eksternal wilayah
4. Membuat daftar ancaman eksternal wilayah

5. Menyesuaikan kekuatan-kekuatan internal dengan peluang-peluang eksternal dan mencatat hasilnya dalam strategi S-O
6. Menyesuaikan kelemahan-kelemahan internal dengan peluang-peluang eksternal dan mencatat hasilnya dalam strategi W-O
7. Menyesuaikan kekuatan-kekuatan internal dengan ancaman-ancaman eksternal dan mencatat hasilnya dalam strategi S-T
8. Menyesuaikan kelemahan-kelemahan internal dengan ancaman-ancaman eksternal dan mencatat hasilnya dalam strategi W-T

3.8. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) pengertian variabel penelitian adalah sebagai berikut: “Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Variabel penelitian dalam penelitian penanganan sanitasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.6 Berikut :

Tabel 3.6 Variabel Penelitian



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

No	Sasaaran	Variabel	Indikator
1	Mengidentifikasi karakteristik sanitasi di kawasan permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah	Karakteristik sanitasi	<p>a) Drainase lingkungan (ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, ketidaktersediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan, tidak terpeliharanya drainase, kualitas kontruksi drainase)</p> <p>b) Pengelolaan air limbah (sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknik)</p> <p>c) Pengelolaan persampahan (prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai standar teknis, sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan)</p>
2	Menganalisis Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah	Tingkat Permasalahan Sanitasi	<p>a) Fisik (kondisi prasarana sanitasi)</p> <p>b) Pelaksana (sistem pengelolaan, peran pemerintah, peran masyarakat)</p> <p>c) Perilaku (kebiasaan masyarakat)</p>
3	Merumuskan Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah	<p>a) Kelemahan</p> <p>b) Kekuatan</p> <p>c) Peluang</p> <p>d) Ancaman</p>	<p>a) Karakteristik sanitasi permukiman kumuh</p> <p>b) Tingkat permasalahan sanitasi permukiman kumuh</p>

3.9 Desain Survei

Desain survei merupakan skema pencapaian tujuan penelitian yang dimuat dalam tabel agar mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian. Adapun tabel 3.7 desain survei sebagai berikut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 3.7 Desain Survei



No	Sasaran	Variabel	Indikator	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Analisis	Hasil
1	Mengidentifikasi karakteristik sanitasi di kawasan permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah	Karakteristik sanitasi	<p>a) Drainase lingkungan (tidak mampu mengalirkan limpasan air, tidak tersedia drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan)</p> <p>b) Pengelolaan air limbah (sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknik)</p> <p>c) Pengelolaan persampahan (prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai standar teknis, sistem</p>	<p>a) BAPPEDA Kabupaten Kuantan Singingi</p> <p>b) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi</p> <p>c) Kantor Camat</p> <p>d) Kantor Desa</p> <p>e) Masyarakat</p>	<p>a) Observasi</p> <p>b) Data sekunder</p>	Analisis deskriptif kualitatif	Kondisi karakteristik sanitasi di kawasan permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah

No	Sasaaran	Variabel	Indikator	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Analisis	Hasil
			pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis)				
2	Menganalisis Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah	a) Air Limbah b) Drainase c) Persampahan	a. Fisik (kondisi prasarana sanitasi) b. Pelaksana (sistem pengelolaan, peran pemerintah, peran masyarakat) c. Perilaku (kebiasaan masyarakat)	a) Kantor Camat b) Kantor Desa c) Masyarakat	a) Observasi b) Koesioner	Analisis Skala Likert	Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah
3	Merumuskan Strategi Penanganan Sanitasi	a) Kelelahan b) Kekuatan	a) Karakteristik sanitasi permukiman kumuh	a) Kantor Camat b) Kantor Desa	a) Observasi b) Koesioner c) Data	Analisis SWOT	Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan

No	Sasaaran	Variabel	Indikator	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Analisis	Hasil
	Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah	n c) Peluang d) Ancaman	b) Tingkat permasalahan sanitasi permukiman kumuh	c) Masyarakat	sekunder		Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah

Sumber : Hasil Analisis, 2019



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0000 -10 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur.

4.1.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi atau sekarang lebih dikenal dengan singkatan Kuansing, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula rantau kuantan. Ibu kota kabupaten ini adalah Taluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi berada di bagian selatan provinsi Riau dan terletak pada jalur tengah lintas Sumatra. Kabupaten kuantan singingi

merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dengan luas wilayah 7, 656,03 Km². Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan, sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kecamatan Singingi.
3. Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Kecamatan Kuantan Hilir.
5. Kecamatan Cerenti.
6. Kecamatan Benai.

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H.Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 15 (lima belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah:

1. Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Kecamatan Pucuk Rantau
3. Kecamatan Gunung Toar.
4. Kecamatan Singingi Hilir.
5. Kecamatan Sentajo Raya
6. Kecamatan Pangean.
7. Kecamatan Logas Tanah Darat.
8. Kuantan Hilir Seberang
9. Kecamatan Inuman.

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sungai kuantan atau yang sekarang bernama sungai Indragiri dan sungai singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai kuantan mengalir 12 (dua belas) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km² (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30° dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Ha	Persentase (%)
1	Pucuk Rantau	821,64	82.164	10,73
2	Kuanatan Mudik	564,28	56.428	7,37
3	Hulu Kuantan	384,40	38.440	5,02
4	Gunung Toar	165,65	16.565	2,16
5	Kuantan Tengah	270,74	27.074	3,54
6	Sentajo Raya	145,7	14.570	1,9
7	Benai	124,66	12.466	1,63
8	Pangean	145,32	14.532	1,90
9	Logas Tanah Darat	380,34	38.034	4,97
10	Kuantan Hilir	148,77	14.877	1,94
11	Kuantan Hilir Seberang	114,29	11.429	1,49
12	Inuman	450,01	45.001	5,88
13	Cerenti	456,00	45.600	5,96
14	Singingi	1953,66	195.366	25,52
15	Singingi Hilir	1530,97	153.097	20,00
Jumlah		7.656,03	765.603	100,00

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka Tahun 2019

4.1.3 Klasifikasi Ruang Kabupaten Kuantan Singingi

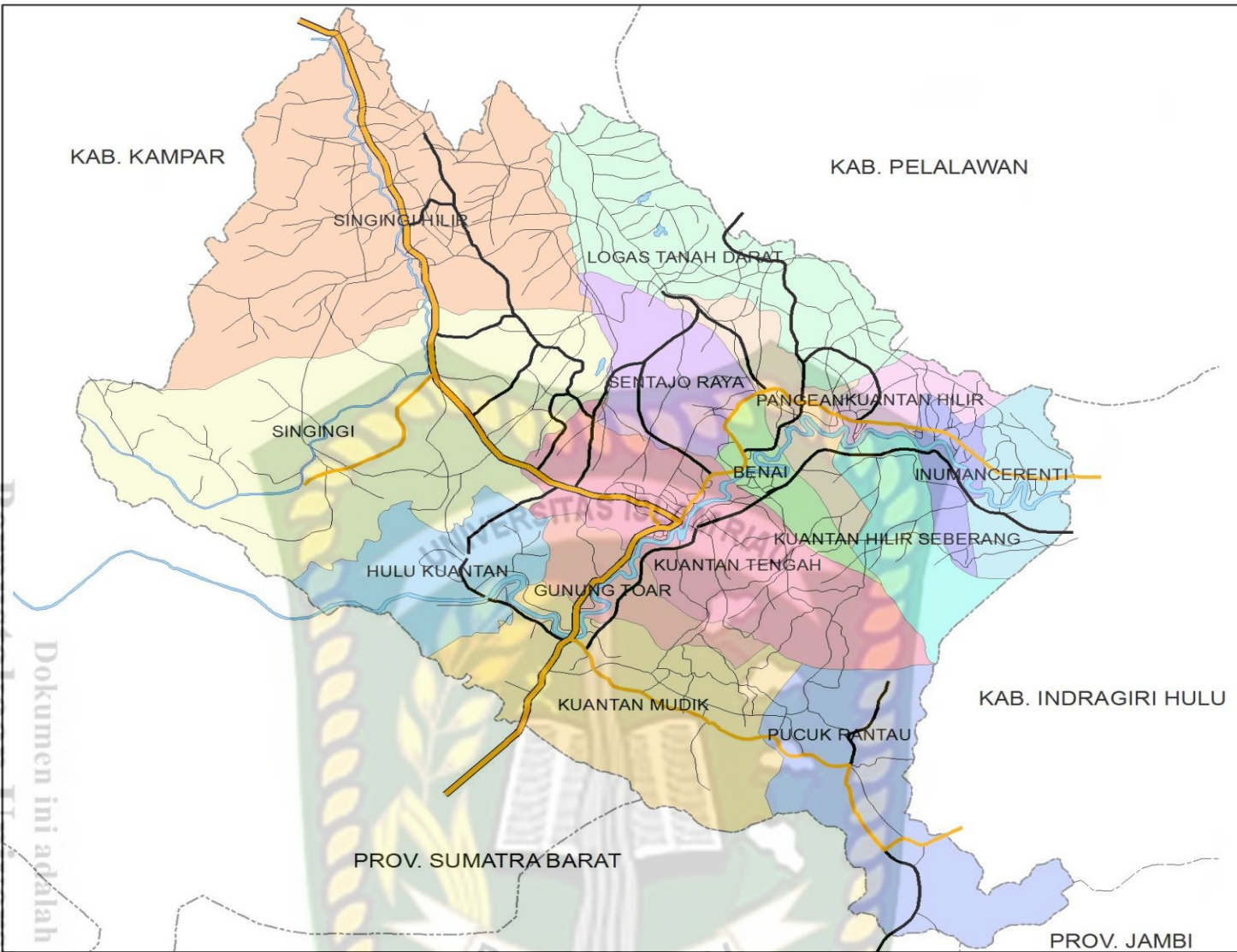
Dengan mengacu pada uraian klasifikasi pola ruang kawasan lindung dan budidaya pada subbab di atas, maka jenis penggunaan lahan serta prosentase luasannya pada pola ruang wilayah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2010-2029.

Berikut rincian pola ruang Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2 Pola Ruang Kabupaten Kuantan Singingi

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (%)
Kawasan Lindung	23.02
Hutan Lindung	10.02
Kawasan Resapan Air	2.33
Danau dan Sungai	0.64
Suaka Margasatwa	10.03
Kawasan Budidaya	76.98
Hutan Produksi	
Hutan Produksi Tetap	5.93
Hutan Produksi Terbatas	13.13
Pertanian	18.27
Perkebunan	38.76
Permukiman	0.88
Jumlah	100.00

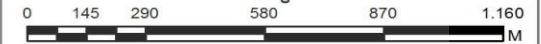
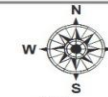
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2030



GAMBAR 4.1
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PRODI PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA



LEGENDA

Batas

- jalan nasional
- jalan provinsi
- jalan kolektor
- jalan lokal
- batas provinsi
- batas kabupaten

Kecamatan

- | | |
|---|--|
| Benai | Kuantan Tengah |
| Cerenti | Logas Tanah Darat |
| Gunung Toar | Pangean |
| Hulu Kuantan | Pucuk Rantau |
| Inuman | Sentaajo Raya |
| Kuantan Hilir | Singingi |
| Kuantan Hilir Seberang | Singingi Hilir |
| Kuantan Mudik | |

Sumber:

-Peta RBI 1:50.000
-RTRW KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dosen Pembimbing:

Puji Astuti, ST. MT

Muhammad Helmi Setiawan
153410010

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Kuantan Tengah

Kecamatan Kuantan Tengah dengan Ibu Kota Teluk Kuantan yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 48.368 jiwa dengan luas wilayah 270.74 Km². Kecamatan Kuantan Tengah terdiri dari 20 Desa dan 3 Kelurahan.

Adapun nama ke 20 desa dan 3 kelurahan di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu :

1. Desa Bandar Alai
2. Desa Pulau Kedundung
3. Desa Pulau Aro
4. Desa Seberang Taluk
5. Desa Pulau Baru
6. Desa Koto Tuo
7. Desa Kopah
8. Desa Jaya
9. Desa Munsalo
10. Desa Beringin Taluk
11. Desa Sawah
12. Kelurahan Pasar Taluk
13. Desa Koto Taluk
14. Kelurahan Simpang Tiga
15. Desa Pulau Godang
16. Desa Koto Kari

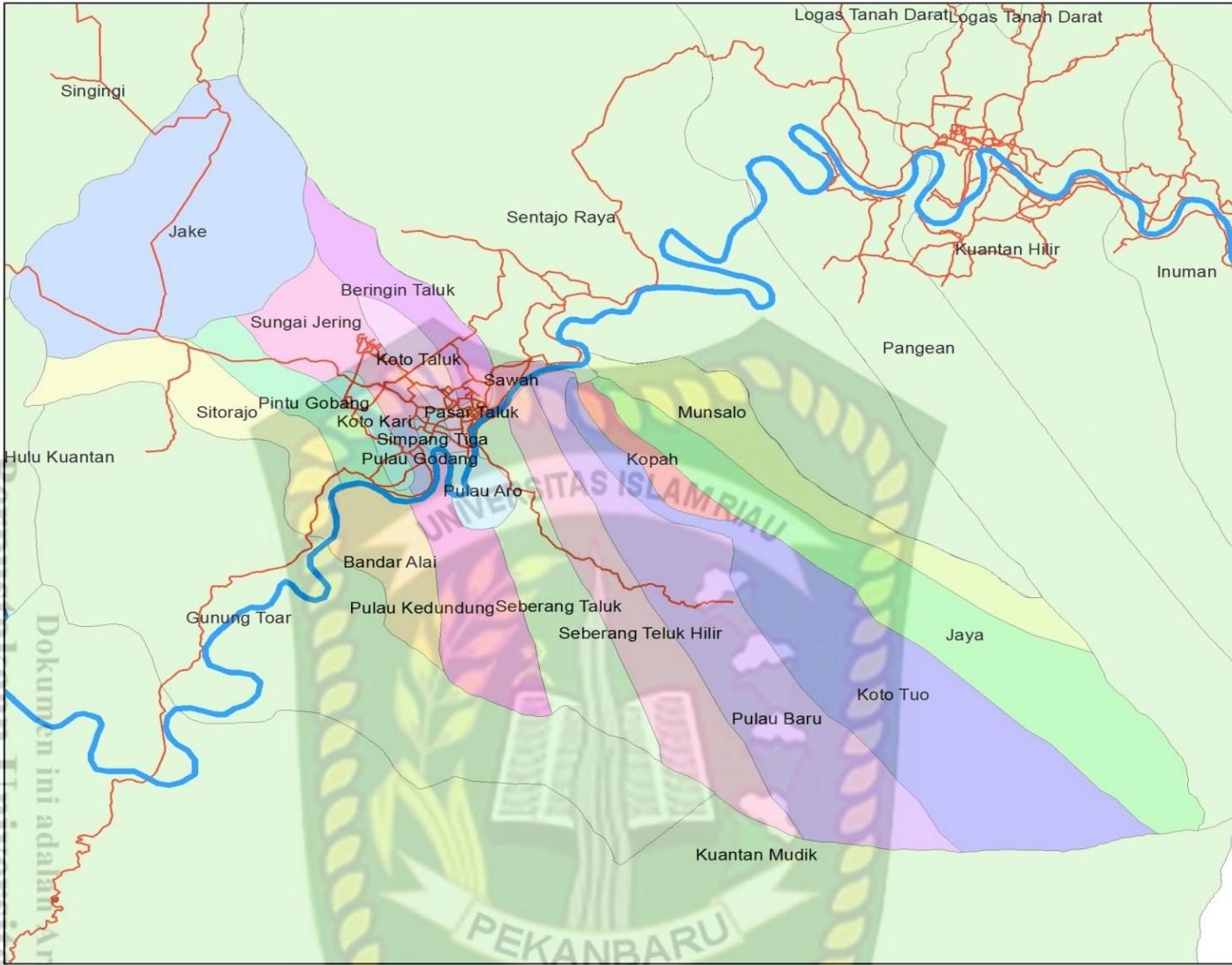
17. Desa Pintu Gobang
18. Desa Jake
19. Desa Seberang Taluk Hilir
20. Desa Sitorajo
21. Kelurahan Sungai Jering
22. Desa Titian Modang
23. Desa Pulau Banjar

4.2.1 Letak Geografis Kecamatan Kuantan Tengah

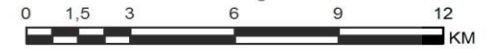
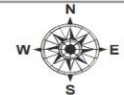
Secara geografis Luas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah adalah 270,74 Km². Wilayah Kecamatan Kuantan Tengah berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara dengan Kecamatan Kecamatan Singingi dan Kecamatan Sentajo Raya
- b) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuantan Mudik dan Hulu Kuantan
- c) Sebelah Barat dengan Kecamatan Kecamatan Singingi dan Kecamatan Gunung Toar
- d) Sebelah Timur dengan Kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Sentajo Raya

Topografi Kecamatan Kuantan Tengah merupakan (tanah datar dan berbukit-bukit) dengan ketinggian sekitar 300 meter diatas permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah pada lapisan atas berjenis (Hitam Gembur) dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning. Pada Tahun 2019, curah hujan tertinggi di Kecamatan Kuantan Tengah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 182 ml (hari hujan 7 hari) dan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 36 ml (hari hujan 2 hari).



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS TEKNIK
 PRODI PERENCANAAN WILAYAH
 DAN KOTA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan

- Sungai

Jaringan Transportasi

- Jaringan Jalan

Kelurahan

- | | |
|----------------|----------------------|
| Bandar Alai | Pasar Taluk |
| Beringin Taluk | Pintu Gobang |
| Jake | Pulau Aro |
| Jaya | Pulau Baru |
| Kopah | Pulau Godang |
| Koto Kari | Pulau Kedundung |
| Koto Taluk | Sawah |
| Koto Tuo | Seberang Taluk |
| Munsalo | Seberang Teluk Hilir |
| Simpang Tiga | Sungai Jering |
| Sitorajo | |

Sumber:

-Peta RBI 1:50.000
 -RTRW KABUPATEN KUANTAN SENGINGI

Dosen Pembimbing:

Puji Astuti, ST. MT

Muhammad Helmi Setiawan
 153410010

GAMBAR 4.2
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KUANTAN TENGAH

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

4.2.2 Kependudukan Kecamatan Kuantan Tengah

Jumlah Penduduk Kecamatan Kuantan Tengah pada Tahun 2019 berjumlah 48.849 jiwa, yang terdiri dari 25.017 jiwa laki-laki dan 23.832 jiwa perempuan. Dengan Sex Rasio sebesar 105. Menunjukkan tidak adanya perbedaan yang besar untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki. Dengan luas wilayah Kecamatan Kuantan Tengah 270,74 km² dan jumlah penduduknya 48.849 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 180,43 yang artinya dalam setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 181 penduduk.

Kecamatan Kuantan Tengah mempunyai 12.028 jumlah rumah tangga dengan rata-rata jumlah penduduk dalam rumah tangga adalah 4 orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan.

Tabel 4.3 Data Kependudukan Berdasarkan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Laki-Laki	Perempuan	Kepadatan Penduduk (Jiwa /km ²)
1.	Desa Bandar Alai	9	945	229	475	470	105
2.	Desa Pulau Kedundung	14	1017	253	527	490	73
3.	Desa Pulau Aro	29	1275	335	670	605	44
4.	Desa Seberang Taluk	6	1943	493	961	982	324
5.	Desa Pulau Baru	5	891	248	434	457	178
6.	Desa Koto Tuo	5	1040	288	510	530	208
7.	Desa Kopah	5	483	134	224	259	97
8.	Desa Jaya	4	1748	459	883	865	437
9.	Desa Munsalo	6	1865	536	988	877	311
10.	Desa Beringin Taluk	13	3164	739	1588	1576	243

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Laki-Laki	Perempuan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
11.	Desa Sawah	5	2589	620	1310	1279	518
12.	Kelurahan Pasar Taluk	4	1069	224	616	453	267
13.	Desa Koto Taluk	8	6076	1487	3079	2997	760
14.	Kelurahan Simpang Tiga	11	3454	784	1775	1679	314
15.	Desa Pulau Godang	6	1776	431	870	906	296
16.	Desa Koto Kari	5	1684	385	872	812	337
17.	Desa Pintu Gobang	4	1909	450	955	954	477
18.	Desa Jake	83	4570	1150	2343	2227	55
19.	Desa Seberang Taluk Hilir	6	1857	419	941	916	310
20.	Desa Sitorajo	5	1604	412	836	768	321
21.	Kelurahan Sungai Jering	12	5356	1304	2841	2515	446
22.	Desa Titian Modang	22,44	1867	490	1011	856	83
23.	Desa Pulau Banjar	3,30	667	158	308	359	202
Jumlah		270,74	48.849	12.028	25.017	23.832	6.405

Sumber : Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Angka Tahun 2019

4.2.3 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya di Kecamatan Kuantan Tengah

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mempunyai beragam mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kantor Badan Pusat Statistik Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bahwa sumber kehidupan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Data Kependudukan Berdasarkan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2019

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
----	------------------	--------	------------

1	Petani	8.036 Jiwa	58,22 %
2	Pedagang	2.322 Jiwa	16,82 %
3	Industri/Kerajinan	243 Jiwa	1,76 %
4	Buruh/Karyawan	2.322 Jiwa	16,82 %
5	Jasa	213 Jiwa	1,54 %
6	Lain-lain	668 Jiwa	4,84 %
Jumlah		13.804 Jiwa	100,00%

Sumber : Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Angka Tahun 2019

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai macam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Sedangkan sosial budaya itu sendiri dari suku kata yakni sosial dan budaya. Sosial dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah mempunyai berbagai macam suku dan budaya. Adapun suku-suku yang terdapat yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Suku Melayu
2. Suku Jawa
3. Suku Minang Kabau
4. Suku Batak
5. Tionghoa

Di bidang olahraga Kecamatan Kuantan Tengah mempunyai sarana olahraga seperti lapangan bola kaki, futsal, basket, bola voli, badminton, tenis, kolam renang, dan lapangan sepak takraw. Sedangkan di bidang sosial kemasyarakatan terdapat rumah sakit, posyandu, pos kamling, dan lain-lain.

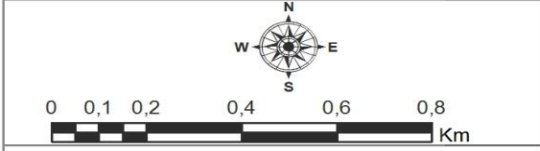
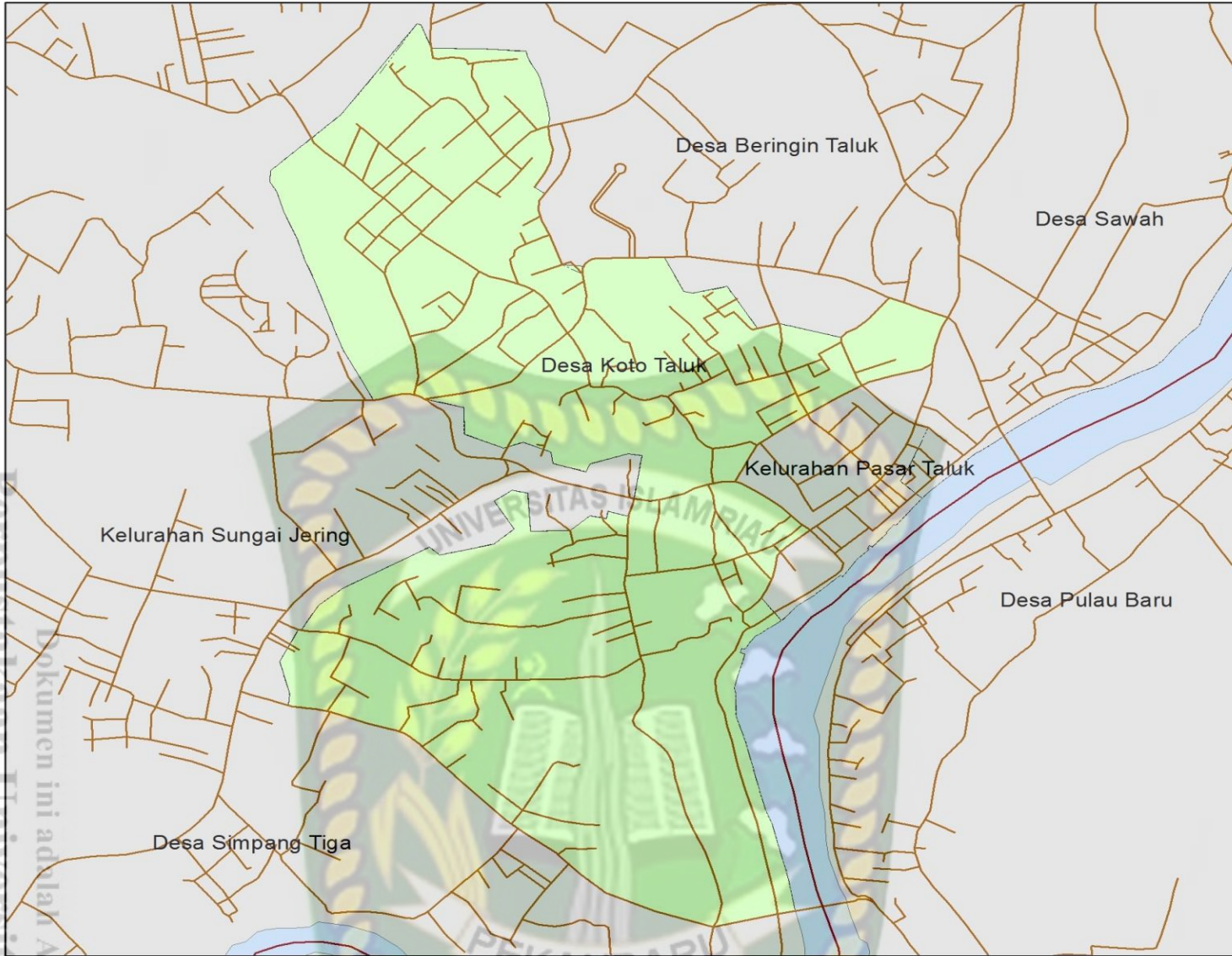
4.3 Gambaran Umum Desa Koto Taluk


Desa Koto Taluk merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Desa Koto Taluk memiliki luas wilayah 8 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.076 jiwa. Desa Koto Taluk merupakan salah satu desa yang menjadi pusat administratif (Ibu kota) dari kabupaten Kuantan Singingi atau yang lebih dikenal dengan kota Teluk Kuantan.

4.3.1 Letak Geografis Desa Koto Taluk

Luas Desa Koto Taluk dengan luas sebesar 8,00 Km² dan kondisi geografisnya adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s.d. 1,75 M dari permukaan laut atau sungai, sering terjadi banjir musiman apabila air pasang dalam disertai curah hujan yang cukup tinggi, sehingga secara geografis Desa Koto Taluk berbatasan dengan;

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pucuk Rantau.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Toar.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sentajo Raya.



- LEGENDA**
- Batas Administrasi**
- Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
- Perairan**
-  Sungai
- Jaringan Transportasi**
-  Jaringan Jalan
- Kelurahan/Desa**
-  Desa Koto Taluk

Sumber:

-Peta RBI 1:50.000
-RTRW KABUPATEN KUANTAN SENGINGI

Dosen Pembimbing:
Puji Astuti, ST. MT

Muhammad Helmi Setiawan
153410010

GAMBAR 4.3
PETA ADMINISTRASI DESA KOTO TALUK

4.3.2 Kependudukan Desa Koto Taluk

Penduduk asli daerah Desa Koto Taluk adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Desa Koto Taluk pada tahun 2019 adalah 6.076 jiwa. Jumlah rumah tangga sebesar 1.487 rumah tangga. Sedangkan Jumlah penduduk laki-laki yaitu 3.079 jiwa dan penduduk perempuan 2.997 jiwa.

Tabel 4.5 Data Kependudukan di Desa Koto Taluk Tahun 2019

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Laki- Laki	Perempu an	Kepadatan Penduduk (Jiwa/k m ²)
1	Desa Koto Taluk	8,00	6.076	1.487	3.079	2.997	7.60
	Jumlah	8,00	6.076	1.487	3.079	2.997	7.60

Sumber : Data Kantor Desa Koto Taluk Tahun 2019

4.3.3 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya di Desa Koto Taluk

4.3.3.1 Kondisi Sosial Desa Koto Taluk

Di kawasan Desa Koto Taluk keadaan sosial masyarakat Desa Koto Taluk ini masih memiliki keakraban melalui sosialisasi dengan adanya gotong royong dengan baik, dan kegiatan wirid hal ini disampaikan oleh beberapa ketua RT di kawasan ini, akan tetapi tidak semua RT yang rutin melakukan kegiatan tersebut.

4.3.3.2 Kondisi Budaya Desa Koto Taluk

Kawasan Desa Koto Taluk mayoritas penduduknya merupakan suku Melayu Riau, dan lainnya merupakan suku-suku pendatang, seperti suku Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Minang Kabau, Suku Batak, Tionghoa dan pada umumnya memeluk agama Islam. Dengan mayoritas penduduknya yang merupakan suku Melayu Riau, tentu nilai-nilai kebudayaan yang erat dijaga adalah kebudayaan Melayu.

4.3.3.3 Kondisi Ekonomi Desa Koto Taluk

Keadaan perekonomian kawasan di Desa Koto Taluk tidak lepas dari kondisi perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi, secara keseluruhan desa ini merupakan pusat aktivitas berbagai sektor jasa, juga sebagai pusat dan terminal perdagangan berbagai hasil pertanian dari berbagai wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga mayoritas masyarakat di Desa koto Taluk merupakan bekerja sebagai pedagang, karyawan, petani, buruh, dan sebagian merupakan PNS. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan aktivitas bisnis di kawasan Desa Koto Taluk, juga didukung oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Kuantan Singingi.

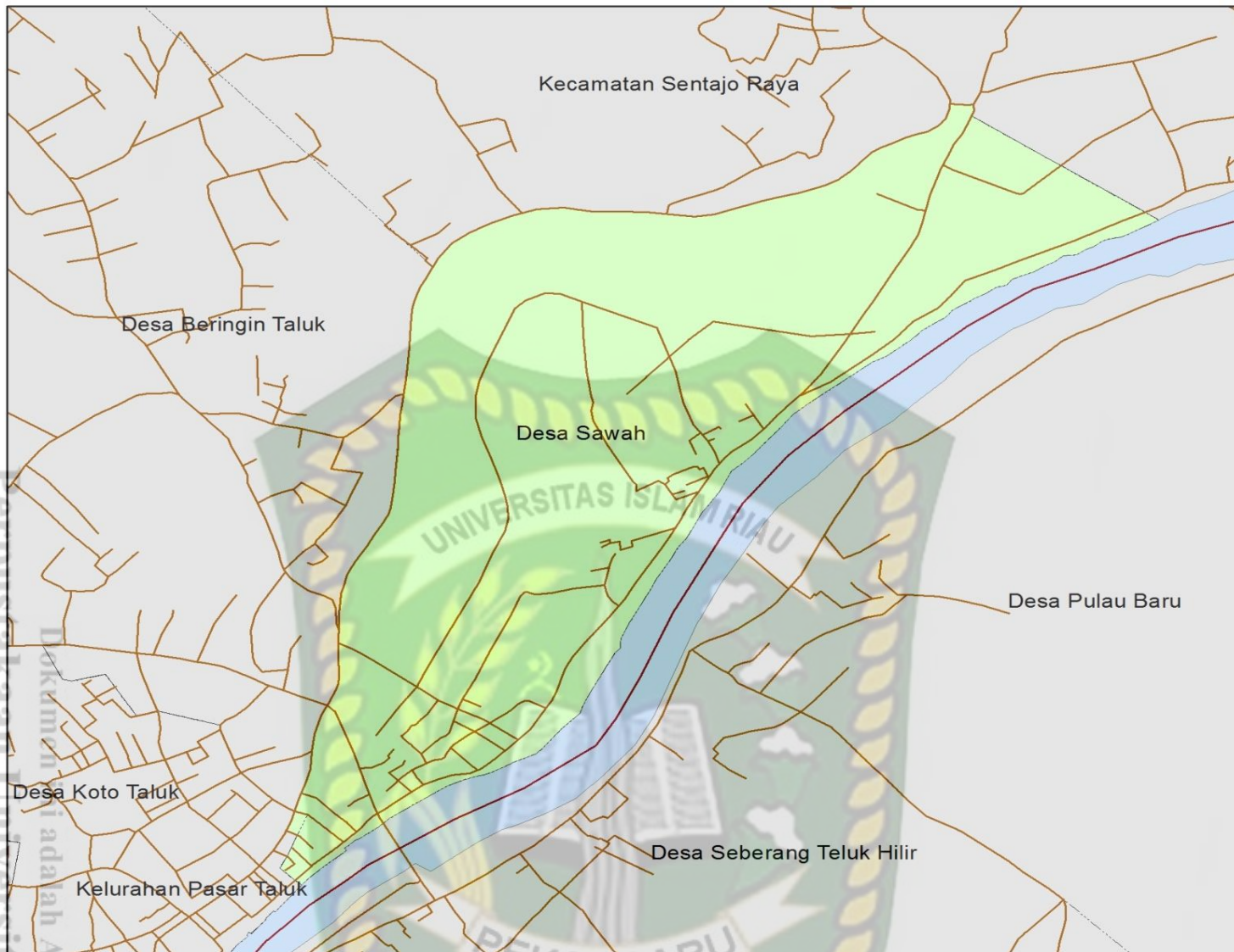
4.4 Gambaran Umum Desa Sawah

Desa Sawah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Desa Sawah memiliki luas wilayah 5 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.589 jiwa.

4.4.1 Letak Geografis Desa Sawah

Luas Desa Sawah dengan luas sebesar 5,00 Km² dan kondisi geografis nya adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s.d. 1,75 M dari permukaan laut atau sungai, sering terjadi banjir musiman apabila air pasang dalam disertai curah hujan yang cukup tinggi, sehingga secara geografis Desa Sawah berbatasan dengan;

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sentajo Raya
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Seberang Taluk.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sitorajo.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Benai.



GAMBAR 4.4
PETA ADMINISTRASI DESA SAWAH



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PRODI PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Perairan

- Sungai

Jaringan Transportasi

- Jaringan Jalan

Kelurahan/Desa

- Desa Sawah

Sumber:

-Peta RBI 1:50.000
-RTRW KABUPATEN KUANTAN SENGINGI

Dosen Pembimbing:

Puji Astuti, ST. MT

Muhammad Helmi Setiawan
153410010

4.4.2 Kependudukan Desa Sawah

Penduduk asli daerah Desa Sawah adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Desa Sawah pada tahun 2019 adalah 2.589 jiwa. Jumlah rumah tangga sebesar 622 rumah tangga. Sedangkan Jumlah penduduk laki-laki yaitu 1.310 jiwa dan penduduk perempuan 1.279 jiwa.

Tabel 4.6 Data Kependudukan di Desa Sawah Tahun 2019

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Laki- Laki	Perempu an	Kepadatan Penduduk(Jiwa/k m ²)
1	Desa Sawah	5,00	2.589	620	1.310	1.279	518
	Jumlah	5,00	2.589	620	1.310	1.279	518

Sumber : Data Kantor Desa Sawah Tahun 2019

4.4.3 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya di Desa Sawah

4.4.3.1 Kondisi Sosial Desa Sawah

Di kawasan Desa Sawah keadaan sosial masyarakat Desa Sawah ini masih memiliki keakraban melalui sosialisasi dengan adanya gotong royong dengan baik, dan kegiatan wirid hal ini disampaikan oleh beberapa ketua RT di kawasan ini, akan tetapi tidak semua RT yang rutin melakukan kegiatan tersebut.

4.4.3.2 Kondisi Budaya Desa Sawah

Kawasan Desa Sawah mayoritas penduduknya merupakan suku Melayu Riau, dan lainnya merupakan suku-suku pendatang, seperti suku Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Minang Kabau, Suku Batak, Tionghoa dan pada umumnya memeluk agama Islam. Dengan mayoritas penduduknya yang merupakan suku Melayu Riau, tentu nilai-nilai kebudayaan yang erat dijaga adalah kebudayaan Melayu.

4.4.3.3 Kondisi Ekonomi Desa Sawah

Keadaan perekonomian kawasan Desa Sawah tidak lepas dari kondisi perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi, secara keseluruhan desa ini merupakan pusat aktivitas berbagai sektor jasa, juga sebagai pusat dan terminal perdagangan berbagai hasil pertanian dari berbagai wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga mayoritas masyarakat di Desa Sawah merupakan bekerja sebagai pedagang, karyawan, petani, buruh, dan sebagian merupakan PNS. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan aktivitas bisnis di kawasan Desa Sawah, juga didukung oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Kuantan Singingi.

4.5 Gambaran Umum Kondisi Sanitasi di Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7656,03 km² atau 765.603 ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 325.872 jiwa. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 229 desa/Kelurahan yang tersebar pada 15 Kecamatan. Kondisi eksisting sanitasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah masih adanya masyarakat yang melakukan BABS, pembuangan sampah sembarangan dan penanganan drainase yang belum optimal.

Kabupaten Kuantan Singingi telah mengalami perkembangan dari segi jumlah penduduk, aktivitas ekonomi dan kegiatan pembangunan fisik, namun belum mampu memberikan tingkat pelayanan sanitasi yang baik kepada masyarakat (pelayanan prima), yang mencakup: pelayanan air minum, pelayanan air limbah (domestik dan non domestik), pelayanan kebersihan/persampahan, dan penanganan drainase.

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Untuk mengetahui kondisi sanitasi di Kabupaten Kuantan Singingi maka perlu dikaji dan diuraikan data-data primer sanitasi berdasarkan Environmental Health Risk Assessment (EHRA) sesuai dengan kondisi terkini di wilayah study.

a. Air Limbah

Berdasarkan hasil EHRA yang telah dilakukan oleh Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018 meliputi tangki septik layak 54,25%, Tangki septik tidak

layak 17,26 % , BabS 28,27% dan data sekunder untuk komunal 0,22%, adanya kenaikan jumlah Babs pada survey EHRA dikarenakan survey EHRA tidak seluruh desa hanya mengambil sampel 25 desa sehingga data tidak dapat terwakilkan untuk seluruh desa.

Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kuantan Singingi No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kuantan Singingi . Dinas pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan adalah SKPD yang diberi kewenangan dan pengelolaan air Limbah domestik dikabupaten Kuantan Singingi, Tugas Utama dari Dinas pekerjaan Umum menyediakan sarana dan prasarana sektor air limbah untuk masyarakat umum seperti menyediakan MCK, tangki septik individual dan komunal, dan sebagainya yang terkait sanitasi. Sedangkan Dinas kesehatan mempunyai tugas dalam pendidikan masyarakat tentang PHBS khususnya pesan tentang tidak BABS dan pemicuan. Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik.

Untuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dikabupaten Kuantan Singingi sudah ada melalui program- program pemberdayaan dalam pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik, tetapi peran swasta belum ada yang terlibat langsung dalam pengelolaan air limbah domestik.

b. Persampahan

Pengelolaan sampah domestik merupakan kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Dalam peraturan menteri Pekerjaan umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan strategi Nasional

Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) juga telah ditetapkan salah satu sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan kualitas pengelolaan TPA menjadi Sanitary Landfill untuk kota metropolitan dan kota besar, serta controlled landfill untuk kota sedang atau kota kecil. Untuk Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum yaitu TPA sudah didesain Sanitary landfill tetapi pengelolaannya masih controlled landfill. Untuk eksisting pengelolaan sampah dapat dilihat pada diagram sistem sanitasi (DSS) persampahan, tabel penanganan sampah baik daerah perkotaan maupun perdesaan.

Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kuantan Singingi No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kuantan Singingi .Dinas pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup adalah SKPD yang diberi kewenangan dan pengolahan Persampahan dikabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Peraturan daerah mengenai pengolahan Sampah. Untuk peran swasta dan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga dikabupaten Kuantan Singingi pada dasarnya belum ada peran swasta yang terlibat langsung dalam pengolahan sampah.

c. Drainase

Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kuantan Singingi No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas pekerjaan Umum adalah SKPD yang diberi kewenangan dan pengelolaan drainase dikabupaten Kuantan Singingi, tetapi sejak tahun 2017 Dinas pekerjaan Umum tidak lagi menangani masalah drainase perkotaan melainkan dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Peraturan daerah mengenai drainase perkotaan.

Untuk peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan di kabupaten Kuantan Singingi pada dasarnya belum ada peran swasta yang terlibat langsung dalam pengelolaan drainase.

4.5.1 Gambaran Umum Kondisi Sanitasi Kecamatan Kuantan Tengah

4.5.1.1 Gambaran Umum Kondisi Sanitasi Desa Koto Taluk

Kondisi sanitasi Desa Koto Taluk terbagi atas 3 sektor yaitu terdiri atas :

- a. Air Limbah
 - Sistem pengolahan air limbah di Desa Koto Taluk sudah terhubung septitank dengan sistem pengolahan setempat
 - Tersedianya sarana dan prasarana air limbah domestik (MCK dan Mobil Tinja) di Desa Koto Taluk
 - Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pengolahan Air Limbah permukiman di Desa Koto Taluk

- b. Persampahan
 - Terdapatnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang sudah berfungsi di Desa Koto Taluk
 - Tersedianya sarana prasarana untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA di Desa Koto Taluk
 - Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Desa Koto Taluk yang tersedia kurang dimanfaatkan oleh masyarakat

- Kurang terpelihara sarana prasarana persampahan yang tersedia di Desa Koto Taluk
- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pengolahan persampahan permukiman di Desa Koto Taluk

c. Drainase

- Kualitas kontruksi drainase baik Desa Koto Taluk
- Terdapatnya kegiatan pembersihan drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui program "*Jumat Bersih*" tentang pemeliharaan drainase di Desa Koto Taluk.
- Belum terdatanya sarana prasarana drainase yang telah dibangun di Desa Koto Taluk
- Belum tersedianya masterplan drainase untuk pengurangan genangan.
- Ketersediaan lahan untuk normalisasi saluran drainase sangat terbatas di Desa Koto Taluk
- Masih rendahnya kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi dan pemeliharaan drainase di Desa Koto Taluk

4.5.1.2. Gambaran Umum Kondisi Sanitasi Desa Sawah

Kondisi sanitasi Desa Sawah terbagi atas 3 sektor yaitu terdiri atas :

a. Air Limbah

- Tersedianya sarana dan prasarana air limbah domestik (MCK dan Mobil Tinja) di Desa Sawah

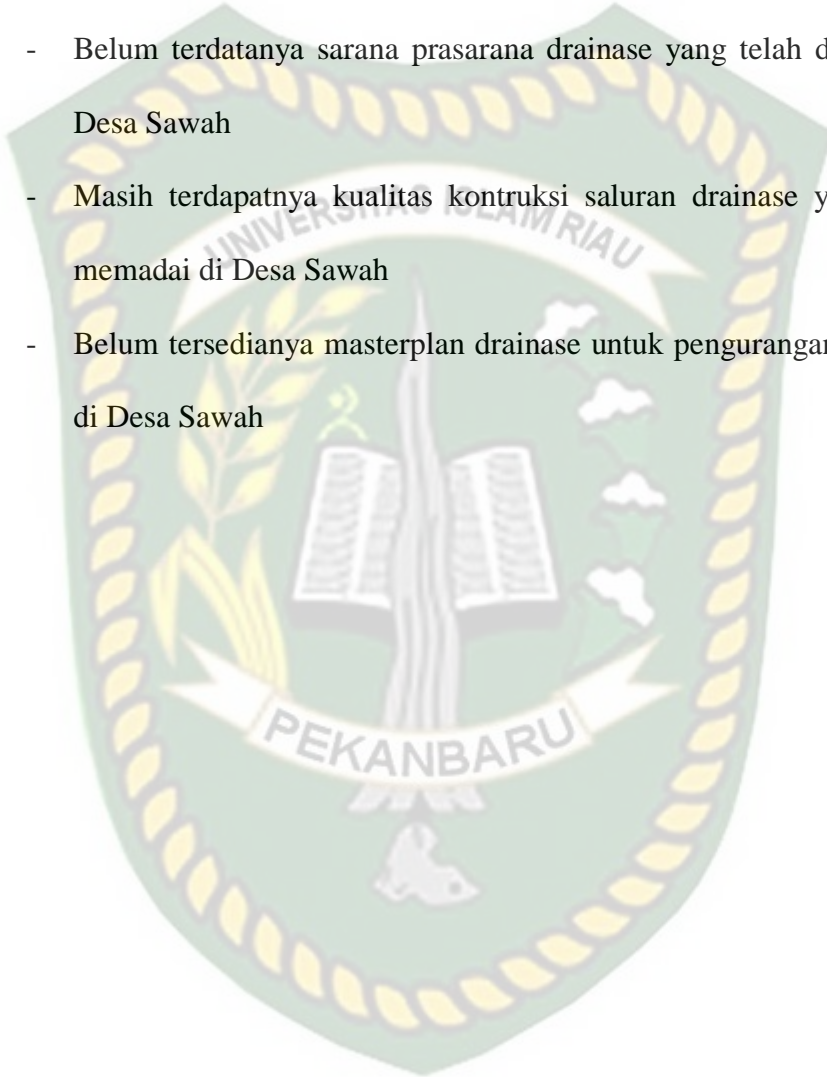
- Adanya minat serta peran masyarakat dalam sistem pengelolaan air limbah di Desa Sawah
- Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki jamban individual/tidak terhubung dengan septitank dan terdapatnya wc umum apung di sempadan sungai di Desa Sawah
- Masih adanya budaya masyarakat masih menggunakan sungai untuk aktivitas mandi cuci kakus di Desa Sawah

b. Persampahan

- Terdapatnya kepemilikan tempat sampah individu di masyarakat di Desa Sawah
- Masih tingginya budaya gotong royong dalam penanganan sampah dari masyarakat di Desa Sawah
- Kurang memadai sarana prasarana persampahan yang tersedia di Desa Sawah
- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pengolahan persampahan permukiman di Desa Sawah
- Terdapatnya pengelolaan sampah masyarakat dengan cara dibakar dan dibuang langsung kesungai
- Tidak tersedianya Tempat Pembuangan (TPS) di Desa Sawah

c. Drainase

- Tersedianya saluran drainase di kawasan permukiman di Desa Sawah
- Sebagian saluran drainase di Desa Sawah sudah dengan konstruksi yang memadai
- Belum terdapatnya sarana prasarana drainase yang telah dibangun di Desa Sawah
- Masih terdapatnya kualitas konstruksi saluran drainase yang belum memadai di Desa Sawah
- Belum tersedianya masterplan drainase untuk pengurangan genangan di Desa Sawah



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Kpts.78/II/2020 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi bahwasannya Kawasan permukiman kumuh perkotaan Teluk Kuantan terletak di Kecamatan Kuantan Tengah tepatnya di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah. Secara spesifik kawasan permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah terdiri dari 3 (tiga) spot kawasan yang terletak di Desa Koto Taluk, Desa Pasar Taluk dan Desa Sawah. Akan tetapi berdasarkan berdasarkan data profil permukiman kumuh dan hasil observasi lapangan lokasi kawasan permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah yang termasuk kawasan permukiman kumuh sedang hanya berada pada Desa Koto Taluk dan Desa Sawah. Dengan luas daerah yaitu di Desa Koto Taluk sebesar 119,10 Ha, sedangkan di Desa Sawah sebesar 11,30 Ha. Berikut tabel 5.1 dan 5.2 lokasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah.

Tabel 5.1 Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Desa Koto Taluk

No	Lokasi Sesuai SK Permukiman Kumuh	Lokasi Hasil Survey
1	RT.01/RW.01	RT.01/RW.01
2	RT.05/RW.03	RT.05/RW.03
3	RT.06/RW.03	RT.06/RW.03
4	RT.07/RW.04	RT.07/RW.04
5	RT.08/RW.04	RT.08/RW.04
6	RT.09/RW.05	RT.09/RW.05
7	RT.10/RW.05	RT.10/RW.05
8	RT.11/RW.06	RT.11/RW.06
9	RT.12/RW.06	RT.12/RW.06
10	RT.13/RW.07	RT.13/RW.07
Jumlah	21 RT/10 RW	21 RT/10 RW

Sumber : Hasil Analisis 2020

Tabel 5.2 Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Desa Sawah

No	Lokasi Sesuai SK Permukiman Kumuh	Lokasi Hasil Survey
1	RT.01/RW.01	RT.01/RW.01
2	RT.02/RW.01	RT.02/RW.01
3	RT.03/RW.02	RT.03/RW.02
4	RT.04/RW.02	RT.04/RW.02
5	RT.05/RW.03	RT.05/RW.03
6	RT.06/RW.03	RT.06/RW.03
7	RT.07/RW.04	RT.07/RW.04
8	RT.08/RW.04	RT.08/RW.04
9	RT.09/RW.05	RT.09/RW.05
10	RT.10/RW.05	RT.10/RW.05
11	RT.11/RW.06	RT.11/RW.06

No	Lokasi Sesuai SK Permukiman Kumuh	Lokasi Hasil Survey
12	RT.12/RW.06	RT.12/RW.06
13	RT.13/RW.07	RT.13/RW.07
14	RT.14/RW.07	RT.14/RW.07
15	RT.15/RW.08	RT.15/RW.08
16	RT.16/RW.08	RT.16/RW.08
Jumlah	16 RT/08 RW	16 RT/08 RW

Sumber : Hasil Analisis 2020

5.1 Karakteristik Sanitasi di Kawasan Permukiman Kumuh Kecamatan Kuantan Tengah

5.1.1 Karakteristik Sanitasi di Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Koto Taluk

a) Drainase Lingkungan

1. Drainase Mampu Mengalirkan Limpasan Air

Drainase lingkungan yang tidak mampu mengalirkan limpasan air akan menimbulkan genangan. Berdasarkan hasil observasi bahwasannya karakteristik saluran drainase di kawasan Desa Koto Taluk terdapat beberapa RT/RW yang belum terbangun dan saluran drainase yang sudah terbangun tidak mampu mengalirkan limpasan air dikarenakan kondisinya banyak

tersumbat yang disebabkan adanya penyempitan saluran, penumpukan sampah. Sehingga berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase kawasan yang terkena genangan ialah sebesar **4.64%** di Desa Koto Taluk. Berikut gambar 5.1 drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air di Desa Koto Taluk.



Gambar 5.1

Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air di Desa Koto Taluk

Sumber: Hasil Survei Primer 2020

2. Ketersediaan Drainase

Berdasarkan hasil observasi di kawasan permukiman kumuh di lingkungan Desa Koto Taluk terdapat beberapa lingkungan perumahan yang tidak terbangunannya saluran drainase dikarenakan jarak antar bangunan rapat dan membatasi ruang yang menyebabkan tidak terbangunnya saluran drainase. Berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase ketidakterediaan drainase di Desa Koto Taluk sebesar **82,16%**. Berikut gambar 5.2 ketidakterediaan drainase di Desa Koto Taluk.



Gambar 5.2
Ketidakterediaan Drainase di Desa Koto Taluk.

Sumber: Hasil Survei Primer 2020

3. Keterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan

Ketidakterhubungan sistem drainase apabila saluran drainase lokal tidak terhubung dengan hirarki saluran drainasenya. Berdasarkan hasil observasi bahwasannya lingkungan permukiman kumuh di Desa Koto Taluk terdapat jaringan jalan yang tidak memiliki saluran drainase, sehingga menyebabkan menimbulkan genangan di kawasan permukiman kumuh di Desa Koto Taluk. Adapun berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan di Desa Koto Taluk yaitu **12,49%**. Berikut gambar 5.3 ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan.



Gambar 5.3
Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan di Desa Koto Taluk

Sumber: Hasil Survei Primer 2020

4. Terpeliharanya Drainase

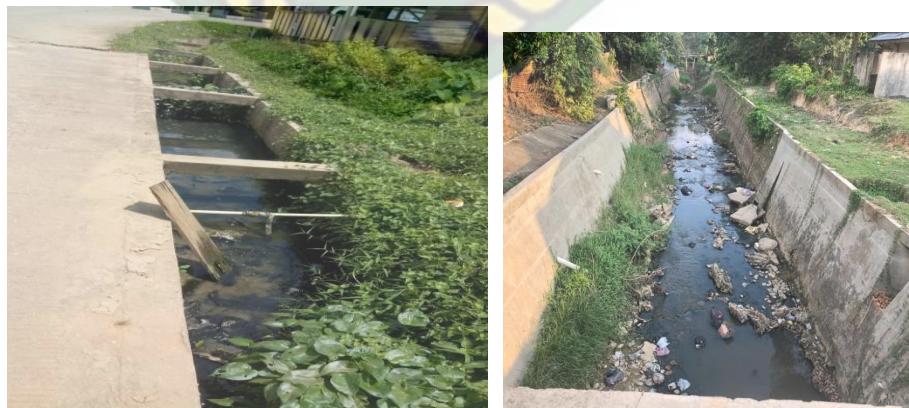
Pemeliharaan saluran drainase perkotaan mencakup bentuk pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan tujuan menjaga fungsi sistem saluran drainase yang ada. Sehingga diperlukan pemeliharaan sistem drainase diperkotaan yang dapat dikategorikan menjadi pemeliharaan rutin, berkala, khusus, dan rehabilitasi. Berdasarkan hasil observasi di Desa Koto Taluk bahwasannya saluran drainase yang sudah terbangun saat ini masih terdapat saluran drainase yang tidak terawat dan banyaknya tumpukan sampah yang berdampak aliran air di drainase tidak mengalir, meskipun pernah dijalankan program Pemerintah Daerah yaitu “*Jum’at Bersih*” tetapi hasil program tersebut belum maksimal. Adapun berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase drainase tidak terpelihara dengan drainase eksisiting ialah **79,32%** untuk Desa Koto Taluk. Berikut gambar 5.4 tidak terpeliharanya drainase.



Gambar 5.4
Tidak Terpeliharanya Drainase di Desa Koto Taluk
Sumber: Hasil Survei Primer 2020

5. Kualitas Kontruksi Drainase

Kualitas kontruksi drainase merupakan kondisi material saluran drainase tersebut. Berdasarkan hasil observasi di Desa Koto Taluk sebagian besar sudah terbangun drainase dengan kualitas kontruksi saluran drainase yang baik, yang mampu mengalirkan limpasan air dikarenakan di Desa Koto Taluk ini pernah adanya pemeliharaan drainase dengan program Pemerintah Daerah yaitu “*Jum’at Bersih*”. Berikut gambar 5.5 kualitas kontruksi drainase.



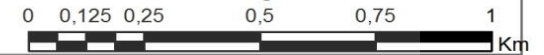
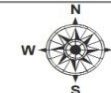
Gambar 5.5
Kualitas Kontruksi Drainase di Desa Koto Taluk
Sumber: Hasil Survei Primer 2020



GAMBAR 5.6
PETA PERSEBARAN DRAINASE DESA KOTO TALUK



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS TEKNIK
 PRODI PERENCANAAN WILAYAH
 DAN KOTA



LEGENDA

Batas Administrasi

----- Batas Kecamatan

----- Batas Kelurahan

----- Dusun

Perairan

— Sungai

Jaringan Transportasi

— Jaringan Jalan

Kelurahan/Desa

— Desa Koto Taluk

Sumber:

-Peta RBI 1:50.000
 -RTRW KABUPATEN KUANTAN SENGINGI

Dosen Pembimbing:

Puji Astuti, ST. MT

Muhammad Helmi Setiawan
 153410010

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

b) **Pengelolaan Air Limbah**

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis apabila kondisi pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem air limbah yang memadai, ditinjau dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septi tank baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

Berdasarkan hasil survei di kawasan permukiman kumuh di Desa Koto Taluk dimana rumah/permukiman lebih dominan menggunakan kakus/kloset yang terhubung dengan septiktank, sehingga berdasarkan data sekunder profil perukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis di Desa Koto Taluk hanya sebesar **19,06 %**.

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis apabila kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septitank, dan tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat. Berdasarkan hasil survei lapangan Desa Koto Taluk sebagian besar permukiman memiliki kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah dengan sistem pengolahan limbah setempat, tetapi terdapat beberapa permukiman yang tidak sesuai standar teknis lebih dikarenakan terdapatnya rumah dengan kondisi bangunan semi permanen

yang terletak di pinggir Sungai Kuantan yaitu dengan tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septitank. Oleh karena itu berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis di Desa Koto Taluk sebesar **27,58%**.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

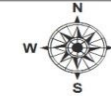
Perpustakaan Universitas Islam Riau



GAMBAR 5.7
PETA PERSEBARAN AIR LIMBAH DESA KOTO TALUK



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PRODI PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Dusun

Perairan

- Sungai

Jaringan Transportasi

- Jaringan Jalan

Kelurahan/Desa

- Desa Koto Taluk

Sumber:

- Peta RBI 1:50.000
- RTRW KABUPATEN KUANTAN SENGINGI

Dosen Pembimbing:

Puji Astuti, ST. MT

Muhammad Helmi Setiawan
153410010

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Arsip Milik :

c) **Pengelolaan Persampahan**

1. Prasarana dan Sarana Persampahan

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis apabila tidak terpenuhinya prasarana dan sarana sampah yang terdiri atas tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala lingkungan, gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan, dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan bahwasannya di Desa Koto Taluk dengan kondisi prasarana dan sarana persampahan yaitu terdapatnya Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), prasarana angkutan sampah, akan tetapi, tidak adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), hanya ada truk sampah pada skala lingkungan, sementara hanya di beberapa permukiman saja gerobak sampah atau sepeda motor beroda tiga yang keliling untuk mengutip sampah. Sehingga berdasarkan data sekunder profil perkumuhan Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase sarana dan prasarana yang tidak sesuai standar teknis yaitu tidak adanya tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga di Desa Koto Taluk sebesar **92,63%**. Berikut gambar 5.8 kondisi tidak tersedianya tempat sampah.



Gambar 5.8
Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah di Desa Koto Taluk
Sumber: Hasil Survei Primer 2020

2. Sistem Pengolahan Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis dilihat apabila dari sistem pengolahan sampah saling terintegrasi yaitu terdapatnya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Berdasarkan hasil observasi ditemukan sistem pengolahan sampah bahwasannya di Desa Koto Taluk yaitu sistem pengelolaan sampahnya bervariasi, ada terdapatnya rumah yang memiliki tempat sampah sendiri di depan rumah, ada yang sampahnya digantung dipagar pagar rumah, ada yang sampahnya dibuang ditempat pembuangan ilegal (TPS liar) ditepi tepi jalan, ada juga masyarakat yang buang sampah ke drainase yang berukuran besar, ada juga yang membuang sampah ke tempat pembuangan sampah berbentuk container atau beton yang disediakan oleh desa setempat ataupun oleh dinas terkait, dan ada juga warga yang membakar langsung sampah tersebut. Untuk sistem pengangkutan sampahnya bervariasi juga, dimana masyarakat yang memiliki tempat sampah didepan rumah atau sampahnya digantung dipagar

pagar rumah itu diangkut oleh truk sampah untuk di jalan lingkungan. Sementara untuk di lingkungan permukiman sistem angkutnya menggunakan gerobak sampah atau motor beroda tiga. Di desa koto ini terdapat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang diangkut menggunakan gerobak, kemudian setelah dari TPS barulah nanti diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan truk sampah. TPA sendiri untuk di Kota Teluk Kuantan terdapat satu TPA yang terletak di jalan lintas perbatasan Kecamatan Kuantan tengah dan Kecamatan Sentajo Raya.

Berdasarkan data sekunder profil perukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis di Desa Koto Taluk ialah sebanyak **65,04%**. Berikut gambar 5.9 kondisi pengelolaan sampah yang tidak sesuai.



Gambar 5.9
Kondisi Pengelolaan Sampah Yang Tidak Sesuai di Desa Koto Taluk
Sumber: Hasil Survei Primer 2020

3. Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Pengolahan Persampahan

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa pemeliharaan secara rutin dan pemeliharaan secara berkala. Berdasarkan hasil observasi di Desa Koto Taluk memiliki prasarana pengolahan persampahan, tetapi kurangnya bentuk perawatan dan bentuk pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana sampah tersebut. Sehingga berdasarkan hasil berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase yang tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolan persampahannya di Desa Koto Taluk sebanyak **79,45%** dikarenakan rendahnya bentuk pemeliharaan pengolahan persampahan baik secara rutin maupun berkala. Berikut gambar 5.10 kondisi tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengolahan persampahan.



Gambar 5.10
Kondisi Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana
Pengolahan Persampahan di Desa Koto Taluk

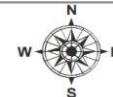
Sumber: Hasil Survei Primer 2020



GAMBAR 5.11
PETA PERSEBARAN PERSAMPAHAN DESA KOTO TALUK



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS TEKNIK
 PRODI PERENCANAAN WILAYAH
 DAN KOTA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Dusun

Perairan

- Sungai

Jaringan Transportasi

- Jaringan Jalan

Kelurahan/Desa

- Desa Koto Taluk

Sumber:

- Peta RBI 1:50.000
- RTRW KABUPATEN KUANTAN SENGINGI

Dosen Pembimbing:

Puji Astuti, ST. MT

Muhammad Helmi Setiawan
 153410010

5.1.2 Mengidentifikasi Karakteristik Sanitasi di Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Sawah

a) Drainase Lingkungan

1. Drainase Mampu Mengalirkan Limpasan Air

Drainase lingkungan yang tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan akan menimbulkan genangan. Berdasarkan hasil observasi bahwasannya saluran drainase di kawasan Desa Sawah ada beberapa RT/RW yang belum terbangun, sehingga menyebabkan aliran air di drainase tidak mengalir yaitu sedimentasi saluran, dan penumpukkan sampah. Berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase kawasan yang terkena genangan ialah sebesar **32,27%** di Desa Sawah. Berikut gambar 5.12 drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air di Desa Koto Taluk.



Gambar 5.12

Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air di Desa Sawah

Sumber: Hasil Survei Primer 2020

2. Ketersediaan Drainase

Berdasarkan hasil observasi di kawasan permukiman kumuh di lingkungan Desa Sawah terdapat beberapa lingkungan perumahan yang tidak terbangunannya saluran drainase dikarenakan terdapatnya masalah ketidakterhubungan drainase dengan hirarkinya dan padatnya jarak antar rumah yang membatasi ruang untuk dibangunnya drainase. Sehingga Desa Sawah memiliki masalah ketidaktersediaan drainase yang paling dominan dibandingkan dengan Desa Koto Taluk. Maka berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase ketidaktersediaan drainase di Desa Sawah sebesar **90,23%**. Berikut gambar 5.13 ketidaktersediaan drainase di Desa Sawah.



Gambar 5.13
Ketidaktersediaan Drainase di Desa Sawah
Sumber: Hasil Survei Primer 2020

3. Keterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan

Ketidakterhubungan sistem drainase apabila saluran drainase lokal tidak terdapatnya keterhubungan dengan hirarki saluran drainasenya. Berdasarkan hasil observasi bahwasannya lingkungan permukiman kumuh di Desa Sawah dengan kondisi eksisting drainase masih terdapat beberapa jaringan jalan yang tidak memiliki saluran drainase, sehingga di kawasan permukiman kumuh di Desa Sawah menyebabkan menimbulkan genangan lebih dominan dibandingkan dengan Desa Koto dan keterbatasan saluran drainase tersebut membuat ketidakterhubungan dengan hirarki saluran drainase tersebut. Adapun berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan di di Desa Sawah sebesar **19,69%**. Berikut gambar 5.14 ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan.



Gambar 5.14
Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan di Desa Sawah

Sumber: Hasil Survei Primer 2020

4. Terpeliharanya Drainase

Pemeliharaan saluran drainase perkotaan mencakup bentuk pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan tujuan menjaga fungsi sistem saluran drainase yang ada. Untuk itu diperlukan pemeliharaan sistem drainase diperkotaan yang dapat dikategorikan menjadi pemeliharaan rutin, berkala, khusus, dan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Sawah saluran drainase yang sudah terbangun saat ini masih terdapat saluran drainase yang tidak terawat dan banyaknya tumpukan sampah yang berdampak aliran air di drainase tidak mengalir, dikarenakan di Desa ini tidak terdapatnya program pemeliharaan saluran drainase baik itu pemeliharaan rutin, berkala maupun khusus. Akan tetapi meskipun demikian Desa yang memiliki masalah tidak terpeliharanya drainase yang paling dominan berada di Desa Koto Taluk. Adapun berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase drainase tidak terpelihara dengan drainase eksisting Desa Sawah sebesar **71,97%**. Berikut gambar 5.15 tidak terpeliharanya drainase.



Gambar 5.15
Tidak Terpeliharanya Drainase di Desa Sawah
Sumber: Hasil Survei Primer 2020

5. Kualitas Kontruksi Drainase

Kualitas kontruksi drainase merupakan kondisi material saluran drainase tersebut. Berdasarkan hasil observasi di Desa Sawah sudah terbangun drainase dengan kualitas kontruksi saluran drainase yang belum memadai, dibandingkan dengan di Desa Koto dimana kualitas kontruksi drainase di lokasi penelitian yaitu terdapatnya kerusakan lapisan meterial drainasenya, sehingga saluran drainase kurang berfungsi mengalirkan dengan baik. Berikut gambar 5.16 kualitas kontruksi drainase.



Gambar 5.16
Kualitas Kontruksi Drainase di Desa Sawah
Sumber: Hasil Survei Primer 2020





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PRODI PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA



0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8
 Km

LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas RW

Perairan

- Sungai

Jaringan Transportasi

- Jaringan Jalan

Kelurahan/Desa

- Desa Sawah

Sumber:

- Peta RBI 1:50.000
- RTRW KABUPATEN KUANTAN SENGINGI

Dosen Pembimbing:

Puji Astuti, ST. MT

Muhammad Helmi Setiawan
 153410010

GAMBAR 5.17
PETA PERSEBARAN DRAINASE DESA SAWAH

b) Pengelolaan Air Limbah

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis apabila kondisi pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem air limbah yang memadai, ditinjau dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septi tank baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

Berdasarkan hasil survei di kawasan permukiman kumuh di Desa Sawah dimana rumah/permukiman yang menggunakan kakus/kloset yang terhubung dengan septiktank yaitu lebih dominan di Desa Koto, sedangkan di Desa Sawah masih terdapatnya kondisi rumah/permukiman semi permanen dengan kondisi kakus/klosetnya tidak terhubung dengan septik tank, yaitu sistem pembuangan air limbah yang langsung ke sungai, terutama rumah yang berada di bantaran sungai Kuantan. Hal ini menyebabkan pengelolaan air limbah permukiman tidak sesuai standar teknis. Adapun berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis di Desa Sawah sebesar **32,45%**.

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah

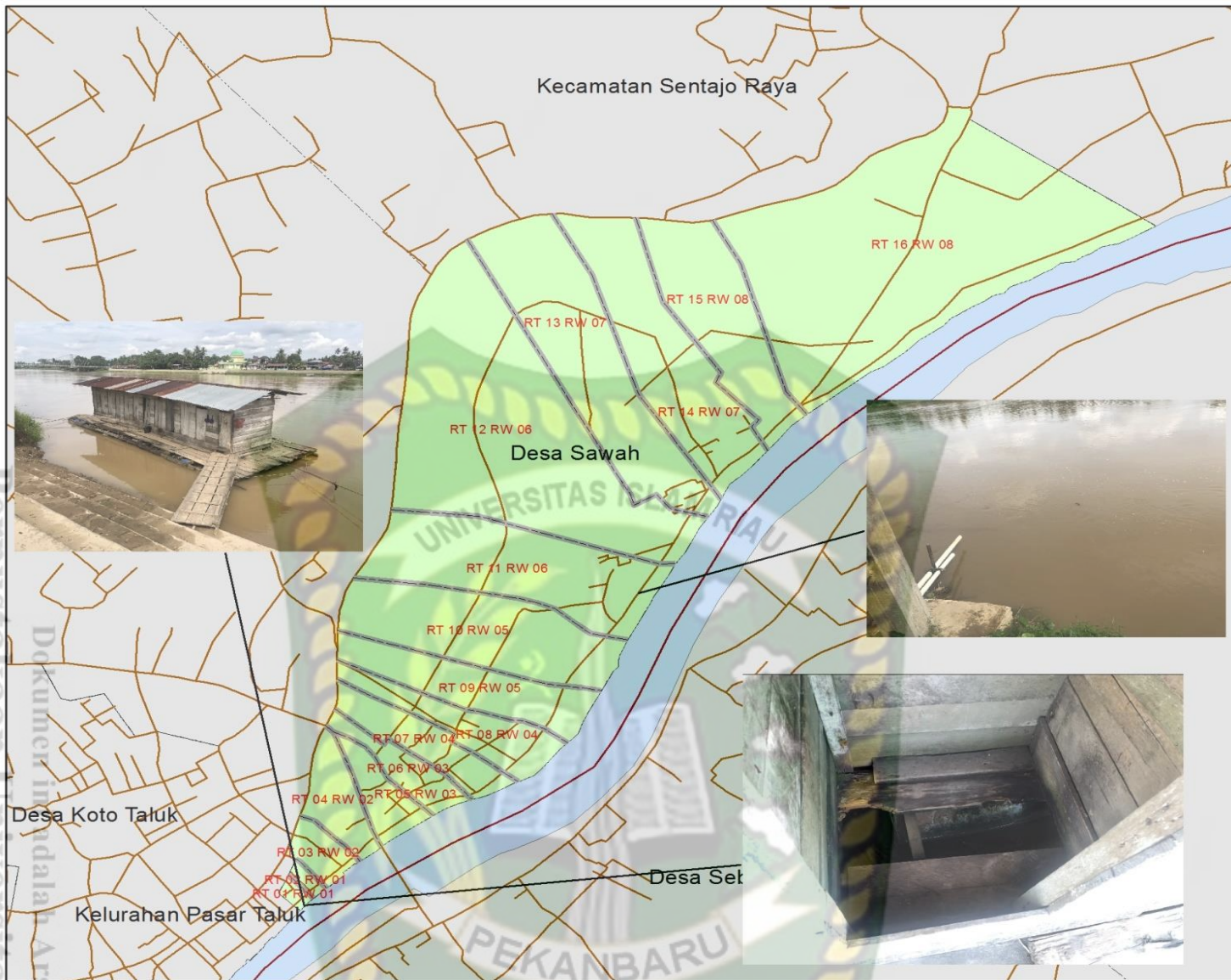
Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis apabila kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septitank, dan tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Berdasarkan hasil survei lapangan di Desa Sawah bahwasannya kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis karena terdapatnya beberapa rumah/permukiman yang masih menggunakan pengolahan air limbah individual yaitu dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septitank yang berada di sekitar pinggiran Sungai Kuantan dan juga terdapat wc umum yang terapung (WC Apung) di Sungai Kuantan di Desa Sawah ini. Oleh karena itu berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis di Desa Sawah sebesar **27,58%**. Berikut gambar 5.18 prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis di Desa Sawah.

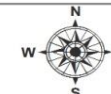


Gambar 5.18
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah
Tidak Sesuai Standar Teknis di Desa Sawah

Sumber: Hasil Survei Primer 2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS TEKNIK
 PRODI PERENCANAAN WILAYAH
 DAN KOTA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas RW

Perairan

- Sungai

Jaringan Transportasi

- Jaringan Jalan

Kelurahan/Desa

- Desa Sawah

Sumber:

-Peta RBI 1:50.000
 -RTRW KABUPATEN KUANTAN SENGINGI

Dosen Pembimbing:

Puji Astuti, ST. MT

Muhammad Helmi Setiawan
 153410010

GAMBAR 5.19
PETA PERSEBARAN AIR LIMBAH DESA SAWAH

c) Pengelolaan Persampahan

1. Prasarana dan Sarana Persampahan

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis apabila tidak terpenuhinya prasarana dan sarana sampah yang terdiri atas tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala lingkungan, gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan, dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan bahwasannya di Desa Sawah dengan kondisi prasarana dan sarana persampahan yang tidak sesuai persyaratan teknis karena sangat minim prasarana dan sarana persampahan di Desa Sawah ini, seperti tidak ditemukan tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tidak adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tidak ditemukan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) di Desa Sawah dan TPS hanya terletak di Desa Koto Taluk, sehingga desa yang memiliki masalah sarana dan prasarana yang tidak sesuai persyaratan teknis yang paling dominan berada di Desa Sawah dibandingkan dengan Desa Koto Taluk. Adapun berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase sarana dan prasarana yang tidak sesuai standar teknis yaitu di Desa Sawah sebesar **100,00%**. Berikut gambar 5.20 kondisi tidak tersedianya tempat sampah di Desa Sawah.



Gambar 5.20
Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah di Desa Sawah

Sumber: Hasil Survei Primer 2020

2. Sistem Pengolahan Persampahan

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis dilihat apabila dari sistem pengolahan sampah saling terintegrasi yaitu terdapatnya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan sistem pengolahan sampah bahwasannya di Desa Sawah yaitu sistem pengelolaan sampah yang bervariasi, dimana hanya beberapa rumah yang memiliki tempat sampah di depan rumah, bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai atau tepi sungai lebih memilih membuang sampahnya langsung ke Sungai Kuantan, dan kemudian terdapat masyarakat dengan pengelolaan sampah seperti membakar sampahnya. Sehingga sistem pengangkutan sampah di Desa Sawah ini lebih sering diangkut menggunakan gerobak atau motor beroda tiga, bisa dikatakan jarang truk sampah mengangkut sampah di desa sawah

dikarenakan jalannya yang kecil, dimana kondisi daerah persampahan terparah yaitu terletak di RT 02/RW 01.

Berdasarkan uraian diatas desa yang memiliki masalah sistem pengolahan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis yang paling dominan berada di Desa Sawah dan berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis di Desa Sawah sebesar **81,17%**. Berikut gambar 5.21 kondisi pengelolaan sampah yang tidak sesuai di Desa Sawah.



Gambar 5.21
Kondisi Pengelolaan Sampah Yang Tidak Sesuai di Desa Sawah

Sumber: Hasil Survei Primer 2020

3. Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Pengolahan Persampahan

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa pemeliharaan secara rutin dan pemeliharaan secara berkala. Desa yang memiliki masalah tidak

terpeliharanya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang paling dominan berada di Desa Sawah dikarenakan berdasarkan hasil observasi bahsawannya minimnya sarana dan prasarana persampahan di Desa Sawah, sehingga dengan prasarana yang ada tidak terpelihara dengan baik, dan dampak dari minimnya prasarana dan sarana persampahan di Desa Sawah ini menyebabkan masyarakat membentuk TPS liar di lingkungan Desa Sawah ini. Berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase yang tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahannya di Desa Sawah sebesar **100,00%**. Berikut gambar 5.22 kondisi tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengolahan persampahan di Desa Sawah.



Gambar 5.22
Kondisi Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana
Pengolahan Persampahan di Desa Sawah

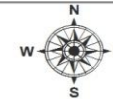
Sumber: Hasil Survei Primer 2020



GAMBAR 5.23
PETA PERSEBARAN PERSAMPAHAN DESA SAWAH



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS TEKNIK
 PRODI PERENCANAAN WILAYAH
 DAN KOTA



LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas RW

Perairan

- Sungai

Jaringan Transportasi

- Jaringan Jalan

Kelurahan/Desa

- Desa Sawah

Sumber:

- Peta RBI 1:50.000
- RTRW KABUPATEN KUANTAN SENGINGI

Dosen Pembimbing:

Puji Astuti, ST. MT

Muhammad Helmi Setiawan
 153410010

5.2 Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah

Analisis tingkat permasalahan sanitasi kawasan permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah menggunakan jenis analisis skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok, dengan indikator sebagai berikut :

- a) Fisik (kondisi prasarana sanitasi)
- b) Pelaksana (sistem pengelolaan, peran pemerintah, peran masyarakat)
- c) Perilaku
- d) aku (kebiasaan masyarakat)

Dalam analisis ini dengan jumlah responden yaitu di Desa Koto Taluk 237 KK dan Desa Sawah 99 KK. Maka total responden yaitu 336 KK. Berikut hasil perhitungan tingkat permasalahan sanitasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah yang terdiri dari Desa Koto Taluk dan Desa Sawah.

5.2.1 Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Koto Taluk

A. Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi)

Hasil analisis yang diperoleh dari responden yaitu Desa Koto Taluk dengan indikator fisik yang meliputi kondisi prasarana sanitasi yang terdiri atas kondisi prasarana sampah, kondisi prasarana air limbah/MCK, dan kondisi prasarana drainase lingkungan dimana dengan rata-rata tingkat permasalahan dari kondisi fisik prasarana sanitasi yaitu **72,28%**. Berikut tabel 5.3 Indikator Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi).

Tabel 5.3 Indikator Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi)

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Frekuensi	Indeks %	Rata-rata %
1	Bagaimana kondisi prasarana sampah di lingkungan rumah anda?	Baik (ada, kedap air, tertutup)	12	48	64.4
		Cukup baik (ada, kedap air, tidak tertutup)	110	330	
		Buruk (ada, tidak kedap air, tidak tertutup)	115	230	
		Sangat buruk (tidak ada)	0	0	
2	Bagaimana kondisi prasarana air limbah/MCK di lingkungan rumah dirumah anda?	Baik (ada kloset leher angsa, terhubung septitank)	40	160	77.4
		Cukup baik (ada kloset leher angsa, tidak terhubung septitank)	177	531	
		Buruk (tidak ada kloset leher angsa, langsung ke sungai)	20	40	
		Sangat buruk (tidak ada)	0	0	
3	Bagaimana kondisi prasarana drainase di lingkungan rumah dirumah anda?	Baik (ada, mengalirkan air, pemeliharaan rutin/berkala, terhubung hirarki drainase)	27	108	75.0
		Cukup baik (ada, mengalirkan air, tidak pemeliharaan rutin/berkala, tidak terhubung hirarki drainase)	180	540	
		Buruk (ada, tidak mengalirkan air, tidak pemeliharaan rutin/berkala, tidak terhubung hirarki drainase)	30	60	
		Sangat buruk (tidak ada)	0	0	
					72.28%

Sumber : Hasil Analisis 2020

Berdasarkan tabel diatas maka interpretasi skor tingkat permasalahan ditinjau dari Indikator Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi) yaitu termasuk kategori **Sedang**, seperti pada tabel 5.4 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval.

Tabel 5.4
Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Kriteria Interpretasi Skor	Interval
Tinggi	75-100%
Sedang	51-74%
Rendah	26-50%
Sangat Rendah	<25%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

B. Pelaksana

1. Sistem Pengelolaan Sanitasi

Hasil analisis yang diperoleh dari responden yaitu Desa Koto Taluk dengan indikator Pelaksana (sistem pengelolaan sanitasi) yang meliputi sistem pengolahan sampah, sistem pengolahan air limbah dan sistem pengolahan drainase dimana dengan rata-rata tingkat permasalahan dari indikator pelaksana sistem pengelolaan sanitasi yaitu **74.85%**. Berikut tabel 5.5 indikator Pelaksana (Sistem Pengelolaan Sanitasi).

Tabel 5.5 Indikator Pelaksana (Sistem Pengelolaan Sanitasi)

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Frekuensi	Indeks %	Rata-rata %	
1	Bagaimana sistem pengelolaan sampah di lingkungan rumah anda?	Baik (ada pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	69	276	79.0	74.85%
		Cukup baik (ada pewadahan, pemilahan, pengumpulan, tidak ada pengangkutan, tidak ada pengolahan)	134	402		
		Buruk (ada pewadahan, tidak pemilahan, tidak pengumpulan, tidak ada pengangkutan, tidak ada pengolahan)	34	68		
		Sangat buruk (tidak ada)	0	0		
2	Bagaimana sistem pengelolaan air limbah di lingkungan rumah anda?	Terpusat	0	0	71.4	74.85%
		Setempat	200	600		
		Individual	37	74		
		Tidak ada	0	0		
3	Bagaimana sistem pengelolaan drainase dilingkungan rumah anda?	Baik (mengalirkan limpasan air, terhubung dengan hirarki drainase)	46	184	74.2	74.85%
		Cukup baik (mengalirkan limpasan air, tidak terhubung dengan hirarki drainase)	139	417		
		Buruk (tidak mengalirkan limpasan air, tidak terhubung dengan hirarki drainase)	47	94		
		Sangat buruk (tidak ada)	5	5		

Sumber : Hasil Analisis 2020

Berdasarkan tabel diatas maka interpretasi skor tingkat permasalahan ditinjau dari Indikator Pelaksana (Sistem Pengelolaan Sanitasi) yaitu termasuk kategori **Sedang**, seperti pada tabel 5.6 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval.

Tabel 5.6
Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Kriteria Interpretasi Skor	Interval
Tinggi	75-100%
Sedang	51-74%
Rendah	26-50%
Sangat Rendah	<25%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

2. Peran Pemerintah

Hasil analisis yang diperoleh dari responden yaitu Desa Koto Taluk dengan indikator Pelaksana (peran pemerintah) yang meliputi pemerintah dalam penanganan sanitasi dimana hasil rata-rata tingkat permasalahan dari indikator Pelaksana (peran pemerintah) yaitu **52%**. Berikut tabel 5.7 indikator Pelaksana (Peran Pemerintah).

Tabel 5.7 Indikator Pelaksana (Peran Pemerintah)

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Frekuensi	Indeks %	Rata-rata %	
1	Apakah pernah ada peran pemerintah dalam penanganan sanitasi di lokasi ini?	Selalu (adanya program sanitasi tiap bulan)	0	0	52.2	52%
		Sering (adanya program sanitasi tiap tahun)	19	57		
		Kadang-kadang (adanya program sanitasi < 5 tahun)	218	436		
		Tidak pernah	0	0		
		Tidak pernah	0	0		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka interpretasi skor tingkat permasalahan ditinjau dari Indikator Pelaksana (Peran Pemerintah) yaitu termasuk kategori **Sedang**, seperti pada tabel 5.8 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval.

Tabel 5.8
Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Kriteria Interpretasi Skor	Interval
Tinggi	75-100%
Sedang	51-74%
Rendah	26-50%
Sangat Rendah	<25%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

3. Peran Masyarakat

Hasil analisis yang diperoleh dari responden yaitu Desa Koto Taluk dengan indikator Pelaksana (Peran Masyarakat) yang meliputi keterlibatan masyarakat dalam penanganan sanitasi dimana hasil rata-rata tingkat permasalahan dari indikator Pelaksana (Peran Masyarakat) yaitu **55%**. Berikut tabel 5.9 Indikator Pelaksana (Peran Masyarakat).

Tabel 5.9 Indikator Pelaksana (Peran Masyarakat)

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Frekuensi	Indeks %	Rata-rata %	
1	Apakah pernah ada peran atau keterlibatan masyarakat dalam penanganan sanitasi di lokasi ini?	Selalu (adanya bentuk pemeliharaan sanitasi tiap hari)	10	40	55.2	55%
		Sering (adanya bentuk pemeliharaan sanitasi tiap minggu)	27	81		
		Kadang-kadang (adanya bentuk pemeliharaan sanitasi tiap bulan)	200	400		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka interpretasi skor tingkat permasalahan ditinjau dari Indikator Pelaksana (Peran Masyarakat) yaitu termasuk kategori **Sedang**, seperti pada tabel 5.10 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval.

Tabel 5.10
Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Kriteria Interpretasi Skor	Interval
Tinggi	75-100%
Sedang	51-74%
Rendah	26-50%
Sangat Rendah	<25%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

C. Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi)

Hasil analisis yang diperoleh dari responden yaitu Desa Koto Taluk dengan indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi) yang meliputi bentuk pemeliharaan secara rutin/berkala sampah, air limbah dan drainase, dimana hasil rata-rata tingkat permasalahan dari indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi) yaitu **59.92%**. Berikut tabel 5.11 indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi).

Tabel 5.11 Indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi)

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Frekuensi	Indeks %	Rata-rata %	
1	Apakah ada pemeliharaan secara rutin/berkala sampah yang ada dirumah anda sesuai standar teknis?	Selalu (pemeliharaan setiap hari)	1	4	71.5	59.92%
		Sering (pemeliharaan setiap minggu)	199	597		
		Kadang-kadang (pemeliharaan setiap bulan)	37	74		
		Tidak pernah	0	0		
2	Apakah ada pemeliharaan secara rutin/berkala air limbah yang ada dirumah anda sesuai standar teknis?	Selalu (pemeliharaan setiap hari)	0	0	55.4	
		Sering (pemeliharaan setiap minggu)	49	147		
		Kadang-kadang (pemeliharaan setiap bulan)	188	376		
		Tidak pernah	0	0		
3	Apakah ada pemeliharaan secara rutin/berkala drainase yang ada dirumah anda sesuai standar teknis?	Selalu (pemeliharaan setiap hari)	0	0	52.9	
		Sering (pemeliharaan setiap minggu)	25	75		
		Kadang-kadang (pemeliharaan setiap bulan)	212	424		
		Tidak pernah	0	0		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka interpretasi skor tingkat permasalahan ditinjau dari indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi) yaitu termasuk kategori **Sedang**, seperti pada tabel 5.12 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval.

Tabel 5.12

Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Kriteria Interpretasi Skor	Interval
Tinggi	75-100%
Sedang	51-74%
Rendah	26-50%
Sangat Rendah	<25%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

5.2.2 Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Sawah

A. Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi)

Hasil analisis yang diperoleh dari responden yaitu Desa Sawah dengan indikator fisik yang meliputi kondisi prasarana sanitasi yang terdiri atas kondisi prasarana sampah, kondisi prasarana air limbah/MCK, dan kondisi prasarana drainase lingkungan dimana dengan rata-rata tingkat permasalahan dari kondisi fisik prasarana sanitasi yaitu **65%**. Berikut tabel 5.13 Indikator Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi).

Tabel 5.13 Indikator Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi)

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Frekuensi	Indeks %	Rata-rata %
1	Bagaimana kondisi prasarana sampah di lingkungan rumah anda?	Baik (ada, kedap air, tertutup)	2	8	58.6
		Cukup baik (ada, kedap air, tidak tertutup)	30	90	
		Buruk (ada, tidak kedap air, tidak tertutup)	67	134	
		Sangat buruk (tidak ada)	0	0	
2	Bagaimana kondisi prasarana air limbah/MCK di lingkungan rumah dirumah anda?	Baik (ada kloset leher angsa, terhubung septitank)	3	12	65.4
		Cukup baik (ada kloset leher angsa, tidak terhubung septitank)	55	165	
		Buruk (tidak ada kloset leher angsa, langsung ke sungai)	41	82	
		Sangat buruk (tidak ada)	0	0	
3	Bagaimana kondisi prasarana drainase di lingkungan rumah dirumah anda?	Baik (ada, mengalirkan air, pemeliharaan rutin/berkala, terhubung hirarki drainase)	9	36	70.7
		Cukup baik (ada, mengalirkan air, tidak pemeliharaan rutin/berkala, tidak terhubung hirarki drainase)	66	198	
		Buruk (ada, tidak mengalirkan air, tidak pemeliharaan rutin/berkala, tidak terhubung hirarki drainase)	22	44	
		Sangat buruk (tidak ada)	2	2	

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka interpretasi skor tingkat permasalahan ditinjau dari Indikator Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi)

yaitu termasuk kategori **Sedang**, seperti pada tabel 5.14 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval.

Tabel 5.14
Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Kriteria Interpretasi Skor	Interval
Tinggi	75-100%
Sedang	51-74%
Rendah	26-50%
Sangat Rendah	<25%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

B. Pelaksana

1. Sistem Pengelolaan Sanitasi

Hasil analisis yang diperoleh dari responden yaitu Desa Sawah dengan indikator Pelaksana (sistem pengelolaan sanitasi) yang meliputi sistem pengolahan sampah, sistem pengolahan air limbah dan sistem pengolahan drainase dimana dengan rata-rata tingkat permasalahan dari indikator pelaksana sistem pengelolaan sanitasi yaitu **66%**. Berikut tabel 5.15 Indikator Pelaksana (Sistem Pengelolaan Sanitasi).

Tabel 5.15 Indikator Pelaksana (Sistem Pengelolaan Sanitasi)

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Frekuensi	Indeks %	Rata-rata %	
1	Bagaimana sistem pengelolaan sampah di lingkungan rumah anda?	Baik (ada pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	11	44	69.2	66%
		Cukup baik (ada pewadahan, pemilahan, pengumpulan, tidak ada pengangkutan, tidak ada pengolahan)	54	162		
		Buruk (ada pewadahan, tidak pemilahan, tidak pengumpulan, tidak ada pengangkutan, tidak ada pengolahan)	34	68		
		Sangat buruk (tidak ada)	0	0		
2	Bagaimana sistem pengelolaan air limbah di lingkungan rumah anda?	Terpusat	0	0	70.2	
		Setempat	80	240		
		Individual	19	38		
		Tidak ada	0	0		
3	Bagaimana sistem pengelolaan drainase di lingkungan rumah anda?	Baik (mengalirkan limpasan air, terhubung dengan hirarki drainase)	7	28	59.8	
		Cukup baik (mengalirkan limpasan air, tidak terhubung dengan hirarki drainase)	25	75		
		Buruk (tidak mengalirkan limpasan air, tidak terhubung dengan hirarki drainase)	67	134		
		Sangat buruk (tidak ada)	0	0		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka interpretasi skor tingkat permasalahan ditinjau dari Indikator Pelaksana (Sistem Pengelolaan Sanitasi) yaitu termasuk kategori **Sedang**, seperti pada tabel 5.16 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval.

Tabel 5.16
Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Kriteria Interpretasi Skor	Interval
Tinggi	75-100%
Sedang	51-74%
Rendah	26-50%
Sangat Rendah	<25%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

2. Peran Pemerintah

Hasil analisis yang diperoleh dari responden yaitu Desa Sawah dengan Indikator Pelaksana (peran pemerintah) yang meliputi pemerintah dalam penangaan sanitasi dimana hasil rata-rata tingkat permasalahan dari indikator Pelaksana (peran pemerintah) yaitu **52%** Berikut tabel 5.17 indikator Pelaksana (Peran Pemerintah).

Tabel 5.17 Indikator Pelaksana (Peran Pemerintah)

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Frekuensi	Indeks %	Rata-rata %	
1	Apakah pernah ada peran pemerintah dalam penangaan sanitasi di lokasi ini?	Selalu (adanya program sanitasi tiap bulan)	0	0	50.3	50%
		Sering (adanya program sanitasi tiap tahun)	11	33		
		Kadang-kadang (adanya program sanitasi < 5 tahun)	78	156		
		Tidak pernah	10	10		

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka interpretasi skor tingkat permasalahan ditinjau dari Indikator Pelaksana (Peran Pemerintah) yaitu termasuk kategori **Rendah**, seperti pada tabel 5.18 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval.

Tabel 5.18

Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Kriteria Interpretasi Skor	Interval
Tinggi	75-100%
Sedang	51-74%
Rendah	26-50%
Sangat Rendah	<25%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

3. Peran Masyarakat

Hasil analisis yang diperoleh dari responden yaitu Desa Sawah dengan indikator Pelaksana (Peran Masyarakat) yang meliputi keterlibatan masyarakat dalam penangaan sanitasi dimana hasil rata-rata tingkat permasalahan dari indikator Pelaksana (Peran Masyarakat) yaitu **58.30%**. Berikut tabel 5.19 Indikator Pelaksana (Peran Masyarakat).

Tabel 5.19 Indikator Pelaksana (Peran Masyarakat)

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Frekuensi	Indeks %	Rata-rata %	
1	Apakah pernah ada peran atau keterlibatan masyarakat dalam penangaan sanitasi di lokasi ini?	Selalu (adanya bentuk pemeliharaan sanitasi tiap hari)	4	16	58,3	58,30%
		Sering (adanya bentuk pemeliharaan sanitasi tiap minggu)	33	99		
		Kadang-kadang (adanya bentuk pemeliharaan sanitasi tiap bulan)	54	108		
		Tidak pernah	8	8		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka interpretasi skor tingkat permasalahan ditinjau dari Indikator Pelaksana (Peran Masyarakat) yaitu termasuk kategori **Sedang**, seperti pada tabel 5.20 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval.

Tabel 5.20
Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Kriteria Interpretasi Skor	Interval
Tinggi	75-100%
Sedang	51-74%
Rendah	26-50%
Sangat Rendah	<25%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

C. Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi)

Hasil analisis yang diperoleh dari responden yaitu Desa Sawah dengan indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi) yang meliputi bentuk pemeliharaan secara rutin/berkala sampah, air limbah dan drainase, dimana hasil rata-rata tingkat permasalahan dari indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi) yaitu **66.20 %**. Berikut tabel 5.21 indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi).

Tabel 5.21 Indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi)

No	Pertanyaan	Jawaban Responden	Frekuensi	Indeks %	Rata-rata %	
1	Apakah ada pemeliharaan secara rutin/berkala sampah yang ada dirumah anda sesuai standar teknis?	Selalu (pemeliharaan setiap hari)	6	24	66.2	
		Sering (pemeliharaan setiap minggu)	52	156		
		Kadang-kadang (pemeliharaan setiap bulan)	41	82		
		Tidak pernah	0	0		
2	Apakah ada pemeliharaan secara rutin/berkala air limbah yang ada dirumah anda sesuai standar teknis?	Selalu (pemeliharaan setiap hari)	0	0	57.6	66.20%
		Sering (pemeliharaan setiap minggu)	30	90		
		Kadang-kadang (pemeliharaan setiap bulan)	69	138		
		Tidak pernah	0	0		
3	Apakah ada pemeliharaan secara rutin/berkala drainase yang ada dirumah anda sesuai standar teknis?	Selalu (pemeliharaan setiap hari)	0	0	75.0	
		Sering (pemeliharaan setiap minggu)	39	117		
		Kadang-kadang (pemeliharaan setiap bulan)	60	180		
		Tidak pernah	0	0		

Sumber: Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas maka interpretasi skor tingkat permasalahan ditinjau dari indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi) yaitu termasuk kategori **Sedang**, seperti pada tabel 5.22 Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval.

Tabel 5.22
Kriteria Interpretasi Skor Berdasarkan Interval

Kriteria Interpretasi Skor	Interval
Tinggi	75-100%
Sedang	51-74%
Rendah	26-50%
Sangat Rendah	<25%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Sehingga berdasarkan tabel diatas maka hasil analisis Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah yang bertepatan di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah yaitu dapat di bandingkan berdasarkan tabel rekapitulasi berikut :

Tabel 5.23 Rekapitulasi Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Kuantan Tengah

No	Lokasi	Indikator	Rata-Rata (%)	Keterangan
1	Desa Koto Taluk	Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi)	72.28%	Sedang
		Pelaksana (Sistem Pengelolaan Sanitasi)	74.85%	Sedang
		Pelaksana (Peran Pemerintah)	52%	Sedang
		Pelaksana (Peran Masyarakat)	55%	Sedang
		Indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi)	59,92%	Sedang
2	Desa Sawah	Fisik (Kondisi Prasarana Sanitasi)	65%	Sedang
		Pelaksana (Sistem Pengelolaan Sanitasi)	66%	Sedang
		Pelaksana (Peran Pemerintah)	50%	Rendah
		Pelaksana (Peran Masyarakat)	58,30%	Sedang
		Indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi)	66,20%	Sedang

Sumber: Hasil Analisis, 2020

5.3 Merumuskan Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah

Berdasarkan hasil dari sasaran 1 dan 2 yaitu telah di ketahui Karakteristik sanitasi permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah dan Tingkat

permasalahan sanitasi permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah kemudian merumuskan strategi penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah menggunakan analisis SWOT, dimana menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk menghasilkan strategi tersebut. Berikut tabel 5.24 tabel SWOT Desa Koto Taluk dan tabel 5.25 tabel SWOT Desa Sawah.

Tabel 5.24 Tabel SWOT Desa Koto Taluk

SWOT (Faktor Internal)	
Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
a. Desa Koto Taluk Sistem pengolahan air limbah sudah terhubung septitank dengan sistem pengolahan setempat	a. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Desa Koto Taluk yang tersedia kurang dimanfaatkan oleh masyarakat
b. Tersedianya sarana dan prasarana air limbah domestik (MCK dan Mobil Tinja) di Desa Koto Taluk	b. Kurang terpelihara sarana prasarana persampahan yang tersedia di Desa Koto Taluk
c. Terdapatnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang sudah berfungsi di Desa Koto Taluk	c. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pengolahan Persampahan dan Air Limbah permukiman di Desa Koto Taluk
d. Tersedianya sarana prasarana untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA di Desa Koto Taluk	d. Belum terdapatnya sarana prasarana drainase yang telah dibangun di Desa Koto Taluk
e. Kualitas konstruksi drainase baik Desa Koto Taluk	e. Belum tersedianya masterplan drainase untuk pengurangan genangan.
f. Terdapatnya kegiatan pembersihan drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui program "Jumat Bersih" tentang pemeliharaan drainase di Desa Koto Taluk.	f. Ketersediaan lahan untuk saluran drainase sangat terbatas di Desa Koto Taluk
	g. Masih rendahnya kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi dan pemeliharaan drainase di Desa

SWOT (Faktor Eksternal)

Opportunity (Peluang)

Threat (Tantangan)

- | | |
|---|--|
| <p>a. Adanya dukungan dana dari program KOTAKU terhadap Sanitasi dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten</p> <p>b. Adanya kerja sama dengan pihak swasta yang bersedia untuk berpartisipasi membangun sarana air limbah</p> <p>c. Terdapatnya perusahaan memberikan CSR dalam pembangunan Sanitasi</p> <p>d. Adanya peluang dukungan dana terhadap penanganan sanitasi yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi.</p> <p>e. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan air limbah, pengolahan persampahan dan drainase</p> | <p>a. Belum terdapatnya Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kuantan Singingi</p> <p>b. Rendahnya pendanaan untuk mengelola Persampahan di Kabupaten Kuantan Singingi</p> <p>c. Lemahnya koordinasi antar lembaga pusat, provinsi dan daerah dalam pengelola drainase</p> |
|---|--|

Sumber : Hasil Analisis 2020

Tabel 5.25 Tabel SWOT Desa Sawah

SWOT (Faktor Internal)	
Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
d. Tersedianya sarana dan prasarana air limbah domestik (MCK dan Mobil Tinja) di Desa Sawah	a. Kurang memadai sarana prasarana persampahan yang tersedia di Desa Sawah
e. Adanya minat serta peran masyarakat dalam sistem pengelolaan air limbah di Desa Sawah	b. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pengolahan persampahan permukiman di Desa Sawah
f. Terdapatnya kepemilikan tempat sampah individu di masyarakat di Desa Sawah	c. Terdapatnya pengelolaan sampah masyarakat dengan cara dibakar dan dibuang langsung kesungai
g. Masih tingginya budaya gotong royong dalam penanganan sampah dari masyarakat di Desa Sawah	d. Tidak tersedianya Tempat Pembuangan (TPS) di Desa Sawah
h. Tersedianya saluran drainase di kawasan permukiman di Desa Sawah	e. Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki jamban individual/tidak terhubung dengan septitank dan terdapatnya wc umum apung di sempadan sungai di Desa Sawah
i. Sebagian saluran drainase dengan konstruksi yang memadai	f. Masih adanya budaya masyarakat masih menggunakan sungai untuk aktivitas mandi cuci kakus di Desa Sawah
	g. Belum terdatanya sarana prasarana drainase yang telah dibangun di Desa Sawah
	h. Masih terdapatnya kualitas konstruksi saluran drainase yang belum memadai di Desa Sawah
	i. Belum tersedianya masterplan drainase untuk pengurangan genangan di Desa Sawah
SWOT (Faktor Eksternal)	

Opportunity (Peluang)	Threat (Tantangan)
a. Terdapatnya OPD yang menangani pengelolaan Sampah di Kabupaten Kuantan Singingi	a. Belum terdapatnya Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan air limbah domestik
b. Terdapatnya pemungutan retribusi pelayanan Sampah di Kabupaten Kuantan Singingi	b. Belum terdapatnya kelembagaan (UPTD) yang khusus menangani pengelolaan air limbah di Kabupaten Kuantan Singingi
c. Adanya Pihak swasta yang bersedia untuk berpartisipasi membangun sarana air limbah	c. Tidak terdapatnya perusahaan memberikan CSR dalam pembangunan Sanitasi
d. Adanya peluang dukungan dana terhadap penanganan sanitasi yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi.	d. Lemahnya koordinasi antar lembaga pusat, provinsi dan daerah dalam pengelola drainase
e. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan air limbah, pengolahan persampahan dan drainase	

Sumber : Hasil Analisis 2020

Berdasarkan tabel SWOT diatas maka telah ditentukan Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang), Threat (Tantangan). Kemudian akan dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 5.26 Analisis SWOT Desa Koto Taluk

Internal	
Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)





- a. Desa Koto Taluk Sistem pengolahan air limbah sudah terhubung septitank dengan sistem pengolahan setempat
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana air limbah domestik (MCK dan Mobil Tinja) di Desa Koto Taluk
 - c. Terdapatnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang sudah berfungsi di Desa Koto Taluk
 - d. Tersedianya sarana prasarana untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA di Desa Koto Taluk
 - e. Kualitas konstruksi drainase baik Desa Koto Taluk
 - f. Terdapatnya kegiatan pembersihan drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui program "*Jumat Bersih*" tentang pemeliharaan drainase di Desa Koto Taluk.
- a. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Desa Koto Taluk yang tersedia kurang dimanfaatkan oleh masyarakat
 - b. Kurang terpelihara sarana prasarana persampahan yang tersedia di Desa Koto Taluk
 - c. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pengolahan Persampahan dan Air Limbah permukiman di Desa Koto Taluk
 - d. Belum terdatanya sarana prasarana drainase yang telah dibangun di Desa Koto Taluk
 - e. Belum tersedianya masterplan drainase untuk pengurangan genangan.
 - f. Ketersediaan lahan untuk normalisasi saluran drainase sangat terbatas di Desa Koto Taluk
 - g. Masih rendahnya kesadaran, pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi dan pemeliharaan drainase di Desa Koto Taluk



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Eksternal

Opportunity (Peluang)

- a. Adanya dukungan dana dari program KOTAKU terhadap Sanitasi dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten
- b. Adanya kerja sama dengan pihak swasta yang bersedia untuk berpartisipasi membangun sarana air limbah
- c. Terdapatnya perusahaan memberikan CSR dalam pembangunan Sanitasi
- d. Adanya peluang dukungan dana terhadap penanganan sanitasi yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi.
- e. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan air limbah, pengolahan persampahan dan drainase

Strategi S-O

- a. Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat dilokasi kumuh yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat di Desa Koto Taluk
- b. Penataan akses pelayanan air limbah baik melalui sistem on-site maupun off-site di Desa Koto Taluk
- c. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola persampahan di Desa Koto Taluk
- d. Mengalokasikan dana untuk pengembangan 3R, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kab maupun swasta
- e. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah di Desa Koto Taluk
- f. Melakukan peningkatan pembinaan masyarakat tentang kegiatan pemeliharaan drainase

Strategi W-O

- a. Meningkatkan pembiayaan pembangunan sanitasi di Kecamatan Kuantan Tengah
- b. Melaksanakan rehabilitasi TPS agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di Desa Koto Taluk
- c. Optimalisasikan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan di Desa Koto Taluk
- d. Membentuk Perda tentang Pengelolaan air limbah melalui kerjasama dengan pihak swasta dan stakeholder dalam pengolahan air limbah domestik di Desa Koto Taluk
- e. Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pengelolaan persampahan dan air limbah kepada masyarakat umum di Desa Koto Taluk
- f. Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder agar mendapatkan dukungan program dalam penyusunan Masterplan Drainase dan penyusunan data base drainase di Desa Koto Taluk.
- g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan seluruh pihak dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase

Threat (Tantangan)

- a. Belum terdapatnya Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Rendahnya pendanaan untuk mengelola Persampahan di Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Lemahnya koordinasi antar lembaga pusat, provinsi dan daerah dalam pengelola drainase

Strategi S-T

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana air limbah domestik agar membentuk kelembagaan untuk mengelola air limbah di Desa Koto Taluk
- b. Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman di Desa Koto Taluk agar membentuk kelembagaan dalam pengelolaan air limbah
- c. Memaksimalkan peran OPD dalam melakukan sosialisasi tentang pengelolaan Sampah di Desa Koto Taluk
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan drainase di Desa Koto Taluk

Strategi W-T

- a. Menyusun perangkat peraturan perundangan (Perda/Perbup) yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman di Desa Koto Taluk
- b. Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman didaerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan instansi terkait lainnya
- c. Meningkatkan kinerja institusi pengelola sampah terkait dana operasional sampah dan sarana prasarana persampahan di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah
- d. Mendorong peningkatan kepada stakeholder dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase di Desa Koto Taluk

Tabel 5.27 Analisis SWOT Desa Sawah

Internal	
Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)





- a. Tersedianya sarana dan prasarana air limbah domestik (MCK dan Mobil Tinja) di Desa Sawah
- b. Adanya minat serta peran masyarakat dalam sistem pengelolaan air limbah di Desa Sawah
- c. Terdapatnya kepemilikan tempat sampah individu di masyarakat di Desa Sawah
- d. Masih tingginya budaya gotong royong dalam penanganan sampah dari masyarakat di Desa Sawah
- e. Tersedianya saluran drainase di kawasan permukiman di Desa Sawah
- f. Sebagian saluran drainase dengan konstruksi yang memadai
- a. Kurang memadai sarana prasarana persampahan yang tersedia di Desa Sawah
- b. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pengolahan persampahan permukiman di Desa Sawah
- c. Terdapatnya pengelolaan sampah masyarakat dengan cara dibakar dan dibuang langsung kesungai
- d. Tidak tersedianya Tempat Pembuangan (TPS) di Desa Sawah
- e. Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki jamban individual/tidak terhubung dengan septitank dan terdapatnya wc umum apung di sempadan sungai di Desa Sawah
- f. Masih adanya budaya masyarakat masih menggunakan sungai untuk aktivitas mandi cuci kakus di Desa Sawah
- g. Belum terdatanya sarana prasarana drainase yang telah dibangun di Desa Sawah
- h. Masih terdapatnya kualitas konstruksi saluran drainase yang belum memadai di Desa Sawah
- i. Belum tersedianya masterplan drainase untuk pengurangan genangan di Desa Sawah



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Eksternal

Opportunity (Peluang)

- a. Terdapatnya OPD yang menangani pengelolaan Sampah di Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Terdapatnya pemungutan retribusi pelayanan Sampah di Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Adanya Pihak swasta yang bersedia untuk berpartisipasi membangun sarana air limbah
- d. Adanya peluang dukungan dana terhadap penanganan sanitasi yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi.
- e. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan air limbah, pengolahan persampahan dan drainase

Strategi S-O

- a. Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah di Desa Sawah
- b. Melakukan Peningkatan pembangunan pembiayaan sanitasi dalam mewujudkan sanitasi yang lebih baik di Desa Sawah
- c. Memaksimalkan peran OPD dalam menangani pengelolaan Sampah di Desa Sawah
- d. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Sawah
- e. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah di Desa Sawah

Strategi W-O

- a. Optimalisasikan pemanfaatan prasarana dan sarana serta Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan persampahan di Desa Sawah
- b. Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum di Desa Sawah
- c. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase melalui bentuk kualitas kontruksinya dan mampu mengurangi genangan yang ada di Desa Sawah
- d. Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder agar mendapatkan dukungan program dalam Penyusunan Perda drainase, Masterplan Drainase dan penyusunan data base drainase
- e. Melakukan penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan drainase terhadap permukiman yang terdapat dipinggiran sungai bagian Desa Sawah

Threat (Tantangan)

- a. Belum terdapatnya Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan air limbah domestik
- b. Belum terdapatnya kelembagaan (UPTD) yang khusus menangani pengelolaan air limbah di Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Tidak terdapatnya perusahaan memberikan CSR dalam pembangunan Sanitasi
- d. Lemahnya koordinasi antar lembaga pusat, provinsi dan daerah dalam pengelola drainase

Strategi S-T

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana air limbah domestik yang tersedia di Desa Sawah
- b. Mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak menggunakan wc umum apung dan wc yang tidak terhubung dengan septitank serta tidak menggunakan sungai untuk aktivitas mandi cuci kakus
- c. Memaksimalkan peran OPD dalam melakukan sosialisasi tentang pengelolaan Sampah di Desa Sawah
- d. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase di Desa Sawah
- e. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan drainase berwawasan lingkungan dengan memperhatikan konservasi sumber daya air.

Strategi W-T

- a. Membentuk Perda tentang Pengelolaan air limbah melalui kerjasama dengan pihak swasta dan stkeholder dalam pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di Desa Sawah
- c. Meningkatkan kinerja institusi pengelola sampah terkait dana operasional sampah dan sarana prasarana persampahan di Desa Sawah
- d. Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam pengelolaan pebentukan MasterPlan drainase perkotaan di Desa Sawah
- e. Melakukan kebijakan satuan standar dalam pengelolaan teknis drainase perkotaan terhadap bantaran sungai yang sudah dijadikan tempat tinggal (kawasan permukiman) di Desa Sawah.

Berdasarkan tabel diatas maka tersusunnya Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di **Desa Koto Taluk** sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- a. Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat dilokasi kumuh yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat di Desa Koto Taluk
- b. Penataan akses pelayanan air limbah baik melalui sistem on-site maupun off-site di Desa Koto Taluk
- c. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola persampahan di Desa Koto Taluk
- d. Mengalokasikan dana untuk pengembangan 3R, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kab maupun swasta
- e. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah di Desa Koto Taluk
- f. Melakukan peningkatan pembinaan masyarakat tentang kegiatan pemeliharaan drainase

2. Strategi W-O

- a. Meningkatkan pembiayaan pembangunan sanitasi di Kecamatan Kuantan Tengah
- b. Melaksanakan rehabilitasi TPS agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di Desa Koto Taluk
- c. Optimalisasikan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan di Desa Koto Taluk

- d. Membentuk Perda tentang Pengelolaan air limbah melalui kerjasama dengan pihak swasta dan stkeholder dalam pengolahan air limbah domestik di Desa Koto Taluk
- e. Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pengelolaan persampahan dan air limbah kepada masyarakat umum di Desa Koto Taluk
- f. Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder agar mendapatkan dukungan program dalam penyusunan Masterplan Drainase dan penyusunan data base drainase di Desa Koto Taluk.
- g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan seluruh pihak dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase

3. Strategi S-T

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana air limbah domestik agar membentuk kelembagaan untuk mengelola air limbah di Desa Koto Taluk
- b. Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman di Desa Koto Taluk agar membentuk kelembagaan dalam pengelolaan air limbah
- c. Memaksimalkan peran OPD dalam melakukan sosialisasi tentang pengelolaan Sampah di Desa Koto Taluk
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan drainase di Desa Koto Taluk

4. Strategi W-T

- a. Menyusun perangkat peraturan perundangan (Perda/Perbup) yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman di Desa Koto Taluk
- b. Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan instansi terkait lainnya
- c. Meningkatkan kinerja institusi pengelola sampah terkait dana operasional sampah dan sarana prasarana persampahan di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah
- d. Mendorong peningkatan kepada stakeholder dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase di Desa Koto Taluk

Sedangkan Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di **Desa Sawah** sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- a. Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah di Desa Sawah
- b. Melakukan Peningkatan pembangunan pembiayaan sanitasi dalam mewujudkan sanitasi yang lebih baik di Desa Sawah
- c. Memaksimalkan peran OPD dalam menangani pengelolaan Sampah di Desa Sawah

- d. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Sawah
- e. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah di Desa Sawah

2. Strategi W-O

- a) Optimalisasikan pemanfaatan prasarana dan sarana serta Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan persampahan di Desa Sawah
- b) Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum di Desa Sawah
- c) Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase melalui bentuk kualitas konstruksinya dan mampu mengurangi genangan yang ada di Desa Sawah
- d) Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder agar mendapatkan dukungan program dalam Penyusunan Perda drainase, Masterplan Drainase dan penyusunan data base drainase
- e) Melakukan penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan drainase terhadap permukiman yang terdapat dipinggiran sungai bagian Desa Sawah

3. Strategi S-T

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana air limbah domestik yang tersedia di Desa Sawah
- b. Mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak menggunakan wc umum

apung dan wc yang tidak terhubung dengan septitank serta tidak menggunakan sungai untuk aktivitas mandi cuci kakus

- c. Memaksimalkan peran OPD dalam melakukan sosialisasi tentang pengelolaan Sampah di Desa Sawah
- d. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase di Desa Sawah
- e. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan drainase berwawasan lingkungan dengan memperhatikan konservasi sumber daya air.

4. Strategi W-T

- a. Membentuk Perda tentang Pengelolaan air limbah melalui kerjasama dengan pihak swasta dan stakeholder dalam pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di Desa Sawah
- c. Meningkatkan kinerja institusi pengelola sampah terkait dana operasional sampah dan sarana prasarana persampahan di Desa Sawah
- d. Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam pengelolaan pembentukan MasterPlan drainase perkotaan di Desa Sawah
- e. Melakukan kebijakan satuan standar dalam pengelolaan teknis drainase perkotaan terhadap bantaran sungai yang sudah dijadikan tempat tinggal (kawasan permukiman) di Desa Sawah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1) Mengidentifikasi Karakteristik Sanitasi di Kawasan Permukiman

Kumuh Kecamatan Kuantan Tengah

a. Drainase Lingkungan

Berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah, kawasan yang terkena genangan ialah sebesar **4,64%** di Desa Koto Taluk. Sedangkan kawasan yang terkena genangan di Desa Sawah sebesar **32,27%**. Persentase ketidaktersediaan drainase di Desa Sawah sebesar **90,23%**. Sedangkan di Desa Koto Taluk persentase ketidaktersediaan drainase sebesar **82,16%**. Persentase ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan di Desa Koto Taluk yaitu **12,49%**. Sedangkan di Desa Sawah persentase ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan sebesar **19,69%**. Persentase drainase tidak terpelihara dengan drainase eksisting ialah **79,32%** untuk Desa Koto Taluk. Sedangkan di Desa Sawah persentase drainase tidak terpelihara dengan drainase eksisting sebesar **71,97%**. Kemudian kualitas konstruksi saluran drainase, berdasarkan hasil observasi di Desa Koto Taluk sebagian besar sudah terbangun drainase dengan kualitas konstruksi saluran drainase yang baik, yang mampu mengalirkan

limpasan air dikarenakan di Desa Koto Taluk ini pernah adanya pemeliharaan drainase dengan program Pemerintah Daerah yaitu “*Jum’at Bersih*”. Sedangkan di Desa Sawah sudah terbangun drainase dengan kualitas konstruksi saluran drainase yang belum memadai, dibandingkan dengan di Desa Koto Taluk dimana kualitas konstruksi drainase di lokasi penelitian yaitu terdapatnya kerusakan lapisan material drainasenya, sehingga saluran drainase kurang berfungsi mengalirkan dengan baik.

b. Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis di Desa Koto Taluk hanya sebesar **19,06 %**. Persentase pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis di Desa Sawah sebesar **32,45%**. Persentase sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis di Desa Sawah sebesar **27,58%**. Persentase sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis di Desa Koto Taluk sebesar **27,58%**.

c. Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan data sekunder profil permukiman kumuh Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil persentase sarana dan prasarana yang tidak sesuai standar teknis yaitu tidak adanya tempat sampah dengan

pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga di Desa Koto Taluk sebesar **92,63%**. Persentase sarana dan prasarana yang tidak sesuai standar teknis yaitu di Desa Sawah sebesar **100,00%**. Persentase sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis di Desa Koto Taluk ialah sebanyak **65,04%**. Sedangkan persentase sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis di Desa Sawah sebesar **81,17%**. Persentase yang tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolan persampahannya di Desa Koto Taluk sebanyak **79,45%** dikarenakan rendahnya bentuk pemeliharaan pengolahan persampahan baik secara rutin maupun berkala. Persentase yang tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolan persampahannya di Desa Sawah sebesar **100,00%**.

2) Menganalisis Tingkat Permasalahan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah

Analisis tingkat permasalahan sanitasi kawasan permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah menggunakan jenis analisis skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok, dengan indikator sebagai berikut :

- e) Fisik (kondisi prasarana sanitasi)
- f) Pelaksana (sistem pengelolaan, peran pemerintah, peran masyarakat)
- g) Perilaku (kebiasaan masyarakat)

Hasil perhitungan tingkat permasalahan sanitasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah yang terdiri dari Desa Koto Taluk dan Desa Sawah yaitu :

- Rata-rata tingkat permasalahan dari Kondisi Fisik Prasarana Sanitasi di Desa Koto Taluk yaitu **72,28%**, sedangkan di Desa Sawah yaitu **65%**.
- Rata-rata tingkat permasalahan dari indikator pelaksana sistem pengelolaan sanitasi di Desa Koto Taluk yaitu **74.85%**, sedangkan di Desa Sawah yaitu **66%**. Rata-rata tingkat permasalahan dari indikator Pelaksana (peran pemerintah) di Desa Koto Taluk yaitu **52%**, sedangkan di Desa Sawah yaitu **52%**. Rata-rata tingkat permasalahan dari indikator Pelaksana (Peran Masyarakat) di Desa Koto Taluk yaitu **55%**, sedangkan di Desa Sawah yaitu **58,30%**.
- Rata-rata tingkat permasalahan dari indikator Perilaku (Kebiasaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sanitasi) yang meliputi bentuk pemeliharaan secara rutin/berkala sampah, air limbah dan drainase, dimana hasil rata-rata nya di Desa Koto Taluk yaitu **59.92%**, sedangkan di Desa Sawah yaitu **66,20%**.

3) Merumuskan Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah

Berdasarkan hasil dari sasaran 1 dan 2 yaitu telah di ketahui Karakteristik sanitasi permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah dan Tingkat permasalahan sanitasi permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah kemudian merumuskan strategi penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman

Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah menggunakan analisis SWOT, dimana menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk menghasilkan strategi terdiri atas Desa Koto Taluk dan Desa Sawah:

- **Strategi Desa Koto Taluk :**

5. Strategi S-O

- a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (onsite) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal di Desa Koto Taluk
- b) Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat dilokasi kumuh yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat di Desa Koto Taluk
- c) Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola persampahan di Desa Koto Taluk
- d) Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Koto Taluk
- e) Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah di Desa Koto Taluk
- f) Melakukan peningkatan pembinaan masyarakat tentang kegiatan pemeliharaan drainase

6. Strategi W-O

- a) Melalui kerjasama dengan pihak swasta dan stakeholder dalam pengolahan air limbah domestik di Desa Koto Taluk

- b) Membentuk kelembagaan dalam pengelolaan air limbah dan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman di Desa Koto Taluk
- c) Melaksanakan rehabilitasi TPS agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di Desa Koto Taluk
- d) Optimalisasikan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan di Desa Koto Taluk
- e) Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum di Desa Koto Taluk
- f) Meningkatkan sarana cakupan pelayanan angkutan secara terencana melalui rute tempat sampah masyarakat ke Tempat Pembuangan (TPS)
- g) Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder agar mendapatkan dukungan program dalam penyusunan Masterplan Drainase dan penyusunan data base drainase di Desa Koto Taluk.

7. Strategi S-T

- a) Memanfaatkan sarana dan prasarana air limbah domestik agar membentuk kelembagaan untuk mengelola air limbah di Desa Koto Taluk
- b) Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman di Desa Koto Taluk agar membentuk kelembagan dalam pengelolaan air limbah

- c) Memaksimalkan peran OPD dalam melakukan sosialisasi tentang pengelolaan Sampah di Desa Koto Taluk
- d) Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga di Desa Koto Taluk
- e) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan drainase di Desa Koto Taluk

8. Strategi W-T

- a) Menyusun perangkat peraturan perundangan (Perda/Perbup) yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman di Desa Koto Taluk
- b) Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan instansi terkait lainnya
- c) Meningkatkan kinerja institusi pengelola sampah terkait dana operasional sampah dan sarana prasarana persampahan di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah
- d) Mendorong peningkatan kepada stakeholder dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase di Desa Koto Taluk

- Strategi Desa Sawah

1. Strategi S-O

- a) Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah di Desa Sawah
- b) Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat dilokasi kumuh yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat di Desa Sawah
- c) Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan
- d) Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Sawah
- e) Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah di Desa Sawah

2. Strategi W-O

- f) Membentuk Perda tentang Pengelolaan air limbah melalui kerjasama dengan pihak swasta dan stkeholder dalam pengolahan air limbah domestik di Desa Sawah
- g) Optimalisasikan pemanfaatan prasarana dan sarana serta Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan persampahan di Desa Sawah
- h) Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum di Desa Sawah
- i) Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase melalui bentuk kualitas kontruksinya dan mampu mengurangi genangan yang ada di Desa Sawah

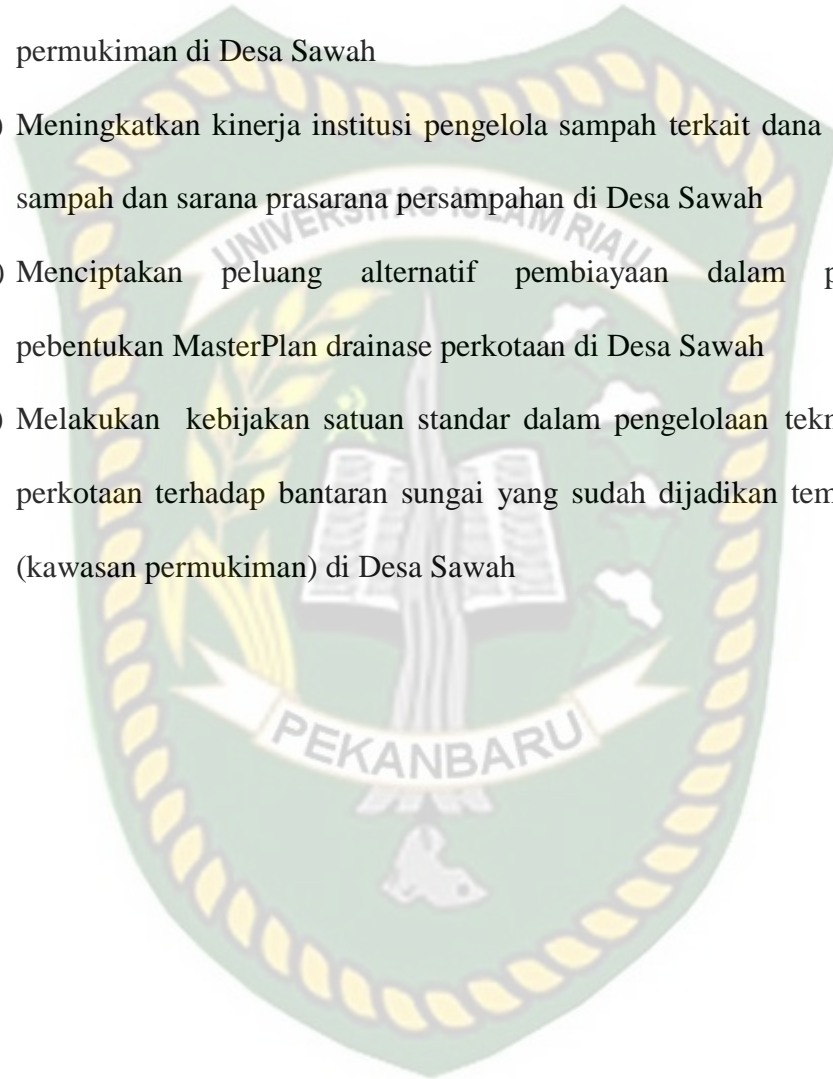
- j) Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder agar mendapatkan dukungan program dalam Penyusunan Perda drainase, Masterplan Drainase dan penyusunan data base drainase
- k) Melakukan penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan drainase terhadap permukiman yang terdapat dipinggiran sungai bagian Desa Sawah

3. Strategi S-T

- a) Memanfaatkan sarana dan prasarana air limbah domestik yang tersedia di Desa Sawah
- b) Mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak menggunakan wc umum apung dan wc yang tidak terhubung dengan septitank serta tidak menggunakan sungai untuk aktivitas mandi cuci kakus
- c) Memaksimalkan peran OPD dalam melakukan sosialisasi tentang pengelolaan Sampah di Desa Sawah
- d) Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase di Desa Sawah
- e) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan drainase berwawasan lingkungan dengan memperhatikan konservasi sumber daya air.

4. Strategi W-T

- a) Melaksanakan bantuan teknis penyusunan Perda/Perbup dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman di Desa Sawah
- b) Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di Desa Sawah
- c) Meningkatkan kinerja institusi pengelola sampah terkait dana operasional sampah dan sarana prasarana persampahan di Desa Sawah
- d) Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam pengelolaan pembentukan MasterPlan drainase perkotaan di Desa Sawah
- e) Melakukan kebijakan satuan standar dalam pengelolaan teknis drainase perkotaan terhadap bantaran sungai yang sudah dijadikan tempat tinggal (kawasan permukiman) di Desa Sawah



6.2 Saran

Dalam upaya penanganan sanitasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah saat ini saran yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Untuk sektor drainase lingkungan diperlukan :
 - a. Penataan sistem jaringan drainase
2. Untuk sektor air limbah permukiman diperlukan :
 - a. Peningkatan prasarana dan sarana air limbah lingkungan
 - b. Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah komunal di lingkungan permukiman di Kecamatan Kuantan Tengah
 - c. Perlunya instalasi pengolahan air limbah terpusat di kawasan permukiman di Kecamatan Kuantan Tengah
3. Untuk sektor persampahan diperlukan :
 - a. Diutamakan pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, recycle) di kawasan permukiman di Kecamatan Kuantan Tengah
 - a. Peningkatan prasarana dan sarana sistem persampahan
 - b. Penyediaan infrastruktur pengelolaan dan sistem persampahan
4. Pemerintah di harapkan segera melakukan penganggaran pembiayaan penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah, khususnya di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah.
5. Diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat dalam program yang pemerintah laksanakan dalam penanganan sanitasi kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah, khususnya di Desa Koto Taluk dan Desa Sawah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Creswell, J.W, 2013, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan*. Yogyakarta : Penerbit Fakultas Geografi.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Jurnal :

Astuti, Puji, dkk. 2014. "Kajian Wilayah Kumuh di Desa Babussalam, Kota Duri, Provinsi Riau". *Poverty Eradication*. 5, (5) : 1-10.

Bintang, Cihe Aprilia, 2014"Analisa Strategi Penataan Permukiman dan Infrastruktur di Kabupaten Pelalawan". *Saintis*. 14, (1) : 70-81.

Hermin, Poedjiastoeti, dkk. 2015. "Karakteristik Kondisi Sanitasi Lingkungan Di Kawasan Pemukiman Nelayan Bandengan Kabupaten Kendal". *Perencanaan Wilayah dan Kota*. 11, (2) : 1-15.

Hasan,dkk. 2018. "Konsep Penanganan Sanitasi Permukiman Kumuh Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang". *Perencanaan Wilayah dan Kota*. 10, (2) : 1-9.

- Hariyanto, Asep, 2007 "Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan". *Perencanaan Wilayah dan Kota*. 7, (2) : 11-37.
- Johanis K, dkk. 2017 "Pengembangan Sanitasi Berkelanjutan Di Kawasan Permukiman Kumuh Studi Kasus (Kecamatan Tumpa)". *Perencanaan Wilayah dan Kota*. 15, (1) : 276-286.
- Meine, Pieter van Dijk, dkk. 2014 "Financing sanitation and cost recovery in the slums of Dar es Salaam and Kampala" *Habitat International*. 43, (1) : 206-213.
- Naris, Dyah Prasetyawati, dkk. 2015. "Analisis Kondisi Sanitasi Permukiman di Kota Yogyakarta". *Ekosains*. 10, (3) : 29-36.
- Nurhapni, & Burhanudin, H., 2015, "Kajian Pembangunan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan Dikawasan Perumahan", *Perencanaan Wilayah dan Kota*, 11, (1) : 1-12.
- Riswan. 2011. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan", *Ilmu Lingkungan*, 9, (1) : 31-38.
- Sheela, S. Sinharoy, dkk. 2019 "Review of drivers and barriers of water and sanitation policies for urban informal settlements in low-income and middle-income countries". *Utilities Policy*. 60, (1) : 1-8.

Skripsi/Tugas Akhir :

Hasan, 2018 “Konsep Penanganan Sanitasi Permukiman Kumuh Di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.”*Tugas Akhir*”, Malang. Institut Teknologi Nasional Malang.

Mastin, Irfan, 2019 “Identifikasi Permasalahan Permukiman Kumuh Di Kawasan Dabo Lama Kabupaten Lingga” *Tugas Akhir*. Pekanbaru. Universitas Islam Riau

Niracanti, Galuh Aji, 2001 “Studi Perubahan Penggunaan Ruang Permukiman Kampung Kauman Semarang”*Tugas Akhir*. Semarang. Universitas Diponegoro.

Novriadi, 2014. “Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Melalui Konsep Peremajaan (Studi Kasus : Kelurahan Meranti Pandak)”*Tugas Akhir*. Pekanbaru. Universitas Islam Riau

Dokumen dan Peraturan (Regulasi) :

Al-Qur’an. *Surat Al-baqarah Ayat 11* , Departemen Agama RI.

Buku Putih Sanitasi Kuantan Singingi Tahun 2014.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2018. *Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka Tahun 2018*, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2019. *KEcamatan Kuantan Tengah Dalam Angka Tahun 2018*, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditjen PP dan PL. 2011. Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Jakarta: Depkes RI.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permuukiman (KSNP-SPALP).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSN-SPP)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Profil Perumahan Kumuh Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 – 2019.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2030.

Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.421/IX/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Kpts.78/II/2020 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi

SNI 03-6981-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang–Undang No. 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*.